

Penulis:
Mohamad Mustari, Ph.D.

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA **MERDEKA BELAJAR**



Prodi S2 Studi Agama-Agama
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2022

Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar

Mohamad Mustari, Ph.D.



Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bandung

2022

Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar

Penulis:

Mohamad Mustari, Ph.D.

ISBN: 978-623-97989-5-6 (PDF)

ISBN 978-623-97989-5-6 (PDF)



Editor:

M. Taufiq Rahman

Desain Sampul dan Tata Letak:

Paelani Setia

Penerbit:

Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:

Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40292

Telepon : 022-7802276

Fax : 022-7802276

E-mail : s2saa@uinsgd.ac.id

Website : www.pps.uinsgd.ac.id/saas2

Cetakan pertama, Januari 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Dunia terus berubah mengikuti gerak langkah dan denyut sejarah manusia. Ia tak peduli dari mana proses perubahan itu terjadi. Apakah dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang besar sekalipun? Entahlah! Yang pasti perubahan akan terus berjalan bersama peradaban manusia. Pendidikan yang baik dan mencerahkan merupakan instrumen strategis sekaligus fondasi bagi perubahan tersebut. Sebaliknya, perubahan tanpa dukungan pendidikan yang mencerahkan akan menimbulkan petaka bagi kemanusiaan. Pendidikan dengan demikian merupakan *a jump for social change*.

Kini di berbagai belahan dunia terus berlomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini sebagai alat pendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Indonesia pun sedang berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai kebijakan Pemerintah, mulai dari pembenahan kurikulum, pemberian fasilitasi pendukung operasional pendidikan, pembuatan pelatihan-pelatihan guru, penumbuhan karakter peserta didik melalui lomba, peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan, pembangunan sarana pendidikan lainnya, hingga evaluasi pendidikan terus digalakkan. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan **MERDEKA BELAJAR** dengan Visi Pendidikan Indonesia “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global, selaras dengan ujuan cita-cita besar negara: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan semua itu pasti membutuhkan manajemen yang baik. Cita-cita yang baik membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang baik dan terarah. Tanpa manajemen yang baik, maka mutu pendidikan bisa jadi tak terkola dengan baik sehingga kurang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Dengan begitu, dikotomi antara mutu pendidikan dan manajemen pendidikan bukan lagi merupakan sesuatu yang penting untuk diperdebatkan, karena kedua-duanya sangat penting bagi dunia pendidikan. Mutu pendidikan membutuhkan manajemen yang baik dan manajemen yang baik membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk tujuan itulah, buku ini menjadi niscaya untuk diterbitkan.

Mataram, 6 Januari 2022

Mohamad Mustari, Ph.D.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I	
Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan Diganti Assesment Nasional (AN).....	1
Bab II	
Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)	10
Bab III	
Perubahan Mekanisme Dana Pemerintah dan Dana BOS.....	18
Bab IV	
Program Organisasi Penggerak (POP), Program Guru Penggerak (PGP) dan Program Sekolah Penggerak (PSP).....	30
Bab V	
Manajemen Kurikulum di Era Merdeka Belajar.....	48
Bab VI	
Manajemen Pembiayaan di Era Merdeka Belajar.....	59
Bab VII	
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Merdeka Belajar	66
Bab VIII	
Manajemen Sarana Prasarana di Era Merdeka Belajar	71
Bab IX	
Manajemen Hubungan Masyarakat di Era Merdeka Belajar	82
Bab X	
Perluasan Dana Bantuan Pendidikan dan Beasiswa	89
Bab XI	
Pendidikan Vokasi di Era Merdeka Belajar	94
Bab XII	
Manajemen Rencana Strategis di Era Merdeka Belajar.....	99
Bab XIII	
Supervisi Merdeka Belajar	103
BIOGRAFI PENULIS	108

Bab I

Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan Diganti Assesment Nasional (AN)

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan harkat dan martabat manusia secara utuh, menyeluruh, dan menarik serta menarik. Tidak akan pernah ada akhir untuk perbaikan sistem pendidikan suatu negara, sehingga pemantauan kualitas sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa pendidikan di masa depan lebih fokus, efektif, dan relevan dengan perubahan kebutuhan suatu negara (Arini et al., 2021; Aryanto et al., 2021)

Pendidikan adalah proses memperoleh dan menyimpan informasi baik dari sumber formal maupun nonformal untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas (Usman & Raharjo, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangat penting untuk mengembangkan tujuan pendidikan nasional agar diperoleh hasil yang unggul. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, serta menjadi warga negara yang mandiri dan demokratis serta bertanggung jawab dicanangkan sebagai tujuan pendidikan nasional (Adiwinata & Sujana, 2019).

Untuk tujuan tersebut, harus ada kurikulum untuk memandu isi, tujuan, teknik dan bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah proses pembelajaran dilaksanakan, akan dilakukan penilaian. Tidak mungkin melakukan kegiatan pendidikan tanpa melakukan evaluasi pembelajaran (Khosyi'in & Budisusila, 2021; Puspito, 2021). Semua evaluasi, bagaimanapun, tidak sama-sama bertujuan dalam menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai. Keberhasilan sekolah dapat dengan mudah dinilai jika metode yang benar digunakan. Pelajar dan institusi di semua tingkat dan jenis pendidikan, resmi dan informal, tunduk pada evaluasi yang dilakukan (Nuryanta, 2008).

Oleh karena itu, penilaian harus berpijak pada pemikiran untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, sehingga setiap evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing institusi bertujuan untuk meningkatkan pendidikan. Dikembangkan oleh menteri pendidikan dan penelitian budaya, kebijakan pendidikan belajar mandiri berusaha untuk menyediakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa dan guru. Ini kemudian berpijak pada Ujian Nasional diganti dengan Penilaian Kompetensi Minimum (Asesmen Nasional) (Rokhim, 2021). Termasuk guru dituntut untuk lebih inventif dalam memilih materi penilaian akibat perdebatan tentang pelaksanaan ujian kompetensi ini. Hal ini akan berdampak pada praktik guru yang hanya mengacu pada kurikulum dan tidak berimprovisasi menggunakan pendekatan instruksional standar (Driessen, 2021). Sebaliknya, definisi literasi dan numerasi guru sendiri adalah paradigma penilaian progresif yang dapat digunakan di kelas (Winata, 2021).

Ada tiga komponen yang dilakukan dalam Asesmen Nasional di Indonesia, yakni: penilaian Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan tinjauan lingkungan kelas. Penilaian hasil belajar kognitif, seperti literasi membaca dan literasi berhitung, diukur dengan menggunakan ujian kompetensi minimal. Hasil belajar emosional diukur dalam profil siswa Pancasila untuk memastikan bahwa siswa Indonesia memiliki

kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan cita-cita Pancasila. Ketika siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan evaluasi dan menunjukkan tingkat kemahiran yang diperlukan, survei komunitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk tenaga kependidikan, guru, dan siswa, dilakukan. Tujuan dari survei tentang lingkungan belajar adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hal-hal yang sebenarnya terjadi di sekolah (Novita et al., 2021).

Untuk pertama kalinya, sistem pendidikan Indonesia dievaluasi dari segi input, prosedur, dan hasil, bukan dari seberapa baik prestasi siswa dalam Ujian Nasional. Untuk jenjang SD/MI, SD/MI, dan SMP/MTs, penilaian nasional akan dilakukan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 untuk membantu guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran. Mulai tahun 2021 dan kedepan diproyeksikan menjadi tahun yang baik bagi para pelaku pendidikan karena adanya undang-undang ini (Maula, 2021). Karena pemanfaatan standar PISA (Program for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dalam evaluasi nasional ini, pendidik dan siswa harus siap sepenuhnya.

Meskipun demikian, banyak pendidik saat ini dan calon pendidik tidak terbiasa dengan dasar-dasar penilaian nasional, khususnya AKM, alat yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif siswa. Pendidik dan siswa bukan satu-satunya yang memiliki suara tentang bagaimana sumber daya pendidikan dan budaya diciptakan dalam hal penilaian nasional. Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan tugas ini. Penilaian nasional AKM tahun ini akan diadakan pada bulan Mei, dan guru dan siswa harus siap dengan data yang diperlukan untuk melakukannya dengan baik.

A. Kebijakan Pemerintah Pada Asesmen Nasional

Penghapusan ujian nasional (UN) dan penggantian penilaian dengan Penilaian Nasional (AN) meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan Survei Lingkungan Belajar adalah dua dari empat poin kebijakan "Program Freedom of Learning" yang dibahas oleh Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si (Rokhim, 2021). Ada perbedaan mendasar antara AN dan UN, yaitu AN mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, sedangkan UN melakukan hal yang sama untuk siswa secara individu. Berbagai macam metodologi dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang bakat dan pemahaman siswa, serta sikap dan motivasi mereka (Ansari & Saleh, 2019).

Semua lembaga pendidikan formal, termasuk SD, SMP, dan SMA, tunduk pada program pemerintah yang disebut Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Hasil belajar siswa yang paling mendasar berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas sekolah. Instrumen seperti evaluasi kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar digunakan dalam kategorisasi ini. Literasi, numerasi, dan pengetahuan kepribadian semuanya termasuk dalam evaluasi ini, yang juga melihat keterampilan penalaran dalam konteks membaca dan berhitung. Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan seberapa baik siswa menyerap informasi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan karakter moral mereka (Winata, 2021).

Dengan demikian, kemajuan, pertumbuhan, dan hasil belajar siswa semuanya dapat dipertimbangkan dalam proses evaluasi secara keseluruhan. Akibatnya, kata

"penilaian" harus digunakan untuk menggambarkan pembelajaran siswa. Penilaian tradisional dan penilaian alternatif adalah dua jenis evaluasi yang digunakan. Ujian benar-salah, tes pilihan ganda, tes ketuntasan, dan tes jawaban terbatas adalah contoh dari penilaian tradisional. Esai, penilaian praktis, penilaian proyek, kuesioner, inventaris, daftar periksa, penilaian sejawat, evaluasi diri, portofolio, pengamatan, diskusi, dan wawancara adalah contoh penilaian alternatif. Untuk menjelaskan keberhasilan keterampilan siswa, mencirikan keberhasilan proses pembelajaran, memutuskan tindak lanjut temuan penilaian, dan sebagai bentuk tanggung jawab dari sekolah kepada orang tua dan masyarakat, penilaian dilaksanakan (Waizah & Herwani, 2021).

B. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Pendidikan dapat dipecah menjadi tiga bagian utama: kurikulum, guru, dan evaluasi. Kurikulum menguraikan apa yang akan dipelajari siswa. Ketika berbicara tentang pendidikan, ini semua tentang mencari tahu cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan sambil mengikuti program studi yang ditentukan. Sedangkan penilaian menilai semua yang telah dipelajari, sejauh mana, dan dalam konteks apa. Penggunaan alat penilaian untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai seberapa baik prestasi siswa dalam memperoleh kemampuan tertentu dikenal sebagai penilaian

Tujuan dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah untuk mengumpulkan data tentang bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran dan, pada gilirannya, seberapa baik siswa belajar. Dalam hal kualitas pendidikan secara keseluruhan, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur seberapa baik siswa memahami materi yang mereka pelajari. AKM berfokus terutama pada pengembangan kemampuan literasi dan numerasi siswa (Awanda et al., 2018).

Hasil AKM dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa baik siswa mampu berprestasi. Inilah yang akan digunakan guru untuk mengembangkan pelajaran dengan memanfaatkan taktik pembelajaran baru yang berhasil dan berkualitas tinggi berdasarkan prestasi siswa. Siswa seharusnya lebih mudah menguasai materi pelajaran jika pengajaran disesuaikan dengan tingkat keberhasilan mereka saat ini. Isi, konteks, dan proses kognitif—yang semuanya harus dinilai oleh siswa—semuanya masuk dalam instrumen soal AKM. Guru perlu lebih inventif ketika membuat instrumen penilaian untuk siswa mereka sebagai hasil dari penerapan ujian kompetensi ini (Rokhim, 2021). Secara tidak langsung, pengajar yang mengajar menurut pola tradisional harus diganti dengan mereka yang melakukannya secara kreatif dan baru. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Centre Learning/SCL) digunakan untuk melaksanakan penilaian kompetensi (Nehru, 2019). Dalam SCL, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi siswa. Itu karena forum untuk mengadopsi evaluasi nasional tidak bisa menjadi pendekatan konservatif atau tradisional untuk pendidikan. Akan lebih mudah bagi anak-anak untuk memperoleh literasi jika mereka memiliki bagian yang lebih besar dalam proses pembelajaran (Kholili & Rokhman, 2021; Mualim & Swandari, 2021)

C. Literasi Numerasi

Berhitung adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan menggunakan ide, metode, fakta, dan alat matematika secara bijaksana dan etis (Maula, 2021). Siswa dapat memanfaatkan kecakapan matematika mereka sebagai batu loncatan

untuk sukses dalam mata pelajaran lain. Memang, jika kita ingin mengatasi masalah dunia nyata, maka kita memerlukan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai angka dan simbol matematika. Kita juga memerlukan kemampuan untuk menilai data yang disajikan dalam berbagai cara sehingga kita dapat membuat penilaian yang tepat.

Literasi numerik adalah kapasitas untuk menerapkan pengetahuan, konsep, dan prosedur dasar seseorang ke situasi dunia nyata. Contohnya termasuk kesulitan mengartikan yang disediakan dalam grafik atau tabel, perdagangan, dan banyak lagi. Literasi matematika berbeda dari kompetensi matematika di mana yang terakhir melibatkan penerapan ide-ide dan informasi yang dimiliki seseorang. Kemampuan berhitung tidak dapat dicapai hanya melalui kemampuan matematika. Kesulitan yang membutuhkan berbagai pendekatan, tantangan tanpa solusi yang jelas, dan masalah yang melibatkan aspek non-matematis semuanya membutuhkan literasi numerik (Solechan & Setiawan, 2021).

Pada pertanyaan berikut, siswa akan melakukan kunjungan lapangan di dalam bus berkapasitas 44 orang sebagai gambaran kemampuan literasi berhitung mereka. Berapa bus yang dibutuhkan jika 115 anak mengikuti acara tersebut? Meskipun $115:44$ menghasilkan hasil 2,61, kegiatan ini tidak membutuhkan tiga bus berkapasitas 44 orang, melainkan menggunakan dua bus 44 tempat duduk dan satu kendaraan berkapasitas lebih kecil untuk menghemat uang. Meskipun bakat matematika memerlukan pengetahuan matematika, memperoleh matematika tanpa persiapan sebelumnya mungkin tidak dapat meningkatkan bakat ini.

D. Penyusunan Soal AKM

Menilai kemampuan berpikir siswa melalui penggunaan bahasa (literasi) dan melalui penggunaan data numerik (numerasi) dengan cara yang mirip dengan Program for International Student Assessment (PISA) (Nehru, 2019). Siswa harus mampu memahami dasar-dasar evaluasi ini. Informasi, konteks, dan proses kognitif semuanya termasuk dalam instrumen inkuiri AKM, bukan hanya materi pelajaran dari konten yang diberikan (Novita et al., 2021).

E. Analisis Kebijakan Pelaksanaan AKM

Kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya saat ini sedang melakukan penelitian tentang kebijakan AKM yang akan diterapkan pada tahun 2020. Karena semua orang belajar tentang Penilaian Nasional. Banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mempersiapkan wawancara kerja, termasuk konseling, pelatihan, pertanyaan simulasi, dan pertanyaan konsep. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembuat kebijakan telah menganjurkan tindakan tersebut. Namun, kebijakan tersebut tidak akan berhasil diterapkan jika hal ini terjadi. Untuk membuat ini berhasil, semua orang yang terlibat harus bekerja sama. Efektivitas suatu kebijakan tidak ditentukan oleh bagaimana pembuat kebijakan memandangnya, melainkan oleh bagaimana penerima kebijakan yang dimaksud memandangnya. Jika tes sejenis AKM ini diterapkan, mungkin bisa menjadi sarana pendidikan yang sebanding dengan Ujian Nasional (UN) di Indonesia pada tahun 2004 (Ilmi et al., 2021).

Pada intinya, baik UN maupun AKM memiliki tujuan yang sama: menilai kualitas pendidikan yang diselenggarakan di semua sekolah dan madrasah. Sebaik apapun upaya AKM, tidak akan mampu menyelesaikan krisis pendidikan Indonesia karena

kompleksnya permasalahan. Meskipun anggaran pendidikan Indonesia akan meningkat, namun hal itu akan berdampak kecil terhadap kualitas pendidikan di tanah air (Ilmi et al., 2021). Setelah keputusan dibuat dalam proses pembuatan kebijakan, tahap selanjutnya adalah mencari cara untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Implementasi juga menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan dimulai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah perencanaan keuangan. Dengan kata lain, input tersebut akan ditransformasikan menjadi output kebijakan, yang merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut di atas.

Untuk melaksanakan suatu kebijakan, seorang pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, apa maksud dan tujuan, dan bagaimana mengomunikasikannya. Perlawanan dari audiens yang dituju lebih mungkin terjadi jika maksud dan tujuan kebijakan tidak dikomunikasikan dengan jelas. Meski kebijakan tersebut telah diumumkan, pelaksanaannya akan terhambat oleh kurangnya sumber daya seperti ahli implementasi dan pengetahuan keuangan (Ikramullah & Sirojuddin, 2020). Karakter dan kualitas seseorang, seperti dedikasi, kejujuran, dan kecenderungan demokratisnya, yang membentuk watak mereka. Memiliki disposisi yang menguntungkan akan membantu implementor menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuannya, namun jika implementor memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi menjadi tidak efektif (Ismail et al., 2020). Struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki dampak yang substansial terhadap bagaimana kebijakan itu dijalankan. Ada prosedur operasi standar (SOP) untuk memandu pelaksana dalam kegiatan mereka, dan ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja.

Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerapkan kebijakan baru yang diberi nama kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demi memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, strategi ini diterapkan. Agar penduduk Indonesia dapat mengikuti laju globalisasi dan bersaing dengan negara maju lainnya, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia akan tertinggal dari negara lain jika tidak meningkatkan standar sistem pendidikannya. Untuk menghindari hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan. Kebijakan belajar mandiri merupakan salah satu inisiatif terbaru Indonesia. Soal penerapan AKM bukan soal penguasaan kurikulum, tetapi lebih pada pemetaan dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, itulah sebabnya ujian nasional tidak menggunakan AKM. Literasi dan numerasi adalah penekanan utama dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) (Abidah et al., 2020).

Akibatnya, kebijakan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena sulitnya mengimplementasikannya. Sumber daya manusia dan keuangan, serta penggunaan alat yang tepat, sangat penting untuk efektivitas implementasi kebijakan. Strategi yang efektif untuk implementasi kebijakan dimulai dengan komunikasi yang terbuka dan konsisten tentang tujuan inisiatif, partisipasi luas dari audiens yang dituju, dan komitmen keuangan yang substansial. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dibantu oleh proses dan teknik yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya (Andari et al., 2021).

Berkaitan dengan itu, AKM yang berlangsung pada Oktober tahun 2020 menjadi alat penilaian bagi pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, dan semua pihak terkait lainnya. Penerima manfaat AKM juga harus bisa menilai kelemahan pelaksanaan AKM karena ini merupakan kebijakan dari pembuat kebijakan itu sendiri. Akibatnya, pendidikan di Indonesia kemungkinan besar akan meningkat. Kebijakan yang diterapkan harus dievaluasi sesegera mungkin untuk mencegah kelemahan dalam perlindungan di masa mendatang melalui tinjauan awal.

Daftar Referensi

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of covid-19 to indonesian education and its relation to the philosophy of “merdeka belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49.
- Adiwinata, I. G., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1867.
- Aeni, N. (2021). *MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA*. OSF Preprints.
- Andari, S., Windasari, A. C. S., Setiawan, A. C., & Rifqi, A. (2021). Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic. *JPP J. Pendidik. Dan Pembelajaran*, 28(1), 30–37.
- Andriani, R., & Rasto, R. (2019). Motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 4(1), 80–86.
- Ansari, B. I., & Saleh, M. (2019). Pengaruh collaborative teaching dan pengetahuan awal terhadap kecemasan matematis siswa. *JIPMat*, 4(2).
- Arini, P. D., Matin, M., & Zulaikha, S. (2021). Curriculum management during the covid-19 emergency. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(2).
- Aryanto, S., Rony, Z. T., Jannah, W. N., Erlianda, M., Agustina, P. A., & Aziz, A. (2021). ASISTENSI PENYUSUNAN ANTOLOGI FIKSIMINI BERBASIS ECOPRENUERSHIP PADA CALON GURU SEKOLAH DASAR. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 659–669.
- Awanda, I., Rochmiyati, R., & Sugiyanto, S. (2018). Pengaruh Model Contextual Teaching And Learning Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(6).
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Driessen, G. (2021). Islamic Primary Schools in The Netherlands: The Founding, The Debate, and The Outcomes. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 18–31.
- Elihami, E. (2021). RADECE (Reading, Answer, Discuss, Create and Evaluation): E-Learning Model “Merdeka Belajar” through Higher of Think of Al-Islam and Kemuhammadiyah. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 209–218.
- Fatmawati, E. (2020). DUKUNGAN PERPUSTAKAAN DALAM IMPLEMENTASI “KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR.” *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076–1087.

- Haryono, S. E. (2019). *Kewirausahaan Era Kampus Merdeka*. Jakad Media Publishing.
- Heri, K., & Zaini, Z. (2021). POLITICAL EFFECT IN MERDEKA BELAJAR EDUCATION ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 441–467.
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139.
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., & Hanafie, A. A. (2021). The Basic Concepts of Evaluation and Its Implementation in IRE Lessons in The Pandemic Era. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 175–190.
- Iriantara, Y. (2017). Media Literasi dan Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Review*, 5(1), 12.
- Ismail, S., Ruswandi, U., & Erihadiana, E. (2020). The Competence of Millennial Islamic Education Teachers in Facing The Challenges of Industrial Revolution. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 389–405.
- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1–33.
- Kholili, A., & Rokhman, M. (2021). Pengaruh Manajemen Pembelajaran Online Terhadap Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Review of Islamic Education*, 1(1), 25–34.
- Khosyi'in, M., & Budisusila, E. N. (2021). Model Pendampingan Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 89–96.
- Lestiyani, P. (2020). Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(3), 365–372.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, M., Sahri, S., Ahdiyati, M., & Sari, I. N. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Maula, R. (2021). *Merdeka Belajar Episode 1-10*. Kemedikbudristek.
- Mualim, M., & Swandari, T. (2021). Kurikulum Program Imriti dalam Mengembangkan Kompetensi Lulusan. *Review of Islamic Education*, 1(1), 1–9.
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*, 143.
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. Bintang Visitama Publisher.
- Mustapa, M., Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal, S. (2021). ANALYSIS OF BOS FUND MANAGEMENT BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(2), 121–131.
- Nehru, N. A. (2019). Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional

- Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Novita, N., Kejora, M. T. B., & Akil, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2961–2969.
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55–69.
- Nuryanta, N. (2015). Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *EL TARBAWI*, 8(2), 111–130.
- Perdana, N. S. (2021). Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan. *DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 2(2), 337–348.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Prahani, B. K., Deta, U. A., Yasir, M., Astutik, S., Pandiangan, P., Mahtari, S., & Mubarok, H. (2020). The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 21–37.
- Puspito, H. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NO. 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DISABILITAS. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(3), 217–227.
- Rahma Dinanti, A. (2021). *Analisis Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SD Negeri 20 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- Rokhim, M. A. (2021). Peranan Media Gagdet Dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19(1), 87–110.
- Rosyad, R. (2006). A Quest for True Islam: A Study of Islamic Resurgence Movement Among the Youth in Bandung. *Canberra: ANU E Press*. Accessed April, 9(2010), 407–434.
- Rumanti, L. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Keceme I Sleman)*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Smith, D. W. (2006). *Phenomenology*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Solechan, S., & Setiawan, A. (2021). Implementasi Manajemen Peserta Didik Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Di MTs Raden Rahmat Selorejo Mojowarno. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(2), 191–202.
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Usman, H., & Raharjo, N. E. (2013). Strategi kepemimpinan pembelajaran

- menyongsong implementasi kurikulum 2013. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Waizah, N., & Herwani, H. (2021). Penilaian Pengetahuan Tertulis Dalam Kurikulum 2013. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 207–228.
- Widyastuti, A. (2020). *PERSEPSI GURU TENTANG KONSEP MERDEKA BELAJAR MENDIKBUD NADIEM MAKARIM DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MTS NEGERI 3 SLEMAN*.
- Winata, I. K. (2021). Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 13.

Bab II

Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)

A. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan salah satu program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang di dalamnya terdapat kebijakan universitas yang mengizinkan mahasiswa untuk belajar selama tiga semester di luar program studinya. Kampus merdeka pada dasarnya telah berkembang menjadi ide baru yang memungkinkan mahasiswa memperoleh kemandirian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Leuwol et al., 2020). Gagasan ini dibangun di atas gagasan sebelumnya, Merdeka Belajar. Perancangan ide Kampus Merdeka pada hakikatnya merupakan inovasi pembelajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas (Muhsin, 2021).

Dasar hukum penerapan kurikulum MBKM (*Merdeka Learning Independent Campus*) adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri; Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk mempelajari berbagai mata pelajaran ilmu yang relevan dengan bidang kompetensinya guna mempersiapkan diri menghadapi persaingan global (Baharuddin, 2021). Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memilih mata kuliah berdasarkan preferensi pribadi mereka (Fatmawati, 2020).

Kebijakan Pembelajaran Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi memberikan kebebasan kepada Perguruan Tinggi untuk otonominya. Secara teori, mengubah paradigma pendidikan untuk mengembangkan budaya belajar yang lebih mandiri. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong lebih banyak otonomi dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Paket Kampus Merdeka ini memuat lima kebijakan: a) sistem akreditasi perguruan tinggi; b) belajar di universitas (hak untuk belajar di luar program studi); c) kemudahan pendirian program studi baru; d) penerimaan mahasiswa baru; dan e) perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Klausul ini tidak berlaku untuk pendidikan atau kesehatan (Kemendikbud, 2020).

Berbagai kebijakan di atas berimplikasi pada perguruan tinggi, antara lain pentingnya kebijakan kurikulum yang fleksibel (di kampus, online, dan hybrid); kebijakan administrasi, kebijakan administrasi kurikulum, fleksibilitas antar dan lintas program studi, fakultas, dan universitas di dalam dan luar negeri; kebijakan dan tindak lanjut penganggaran kerjasama; kebijakan kerjasama antar dan lintas program studi, fakultas, dan universitas; dan kebijakan kerjasama antar dan lintas program studi,

fakultas, dan universitas. Hal itu disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung D Senayan pada Jumat, 24 Januari 2020, sebagai kelanjutan dari Konsep Kampus Merdeka yang memungkinkan implementasinya cepat. Mendikbud mengatakan, paket kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan yang pertama dari rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk melonggarkan belenggu institusi dan memfasilitasi mobilitas mereka (Kemendikbud, 2020).

Metode pembelajaran Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa yang paling mendasar. Pembelajaran di Kampus Merdeka menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta bagi pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dalam menghadapi realitas dan dinamika lapangan seperti kemampuan persyaratan, masalah nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaian. Melalui kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang dan dikelola dengan baik, *hardskill* dan *softskill* mahasiswa akan berkembang secara signifikan (Kemendikbud, 2020).

Seperti ditunjukkan di atas, laju perubahan dan dinamika pertumbuhan ilmu pengetahuan (pendidikan) sangat cepat, dinamis, dan inventif. Aturan Mendikbud ini harus diterapkan oleh semua institusi sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan di atas sehingga dapat memberikan perbedaan yang substansial bagi lulusan perguruan tinggi yang siap bersaing di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun global.

Menurut Woodruff, konsep adalah "ide yang bermakna dan lengkap, yang merupakan salah satu cara untuk memahami suatu persoalan". Konsep adalah beragam produk subjektif yang berasal dari cara individu memperoleh pengetahuan tentang hal-hal atau objek melalui pengalaman pribadi (setelah membuat persepsi objek atau objek) (Smith, 2006). Sementara itu, Aristoteles mendefinisikan pengertian konsep sebagai 'pengaturan mendasar dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam kognisi manusia'. Menurut Siswono, konsep adalah 'kumpulan gagasan dan definisi yang saling berhubungan yang merepresentasikan perspektif sistematis tentang fenomena melalui penjelasan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena'. Dari uraian di atas, jelas bahwa diperlukan suatu konsep untuk mengungkapkan gagasan atau konsep agar gagasan atau konsep tersebut dapat diimplementasikan menuju perubahan peradaban atau pendidikan yang lebih mendasar, yaitu kemampuan pendidikan untuk menghasilkan perubahan inovatif yang sistematis, terarah, dan terukur (Nuryanta, 2015).

Pendidikan selalu berusaha untuk mengembangkan anak didik yang senantiasa memperbaharui pengetahuannya. Mereka tidak hanya mampu mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan baik dalam skala lokal maupun besar. Modifikasi dan inovasi berikutnya mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pembangunan negara yang dikaruniai sumber daya manusia berkualitas tinggi. Itulah sebabnya universitas dituntut untuk berinovasi di semua proses pembelajaran mereka, terutama pembelajaran yang berpusat pada siswa,

untuk berkontribusi pada produksi lulusan berkualitas tinggi yang siap menghadapi perubahan keadaan (Andriani & Rasto, 2019).

Gagasan kurikulum sebagai proses diperluas oleh kebutuhan akan komitmen bersama untuk disepakati (di antara pelaku pendidikan) dan tindakan yang diperlukan (sebagai bagian dari proses pembelajaran) untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ide kurikulum MBKM kini sedang disempurnakan melalui proses di mana persiapan disajikan kepada universitas dengan kekuatan otonom dan implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan lembaga yang terlibat.

Ide kurikulum pada dasarnya masih diterapkan di masing-masing universitas, disesuaikan dengan konteks dan kondisi kebutuhan, baik melalui program MOU dengan universitas dalam dan luar negeri, bisnis, dan organisasi sosial lainnya. Sebagai acuan gagasan kurikulum MBKM terdapat dalam buku pedoman yaitu jenis kegiatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Prodi sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1.

Landasan untuk mengadopsi MBKM adalah Permendikbud 3 Tahun 2020, yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum menjadi unsur penting yang dimaknai kumpulan rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan ajar, serta metodologi yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan Perguruan Tinggi. Menurut Permendikbud Pasal 11 (1), ciri proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Kolaborasi diperlukan saat menerapkan kurikulum MBKM untuk memastikan keberhasilannya. Kolaborasi antar institusi sangat penting dalam melaksanakan kurikulum MBKM dan mendidik lulusan agar selaras dengan bisnis, industri, dan masyarakat (Kemendikbud, 2020).

B. Analisis Kebijakan MBKM

Karena dinamika dan perubahan dunia pendidikan dewasa ini begitu dinamis, terutama kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, model pembelajaran harus mampu menjawab kesulitan-kesulitan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran peran pengajar atau dosen, bukan hanya sebagai pusat pembelajaran. Landasannya dalam sosiologi pendidikan adalah kumpulan asumsi yang berfungsi sebagai titik awal untuk praktik dan/atau penelitian pendidikan yang diinformasikan secara sosiologis. Sosiologi pendidikan mencakup topik-topik berikut: interaksi guru-siswa, dinamika kelas atau kelompok sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem masyarakat dan dampaknya terhadap pendidikan; bagaimana menerapkan landasan sosiologis pendidikan di Indonesia; dan landasan sosiologis implikasi pendidikan bagi pendidikan Indonesia (Heri & Zaini, 2021).

Landasan sejarah pendidikan adalah sejarah pendidikan pada masa lalu, yang menjadi pedoman bagi perkembangan pendidikan masa kini. Landasan sejarah pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pidatonya pada 9 September 2020 ini adalah kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk mempelajari berbagai ilmu yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan mahasiswa pilihan untuk memilih program studi mereka.

Konteks sejarah menjadi penting karena dapat memberikan arah pemikiran di masa sekarang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan alam, yang dibantu oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan berorientasi pada kehidupan dunia dan diinformasikan oleh keadaan dunia, berbeda dengan pendidikan sebelumnya, yang terutama berorientasi pada dunia gagasan surga, dan akhirat. Perlu keseimbangan diantara keduanya karena bagaimana pun diperlukan proses realisme atau pola pikir pragmatis (Pidarta, 2007). Pengetahuan yang benar, menurut aliran ini, diperoleh tidak hanya dengan penginderaan tetapi juga melalui persepsi (Pidarta, 2007).

Perguruan tinggi seharusnya menciptakan dan membantu pelaksanaan program Merdeka Belajar melalui penetapan norma-norma akademik. Pelaksanaan program harus direncanakan dan disepakati bersama oleh lembaga dan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berbentuk program nasional yang dikembangkan Kementerian atau program yang dikembangkan oleh institusi yang diakui dalam Database Pendidikan Tinggi.

Program MBKM memberikan independensi dan otonomi bagi institusi pendidikan dari birokrasi, dosen bebas dari birokrasi yang berbelit-belit, dan mahasiswa dengan keleluasaan untuk mengejar kepentingannya. Kampus Merdeka adalah model pembelajaran mandiri dan fleksibel di institusi yang dirancang untuk menumbuhkan budaya belajar yang inovatif, tanpa hambatan, dan berpusat pada siswa (Rosyad, 2006).

Perguruan Tinggi wajib berkomitmen untuk mewujudkan dan memampukan Program MBKM sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 dan sebagaimana tertuang dalam Buku Panduan Belajar Gratis Kemendikbud RI. Dengan demikian, Program MBKM terdiri dari sembilan komponen: (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktek Kerja Profesi, (3) Bantuan Pengajaran di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/ Penelitian, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Mandiri, (8) Pembangunan/Proyek Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.

Langkah-langkah yang harus disiapkan lembaga untuk pelaksanaan Pembelajaran Kampus Merdeka memiliki beberapa kriteria umum, seperti mahasiswa berasal dari program studi yang diakui dan saat ini terdaftar di PD Dikti. Kebutuhan khusus dipenuhi melalui implementasi program yang dibuat dan disepakati bersama oleh lembaga dan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berbentuk program nasional yang dikembangkan Kementerian atau program yang dikembangkan oleh universitas yang diakui dalam Database Pendidikan Tinggi.

Implementasi kurikulum MBKM sangat penting karena memerlukan kerjasama dengan mitra untuk mencapai tujuan pembelajaran di pendidikan tinggi. Perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi lain untuk mengembangkan kurikulum yang dapat diterima di dunia kerja. Berbagai program telah disepakati antara lain pertukaran

pelajar, magang, pengalaman kerja, bantuan mengajar di satuan pendidikan, penelitian, inisiatif kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek mandiri, dan pembangunan desa/KKN.

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengumpulkan kebijakan dan pedoman mutu, menentukan mutu, memantau dan mengevaluasi konsep penilaian, elemen penilaian, dan teknik penilaian. Kurikulum MBKM dimaksudkan untuk membekali mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi agar menjadi pembelajar otentik yang terampil, mudah beradaptasi, dan ulet (*agile learner*). Kebijakan MBKM merupakan kerangka kerja untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi akademisi yang baik, relevan dengan tuntutan kontemporer, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang kuat. Kebijakan MBKM, serta program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft* maupun *hard skill*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan masa kini, dan mempersiapkan lulusannya sebagai calon pemimpin bangsa yang unggul dan berkepribadian tangguh (Kemendikbud, 2020). Program *experiential learning* dengan jalur *adaptable* dirancang untuk memungkinkan siswa memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan minat dan kemampuannya (Abidah et al., 2020).

Dengan demikian, kurikulum merupakan komponen penting dari proses pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kurikulum MBKM mencerminkan strategi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendorong siswa-mahasiswa untuk memahami ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program studi mereka. Implementasi kurikulum MBKM dalam merespon isu perkembangan teknologi, dengan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome-Based Education*) yang memfokuskan lulusan pada tujuan pembelajaran yang terkait dengan disiplin ilmu. Gaya penulisannya kualitatif, dengan pengamatan mendalam terhadap keprihatinan MBKM dan analisis kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Daftar Referensi

- Abidah, A., Hidaayatullah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of covid-19 to indonesian education and its relation to the philosophy of “merdeka belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49.
- Adiwinata, I. G., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1867.
- Aeni, N. (2021). *MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA*. OSF Preprints.
- Andari, S., Windasari, A. C. S., Setiawan, A. C., & Rifqi, A. (2021). Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic. *JPP J. Pendidik. Dan Pembelajaran*, 28(1), 30–37.
- Andriani, R., & Rasto, R. (2019). Motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 4(1), 80–86.

- Ansari, B. I., & Saleh, M. (2019). Pengaruh collaborative teaching dan pengetahuan awal terhadap kecemasan matematis siswa. *JIPMat*, 4(2).
- Arini, P. D., Matin, M., & Zulaikha, S. (2021). Curriculum management during the covid-19 emergency. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(2).
- Aryanto, S., Rony, Z. T., Jannah, W. N., Erlianda, M., Agustina, P. A., & Aziz, A. (2021). ASISTENSI PENYUSUNAN ANTOLOGI FIKSIMINI BERBASIS ECOPRENUERSHIP PADA CALON GURU SEKOLAH DASAR. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 659–669.
- Awanda, I., Rochmiyati, R., & Sugiyanto, S. (2018). Pengaruh Model Contextual Teaching And Learning Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(6).
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Driessen, G. (2021). Islamic Primary Schools in The Netherlands: The Founding, The Debate, and The Outcomes. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 18–31.
- Elihami, E. (2021). RADECE (Reading, Answer, Discuss, Create and Evaluation): E-Learning Model “Merdeka Belajar” through Higher of Think of Al-Islam and Kemuhammadiyah. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 209–218.
- Fatmawati, E. (2020). DUKUNGAN PERPUSTAKAAN DALAM IMPLEMENTASI “KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR.” *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076–1087.
- Haryono, S. E. (2019). *Kewirausahaan Era Kampus Merdeka*. Jakad Media Publishing.
- Heri, K., & Zaini, Z. (2021). POLITICAL EFFECT IN MERDEKA BELAJAR EDUCATION ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 441–467.
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139.
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., & Hanafie, A. A. (2021). The Basic Concepts of Evaluation and Its Implementation in IRE Lessons in The Pandemic Era. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 175–190.
- Iriantara, Y. (2017). Media Literasi dan Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Review*, 5(1), 12.
- Ismail, S., Ruswandi, U., & Erihadiana, E. (2020). The Competence of Millennial Islamic Education Teachers in Facing The Challenges of Industrial Revolution. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 389–405.
- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1–33.
- Kholili, A., & Rokhman, M. (2021). Pengaruh Manajemen Pembelajaran Online Terhadap Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Review of Islamic Education*, 1(1), 25–34.

- Khosyi'in, M., & Budisusila, E. N. (2021). Model Pendampingan Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 89–96.
- Lestiyani, P. (2020). Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(3), 365–372.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, M., Sahri, S., Ahdiyati, M., & Sari, I. N. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Maula, R. (2021). *Merdeka Belajar Episode 1-10*. Kemedikbudristek.
- Mualim, M., & Swandari, T. (2021). Kurikulum Program Imrithi dalam Mengembangkan Kompetensi Lulusan. *Review of Islamic Education*, 1(1), 1–9.
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*, 143.
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. Bintang Visitama Publisher.
- Mustapa, M., Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal, S. (2021). ANALYSIS OF BOS FUND MANAGEMENT BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(2), 121–131.
- Nehru, N. A. (2019). Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Novita, N., Kejora, M. T. B., & Akil, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2961–2969.
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55–69.
- Nuryanta, N. (2015). Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *EL TARBAWI*, 8(2), 111–130.
- Perdana, N. S. (2021). Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan. *DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 2(2), 337–348.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Prahani, B. K., Deta, U. A., Yasir, M., Astutik, S., Pandiangan, P., Mahtari, S., & Mubarak, H. (2020). The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 21–37.
- Puspito, H. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL

NO. 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DISABILITAS. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(3), 217–227.

- Rahma Dinanti, A. (2021). *Analisis Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SD Negeri 20 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- Rokhim, M. A. (2021). Peranan Media Gadget Dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19(1), 87–110.
- Rosyad, R. (2006). A Quest for True Islam: A Study of Islamic Resurgence Movement Among the Youth in Bandung. *Canberra: ANU E Press*. Accessed April, 9(2010), 407–434.
- Rumanti, L. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Keceme I Sleman)*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Smith, D. W. (2006). *Phenomenology*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Solechan, S., & Setiawan, A. (2021). Implementasi Manajemen Peserta Didik Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Di MTs Raden Rahmat Selorejo Mojowarno. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(2), 191–202.
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Usman, H., & Raharjo, N. E. (2013). Strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Waizah, N., & Herwani, H. (2021). Penilaian Pengetahuan Tertulis Dalam Kurikulum 2013. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 207–228.
- Widyastuti, A. (2020). *PERSEPSI GURU TENTANG KONSEP MERDEKA BELAJAR MENDIKBUD NADIEM MAKARIM DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MTS NEGERI 3 SLEMAN*.
- Winata, I. K. (2021). Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 13.

Bab III

Perubahan Mekanisme Dana Pemerintah dan Dana BOS

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Negara maju adalah negara yang menghargai pendidikan, dan kemajuan suatu bangsa juga tercermin dari pencapaian pendidikan penduduknya. Tingkat kesesuaian tujuan pendidikan dan metode pelaksanaan suatu negara dapat ditentukan oleh tingkat kesesuaian tujuan dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan adalah “membangun kapasitas dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu aspek terpenting dalam pemenuhan tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran serta negara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan (Kemendikbud, 2020).

Dana BOS merupakan program bantuan pendidikan yang didanai oleh pemerintah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didirikan pada tahun 2005 untuk mengemban misi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 34 ayat 2 dan 3, yang mengatur tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar. Alokasi dana BOS merupakan salah satu cara negara menjamin terselenggaranya wajib belajar (Mustapa et al., 2021). Uang BOS dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk administrasi sekolah, penyediaan bahan ajar, pembayaran honor guru honorer, pengembangan perpustakaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan demikian, Dana BOS memainkan peran penting dalam sistem pendidikan nasional (Nehru, 2019).

Besaran dana BOS yang dialokasikan untuk setiap sekolah ditentukan oleh jumlah siswa. Akibatnya, semakin banyak murid sekolah, semakin banyak uang BOS yang didapat. Pengurangan uang tersedia untuk sekolah-sekolah dengan murid yang lebih sedikit. Selain itu, lokasi sekolah jauh dari kecamatan dan kota kabupaten, yang membutuhkan investasi keuangan yang signifikan untuk terlibat dalam kegiatan kecamatan dan kabupaten. Belum lagi kelangkaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang memaksa sekolah harus pandai mengelola anggaran yang terbatas agar efisien dan berhasil (Rahma Dinanti, 2021).

Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas. Sebelum adanya sistem informasi manajemen, proses pengambilan keputusan cukup mudah. Semuanya masih dilakukan secara manual dan sangat cepat, karena fakta bahwa semua data masih disimpan di beberapa lembar arsip. Selain itu, lembaga pendidikan harus menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk merampingkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan (Rumanti, 2020).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

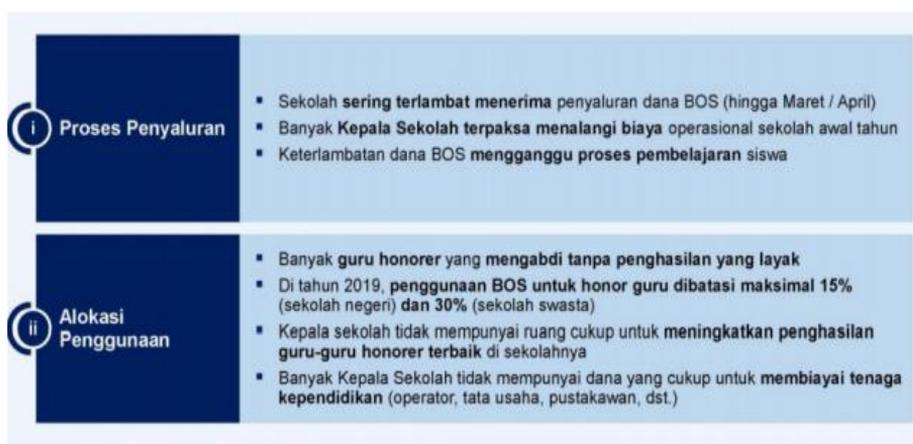
Operasional Reguler menyisipkan satu (satu) ketentuan yaitu Pasal 9A di antara Pasal 9 sampai dengan Pasal 10. Pasal ini mengatur tentang persyaratan perubahan penggunaan dana BOS Reguler mulai April 2020 dan berlanjut hingga Pemerintah Pusat mencabut penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Perdana, 2021).

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah mengubah kebijakan alokasi dan penggunaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Episode ketiga dari kebijakan Merdeka Belajar meliberalisasi penggunaan dana BOS. Ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang muncul pada proses distribusi dan penggunaan dana BOS sebelumnya (Kemendikbud, 2020).



Sumber: Kemendikbudristek 2020

Pada 2019, BOS dapat membelanjakan tidak lebih dari 15% dari anggarannya untuk gaji guru honorer di sekolah negeri dan 30% di lembaga swasta. Pembelian buku teks dan non buku teks dapat dilakukan dengan menggunakan uang BOS maksimal 20% dari total dana BOS. Selain itu, pemindahan dana BOS dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Tentu, ini akan menciptakan beberapa masalah bagi sekolah untuk ditangani (Kemendikbud, 2020)..



Sumber: Kemendikbudristek 2020

Pendanaan BOS memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Setiap sekolah pasti memiliki pengeluaran operasional yang unik, salah satunya adalah pembayaran gaji guru honorer (Kemendikbud, 2020). Saat ini, ada beberapa guru honorer yang telah bekerja sangat keras namun tidak dapat memperoleh upah layak karena sumber daya yang sangat sedikit. Karena terbatasnya penggunaan uang BOS, lingkungan menjadi tidak kondusif, karena sekolah kekurangan keuangan yang memadai. Bahkan ada beberapa sekolah yang pengajar atau pengurusnya diharuskan mengeluarkan uang pribadi terlebih dahulu untuk membayar biaya operasional karena terkendala dengan undang-undang yang mengatur penggunaan dana BOS. Selain itu, sekolah kesulitan menarik SDM-nya. Akibatnya, banyak tenaga kependidikan dan guru dipanggil untuk melakukan berbagai jenis pelaporan dan tugas administratif lainnya yang harus ditangani oleh departemen operasional (Maula, 2021).

Memang, dalam situasi apapun, proses suatu bangsa mencapai standar pendidikan yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan negara dalam menyediakan fasilitas, baik fisik maupun nonfisik. Suasana dan fasilitas pendidikan yang kondusif merupakan komponen penting dari proses pendidikan yang berkualitas tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meningkatkan atau menyempurnakan pendanaan BOS melalui persetujuan beberapa peraturan baru yang bertujuan untuk menyederhanakan penggunaan dana BOS dan pelaporan verifikasi data. Alokasi uang BOS akan disederhanakan dan lebih fleksibel agar sekolah dapat tumbuh secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penerimaan. Peraturan baru ini diharapkan dapat mempermudah penerimaan dan penggunaan dana BOS, yang akan mengurangi beberapa beban administrasi di sekolah (Widyastuti, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana BOS Reguler dimaksudkan untuk membantu sekolah dalam biaya operasional dan untuk meningkatkan akses dan kualitas siswa terhadap sekolah. pendidikan. Selain itu, kebijakan baru tersebut mencakup empat aspek terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Haryono, 2019).

1. Dana BOS Disalurkan secara Langsung melalui Rekening Sekolah

Sejak tahun 2020, pendanaan BOS akan disalurkan melalui sistem yang lebih sederhana dengan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang diperlukan untuk tata kelola yang efektif. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut adalah modifikasi sistem distribusi uang BOS.

Kategori	Situasi BOS 2019	Kebijakan BOS 2020	Manfaat
Alur dana	Penyaluran dana ke sekolah dari Kemenkeu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi	Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat proses penerimaan dana BOS • Mengurangi beban administrasi sekolah
Frekuensi Penyaluran	Tahapan penyaluran sebanyak 4x per tahun	Tahapan penyaluran sebanyak 3x per tahun	
Proses verifikasi data	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi Batas akhir pengambilan data 2x per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD-P	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P	

Sumber: Paparan Peluncuran Merdeka Belajar Episode 3, Kemendikbudristek, 2020

Terkait alokasi dana BOS, jika Kemenkeu mencairkan uang BOS ke sekolah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi pada 2019, Kemenkeu akan mengirimkan dana BOS langsung ke sekolah mulai 2020, melewati RKUD Provinsi. Sedangkan dari sisi frekuensi penyaluran, setiap tahun ada empat pencairan pada tahun 2019 yaitu 20% untuk tahap I, 40% untuk tahap II, 20% untuk tahap III, dan 20% untuk tahap IV. Kini, penyaluran dilakukan tiga kali dalam setahun, dengan 30% bagian Tahap I, 40% Tahap II, dan 30% Tahap III (Tohir, 2020).

Selain itu, pada tahun 2019, prosedur verifikasi data untuk pemilihan SK sekolah yang berhak menerima uang BOS oleh pemerintah provinsi cukup ekstensif, sehingga membutuhkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan administratif. Batas waktu pengumpulan data adalah setahun sekali, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019. Pemberlakuan pembatasan waktu dimaksudkan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Metode baru ini tentunya dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi sekolah, mulai dari mempercepat penerimaan dana BOS hingga meringankan kesulitan administrasi di sekolah (Kemendikbud, 2020).

2. Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel untuk Sekolah

Melalui kemitraan dengan Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, penggunaan BOS kini lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Peraturan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan pengajar dan pendidik honorer. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut adalah perbedaan proses pengalokasian dana BOS (Kemendikbud, 2020).

Kategori	 Situasi BOS 2019	 Kebijakan BOS 2020	 Manfaat
Pem-bayaran honor	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS • Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru) • Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer
Alokasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% • Pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia 	

Sumber: Kemendikbudristek 2020

Pada tahun 2019, diberlakukan batasan penggunaan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer yang jumlahnya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sejak tahun 2020, dana BOS hingga 50% dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer jika pengajar sudah memiliki Nomor Satuan Pendidikan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019, namun belum memiliki tenaga pendidik. sertifikat. Selain itu, jika dana tetap ada, dana tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi tenaga kependidikan. Alokasi lain telah dihapus, termasuk pembatasan distribusi buku dan peralatan multimedia. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan fleksibilitas dan otonomi sekolah dalam mengalokasikan dana BOS (Kemendikbud, 2020).

3. Nilai Satuan BOS yang Meningkat

Peningkatan dana BOS merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat biaya operasional yang berbeda-beda di setiap unit sekolah. Tabel berikut membandingkan nilai unit BOS pada tahun 2019 dan 2020.

 Situasi BOS 2019	 Kebijakan BOS 2020
Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun: <ul style="list-style-type: none"> • SD Rp. 800.000 • SMP Rp. 1.000.000 • SMA Rp. 1.400.000 	Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun: <ul style="list-style-type: none"> • SD Rp. 900.000  Rp. 100.000 (13%) • SMP Rp. 1.100.000  Rp. 100.000 (10%) • SMA Rp. 1.500.000  Rp. 100.000 (7%)

Sumber: Kemendikbudristek 2020

Mulai tahun 2020, jumlah dana BOS yang dialokasikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) akan naik 13% dari tahun sebelumnya menjadi Rp900.000. Ini akan tumbuh 10% menjadi Rp 1.100.000 di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, akan tumbuh 7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.500.000 di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kemendikbud, 2020).

4. Makin Transparan dan Akuntabel

Peningkatan keuangan BOS untuk meningkatkan otonomi dan fleksibilitas tidak meniadakan perlunya akuntabilitas dan keterbukaan. Keduanya semakin diperkuat oleh strategi baru ini.

Kategori	⚠ Situasi BOS 2019	📈 Kebijakan BOS 2020	✅ Manfaat
Prosedur penyampaian laporan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada Tim BOS kabupaten/kota dan atau Tim BOS provinsi Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah

Sumber: Kemendikbudristek 2020

Menurut pengalaman administrasi dari tahun sebelumnya, hanya sekitar 53% sekolah yang menerima dana BOS yang melaporkan menggunakannya. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi, mengingat peran penting keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan. Dengan demikian, kebijakan BOS 2020 mengatur sistem pelaporan online penggunaan uang BOS oleh sekolah melalui website resmi BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2020).

Pelaporan secara online diperlukan untuk pencairan dana BOS tahap III. Jika sekolah tidak mengungkapkan penggunaan uang secara elektronik, dana BOS tahap III tidak akan disalurkan (Elihami, 2021). Selain itu, sekolah harus memposting informasi tentang penerimaan dan penggunaan uang di papan informasi sekolah atau di lokasi yang dapat diakses dengan jelas oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab penggunaan uang BOS, mendidik masyarakat luas tentang pertumbuhan dan kondisi sekolah dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran, dan berfungsi sebagai katalis untuk perbaikan kebijakan di bidang pembiayaan sekolah (Muslimat, 2021).

Mekanisme dana BOS nantinya akan dapat beroperasi melalui platform digital. Penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan perolehan dan penggunaan uang BOS. Selain itu, melalui inisiatif Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengikutsertakan masyarakat dalam rencana pembiayaan BOS ke depan. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil yang dihasilkan

melalui pembiayaan dana desa serta pembelajaran siswa. Dengan demikian, mahasiswa akan secara langsung berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, sehingga memperkuat jiwa kepemimpinannya (Aeni, 2021).

Sekolah mendapat pendanaan penuh dan dikendalikan secara bebas oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah di bawah sistem BOS 2020. Oleh karena itu, program BOS sangat menganjurkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah dengan memberikan kewenangan dan otonomi, meningkatkan keleluasaan dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan Indonesia (Prahani et al., 2020).

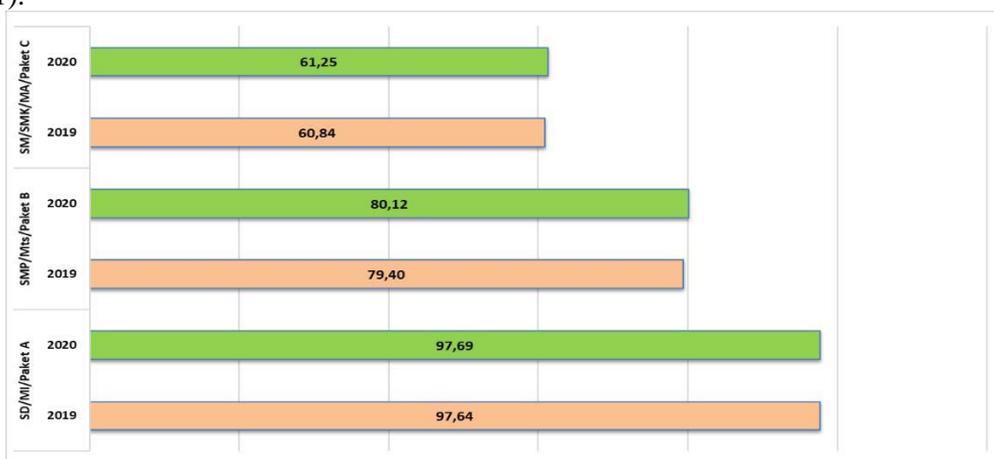
A. Dampak Kebijakan Relaksasi Dana BOS Terhadap Aksesibilitas Pendidikan

Untuk memperlancar pelaksanaan belajar dari rumah akibat semakin meluasnya dampak Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran di satuan pendidikan, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Menurut Pasal 9A (1), sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dalam hal: a. pembiayaan langganan listrik dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan online berbayar bagi pendidik dan/atau siswa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari komputer. (2) Ketentuan Pasal 9 ayat (3) tentang pembayaran honorarium paling banyak 50% (lima puluh persen) tidak berlaku selama Pemerintah Pusat menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Rahma Dinanti, 2021).

Di masa wabah covid 19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pengendalian penggunaan dana BOS. Hal ini dipuji oleh kepala sekolah di seluruh Indonesia sebagai sarana pelaksanaan program yang didanai oleh uang BOS Reguler pada tahun 2020. Hal ini karena sebagian besar uang BOS dihabiskan untuk komponen administrasi kegiatan sekolah, yang mungkin termasuk pembelian cairan pembersih tangan atau sabun, desinfektan, masker, atau alat bantu kebersihan lainnya. Selain itu, sebagian besar uang BOS digunakan untuk membayar honorarium di tingkat SMP. Besarnya dana yang digunakan untuk komponen ini mencerminkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) mewajibkan pembayaran honorarium tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak berlaku selama periode penetapan status Darurat dalam Program Kesehatan Masyarakat Covid-19 Pemerintah Pusat (Mustapa et al., 2021).

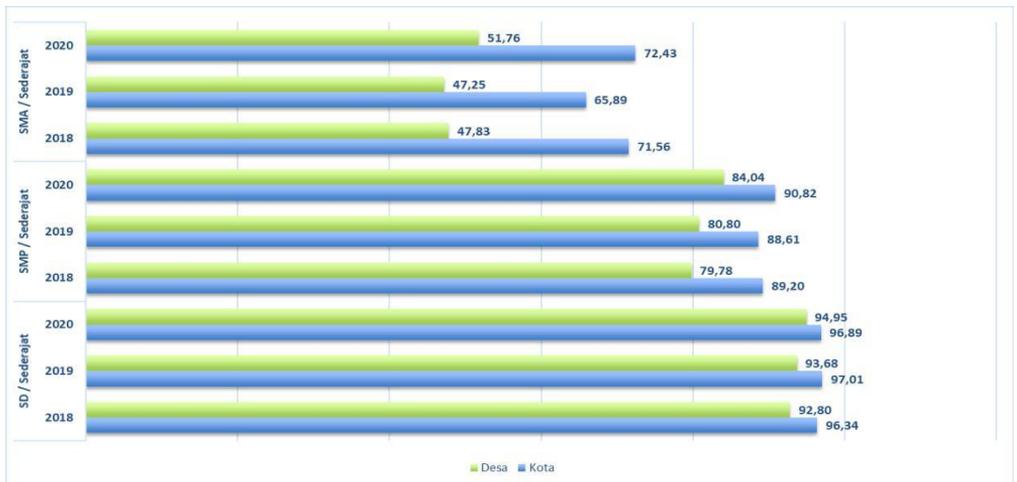
Sebagian besar dana BOS kemudian digunakan untuk mendukung komponen pemeliharaan sarana dan prasarana di tingkat SMA. Terakhir, di tingkat SMK, sebagian besar dana BOS Reguler 2020 dialokasikan untuk inisiatif peningkatan kompetensi keterampilan. Pendanaan yang cukup besar untuk komponen ini diperlukan karena tujuan SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja, artinya perlu dilakukan upaya

peningkatan kemampuan kompetensi siswa agar menjadi lulusan berkualitas yang dapat cepat berintegrasi ke dunia kerja. Hal ini juga sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Permendikbud tersebut menjelaskan bahwa kriteria kompetensi lulusan SMK/MAK dibuat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan. SMK/MAK merupakan komponen sistem pendidikan nasional yang menitikberatkan pada pendidikan kejuruan dengan tujuan menghasilkan individu-individu yang kompeten yang mampu memenuhi tuntutan dunia usaha/industri dan mengembangkan kapasitasnya untuk merangkul dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Rahma Dinanti, 2021).



Grafik Tingkat Partisipasi Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2019– 2020, Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan grafik di atas, ketersediaan dana BOS telah membantu peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang sekolah. Berdasarkan grafik 2, tingkat partisipasi SD/ sederajat adalah 97,64 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 97,69 pada tahun 2020 (naik 0,05 persen), tingkat partisipasi SMP/ sederajat meningkat dari 79,40 pada tahun 2019 menjadi 80,12 pada tahun 2020 (peningkatan 0,72 persen), dan tingkat partisipasi SMA/ sederajat meningkat dari 60,84 menjadi 61,25 pada tahun 2020 (naik 0,41 persen). Peningkatan keterlibatan pendidikan ini sejalan dengan tujuan pendanaan BOS, yaitu untuk mendorong akses atau partisipasi anak dalam pendidikan (Lestiyani, 2020).



Grafik Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, Tahun 2018 –2020 (BPS, 2021)

Selain itu, kebijakan pembiayaan BOS membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Berdasarkan grafik di atas, tingkat penyelesaian pendidikan sekolah dasar desa tumbuh dari 92,80 pada tahun 2018 menjadi 94,95 pada tahun 2020. Demikian pula tingkat sekolah menengah pertama di wilayah desa meningkat secara signifikan, naik dari 79,78 pada tahun 2018 menjadi 84,04 pada tahun 2020. Kemudian, pada tingkat SMA/ sederajat di masyarakat, penyelesaian sekolah meningkat 3,93 poin dalam waktu dua tahun. Daerah perkotaan juga mengalami peningkatan dalam hal penyelesaian pendidikan, meskipun tidak sebanyak daerah pedesaan. Tingkat SD di kota tumbuh hanya 0,55 poin dalam dua tahun, tingkat SMP/ sederajat meningkat 1,62 poin dalam dua tahun, dan terakhir, tingkat SMA/ sederajat naik 1,62 poin dalam dua tahun (Perdana, 2021).

Daftar Referensi

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of covid-19 to indonesian education and its relation to the philosophy of “merdeka belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49.
- Adiwinata, I. G., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1867.
- Aeni, N. (2021). *MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA*. OSF Preprints.
- Andari, S., Windasari, A. C. S., Setiawan, A. C., & Rifqi, A. (2021). Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic. *JPP J. Pendidik. Dan Pembelajaran*, 28(1), 30–37.
- Andriani, R., & Rasto, R. (2019). Motivasi belajar sebagai determinan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 4(1), 80–86.
- Ansari, B. I., & Saleh, M. (2019). Pengaruh collaborative teaching dan pengetahuan awal terhadap kecemasan matematis siswa. *JIPMat*, 4(2).

- Arini, P. D., Matin, M., & Zulaikha, S. (2021). Curriculum management during the covid-19 emergency. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(2).
- Aryanto, S., Rony, Z. T., Jannah, W. N., Erlianda, M., Agustina, P. A., & Aziz, A. (2021). ASISTENSI PENYUSUNAN ANTOLOGI FIKSIMINI BERBASIS ECOPRENUERSHIP PADA CALON GURU SEKOLAH DASAR. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 659–669.
- Awanda, I., Rochmiyati, R., & Sugiyanto, S. (2018). Pengaruh Model Contextual Teaching And Learning Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(6).
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Driessen, G. (2021). Islamic Primary Schools in The Netherlands: The Founding, The Debate, and The Outcomes. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 18–31.
- Elihami, E. (2021). RADECE (Reading, Answer, Discuss, Create and Evaluation): E-Learning Model “Merdeka Belajar” through Higher of Think of Al-Islam and Kemuhammadiyah. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 209–218.
- Fatmawati, E. (2020). DUKUNGAN PERPUSTAKAAN DALAM IMPLEMENTASI “KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR.” *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(2), 1076–1087.
- Haryono, S. E. (2019). *Kewirausahaan Era Kampus Merdeka*. Jakad Media Publishing.
- Heri, K., & Zaini, Z. (2021). POLITICAL EFFECT IN MERDEKA BELAJAR EDUCATION ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 441–467.
- Ikramullah, I., & Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139.
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., & Hanafie, A. A. (2021). The Basic Concepts of Evaluation and Its Implementation in IRE Lessons in The Pandemic Era. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 175–190.
- Iriantara, Y. (2017). Media Literasi dan Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Review*, 5(1), 12.
- Ismail, S., Ruswandi, U., & Erihadiana, E. (2020). The Competence of Millennial Islamic Education Teachers in Facing The Challenges of Industrial Revolution. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 389–405.
- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1–33.
- Kholili, A., & Rokhman, M. (2021). Pengaruh Manajemen Pembelajaran Online Terhadap Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Review of Islamic Education*, 1(1), 25–34.
- Khosyi'in, M., & Budisusila, E. N. (2021). Model Pendampingan Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Teknologi Dalam Pemberdayaan*

- Masyarakat*, 2(2), 89–96.
- Lestiyani, P. (2020). Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(3), 365–372.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y., Masrul, M., Sahri, S., Ahdiyat, M., & Sari, I. N. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Maula, R. (2021). *Merdeka Belajar Episode 1-10*. Kemedikbudristek.
- Mualim, M., & Swandari, T. (2021). Kurikulum Program Imrithi dalam Mengembangkan Kompetensi Lulusan. *Review of Islamic Education*, 1(1), 1–9.
- Muhsin, H. (2021). Kampus Merdeka Di Era New Normal. *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*, 143.
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. Bintang Visitama Publisher.
- Mustapa, M., Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal, S. (2021). ANALYSIS OF BOS FUND MANAGEMENT BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(2), 121–131.
- Nehru, N. A. (2019). Asesmen Komptenesi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Novita, N., Kejora, M. T. B., & Akil, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2961–2969.
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55–69.
- Nuryanta, N. (2015). Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *EL TARBAWI*, 8(2), 111–130.
- Perdana, N. S. (2021). Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan. *DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 2(2), 337–348.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.
- Prahani, B. K., Deta, U. A., Yasir, M., Astutik, S., Pandiangan, P., Mahtari, S., & Mubarok, H. (2020). The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 21–37.
- Puspito, H. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NO. 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DISABILITAS.

- Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(3), 217–227.
- Rahma Dinanti, A. (2021). *Analisis Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer di SD Negeri 20 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- Rokhim, M. A. (2021). Peranan Media Gagdet Dalam Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pai Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19(1), 87–110.
- Rosyad, R. (2006). A Quest for True Islam: A Study of Islamic Resurgence Movement Among the Youth in Bandung. *Canberra: ANU E Press. Accessed April*, 9(2010), 407–434.
- Rumanti, L. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Keceme I Sleman)*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Smith, D. W. (2006). *Phenomenology*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Solechan, S., & Setiawan, A. (2021). Implementasi Manajemen Peserta Didik Dalam Peningkatan Mutu Madrasah Di MTs Raden Rahmat Selorejo Mojowarno. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(2), 191–202.
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Usman, H., & Raharjo, N. E. (2013). Strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Waizah, N., & Herwani, H. (2021). Penilaian Pengetahuan Tertulis Dalam Kurikulum 2013. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 207–228.
- Widyastuti, A. (2020). *PERSEPSI GURU TENTANG KONSEP MERDEKA BELAJAR MENDIKBUD NADIEM MAKARIM DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MTS NEGERI 3 SLEMAN*.
- Winata, I. K. (2021). Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 13.

Bab IV

Program Organisasi Penggerak (POP), Program Guru Penggerak (PGP) dan Program Sekolah Penggerak (PSP)

A. Program Organisasi Penggerak (POP)

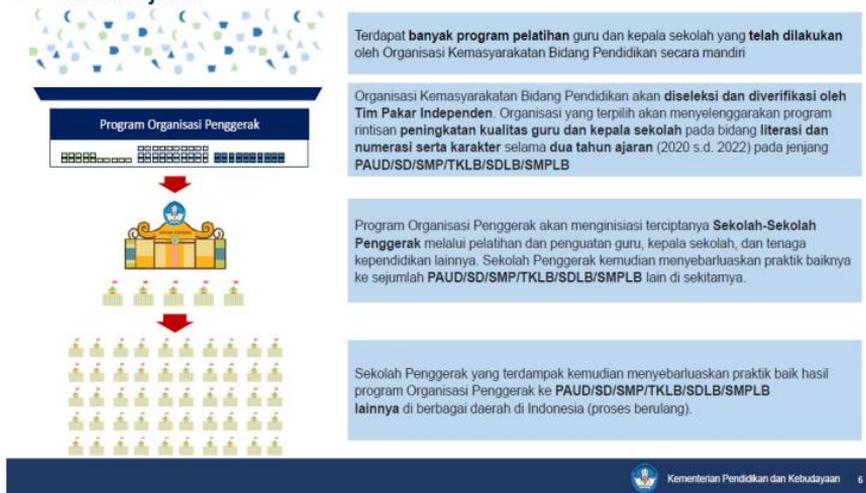
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri dari unsur-unsur (orang dan sebagainya) yang ada dalam perkumpulan-perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini akan dicapai di masa depan bersama dengan anggota organisasi dan pihak terkait. Organisasi pada dasarnya didirikan sebagai ruang atau lokasi bagi individu untuk berkumpul dan berkolaborasi secara bijaksana dan metodelis.

Organisasi ada di mana-mana, dari yang ada di lingkungan sekolah, seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Badan Eksekutif Siswa (BEM), hingga yang ada di tingkat desa, seperti organisasi pemuda, hingga organisasi internasional antar negara, seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (ASEAN-UN) (PBB). Tujuan organisasi sebagai perkumpulan atau wadah bagi sekelompok individu untuk berkolaborasi harus diapresiasi oleh para anggotanya. Beberapa fungsi organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan peraturan, serta tanggung jawab atas apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi.
2. Meningkatkan kapasitas anggota organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan bantuan dari lingkungan.
3. Untuk memberikan informasi dan mendidik setiap anggota organisasi

Ketiga hal tersebut merupakan contoh fungsi organisasi yang harus kita pahami untuk menentukan arah perjalanan suatu organisasi. Biasanya, setiap individu dalam bisnis memiliki ambisi pribadi yang unik. Alasan utama untuk bergabung dengan organisasi adalah untuk mendapatkan uang atau kemajuan dalam posisi. Meskipun demikian, tujuan setiap orang sering kali disejajarkan dengan tujuan bisnis, yaitu untuk meningkatkan produksi dan keuntungan. Dengan misi, sebuah organisasi dapat berkembang untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan rekrutmen anggota, pengaruh terhadap lingkungan eksternal, dan tujuan organisasi lainnya.

2 Program Organisasi Penggerak: Penyebarluasan Praktik Baik secara Berkelanjutan



Sumber: Kemendikbud 2020

Sangat penting untuk menyadari bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan atau reformasi pendidikan yang akan efektif sampai ada perubahan di dalam sekolah. Sebagai bagian dari Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program yang disebut Program Organisasi Penggerak (POP). Inisiatif ini melibatkan kelompok masyarakat dan relawan pendidikan untuk bertindak sebagai katalis untuk pengembangan Sekolah Motivasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar bagi guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan untuk mempercepat hasil belajar siswa. Dana pemerintah akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang berpartisipasi untuk mengubah sekolah menjadi Sekolah yang Memotivasi. POP akan berkonsentrasi pada peningkatan kompetensi 50.000 guru, pengelola, dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP antara tahun 2020 hingga 2022. Beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Program Organisasi Penggerak, termasuk penyerahan proposal, seleksi, eksekusi, dan integrasi.

1 Sekolah Penggerak: Program Organisasi Penggerak sebagai Inisiator



Sumber: Kemendikbud 2020

Program Organisasi Penggerak diharapkan dapat membantu pembentukan Sekolah Penggerak dengan empat komponen. *Pertama*, tenaga kependidikan harus memahami proses belajar siswa untuk meningkatkan kapasitas guru untuk mendidik. *Kedua*, guru memihak anak dan mengajar sesuai dengan tahap perkembangan siswa. *Ketiga*, anak mengembangkan semangat belajar, akhlak mulia, serta kemampuan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Keempat, pembentukan Organisasi Penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi yang berkomitmen untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.

Inisiatif Organisasi Penggerak meminta bantuan dari berbagai organisasi masyarakat dan relawan pendidikan yang memiliki rekam jejak keberhasilan menyelenggarakan program pelatihan guru dan kepala sekolah. Kurikulum ini cocok untuk organisasi dengan pengalaman sebelumnya mengembangkan dan melaksanakan inisiatif pendidikan. Organisasi yang terlibat dalam salah satu dari tiga jenis program tersebut harus dapat menunjukkan bahwa program tersebut memiliki rekam jejak dalam meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah serta bukti kuantitatif dampak yang juga diperlukan.

2 Program Organisasi Penggerak: Bentuk Dukungan

Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun 2020-2022 Program Organisasi Penggerak akan meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB. Terdapat tiga tipe program dalam Program Organisasi Penggerak.

KATEGORI	REKAM JEJAK ORGANISASI PENGGERAK	SEKOLAH SASARAN	DUKUNGAN	JANGKA WAKTU IMPLEMENTASI	EVALUASI DAMPAK
 Gajah	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bukti empiris dampak program terhadap hasil belajar siswa Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	> 100 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 20 miliar/tahun /program	2 tahun (2020-2022)	Evaluasi dengan menggunakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk mengukur perkembangan literasi dan numerasi, serta karakter (SD/SMP/SDLB/SMPLB) dan instrumen pengukuran kualitas pembelajaran serta pertumbuhan /perkembangan anak (PAUD/TKLB)
 Macan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	21-100 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 5 miliar/tahun /program		
 Kijang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik 	5-20 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB	maksimal 1 miliar/tahun /program		

Sumber: Kemendikbud 2020

Ada tiga macam program: gajah, harimau, dan rusa, yang masing-masing disesuaikan dengan kemampuan organisasi penggerak. Kategori Gajah menerima bantuan dana maksimal Rp 20 miliar per tahun untuk setiap program dengan target lebih dari 100 PAUD/SD/SMP. Persyaratan rekam jejak untuk dimasukkan dalam kategori ini adalah bahwa program tersebut memiliki bukti empiris tentang dampaknya terhadap hasil belajar siswa; bahwa program tersebut memiliki bukti empiris dampaknya terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru; dan bahwa program tersebut memiliki bukti empiris tentang dampaknya terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru.

Program macan mendapatkan bantuan dana maksimal Rp 5 miliar per tahun, dengan target 21 hingga 100 PAUD/SD/SMP. Organisasi Penggerak dalam kategori ini harus memiliki rekam jejak data empiris yang menunjukkan pengaruh program terhadap motivasi, pengetahuan, dan metode pengajaran guru dan kepala sekolah; dan terampil dalam merencanakan dan melaksanakan program yang efektif. Sementara, program Kijang mendapatkan pembiayaan maksimal Rp 1 miliar setiap tahun, dengan target 5 hingga 20 PAUD/SD/SMP. Organisasi Penggerak harus mampu menunjukkan rekam jejak keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program dalam kategori ini.

Capaian siswa Program Organisasi Penggerak meliputi sekolah yang menghasilkan Siswa Pancasila, atau siswa yang berakhlak mulia, mandiri, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dapat bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi, serta berwawasan internasional. Selain itu, kualitas Sekolah Mengemudi meliputi dukungan masyarakat terhadap proses pendidikan di kelas, mulai dari orang tua hingga tokoh

masyarakat hingga pemerintah daerah. Dengan demikian, karakter utama Sekolah Mengemudi adalah sekolah yang dapat menjadi panutan, tempat pelatihan, dan inspirasi bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah lainnya.

B. Guru Penggerak

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melaksanakan berbagai proyek yang bertujuan untuk mengintervensi guru dan memperluas pemahaman mereka tentang materi pedagogis. Namun, implementasi program tersebut masih belum ideal. Karena kurangnya dukungan dari kepala sekolah, guru tidak dapat mengimplementasikan informasi dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan. Selain itu, peserta diklat seringkali dipilih berdasarkan penunjukan dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Belum ada uji kompetensi guru secara komprehensif.

Pelatihan guru juga dilaksanakan melalui seminar yang diadakan di lokasi yang jauh dari kelas dan sekolah. Akibatnya, pertumbuhan kompetensi guru terhenti setelah pelatihan selesai, membuat guru tidak antusias untuk melakukan perbaikan dalam menghadapi kesulitan. Akhirnya, pelatihan guru memfokuskan guru yang telah diajar untuk mencapai kuantitas untuk melatih lebih banyak guru.

Mengingat iklim saat ini, kurikulum guru yang memotivasi mengutamakan pembinaan kepemimpinan dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional mereka. Menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi mitra dalam memotivasi guru agar dapat berkolaborasi dalam reformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, kurikulum ini dirancang untuk guru yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan dalam sistem pendidikan Indonesia.

Program Guru Penggerak akan melakukan penilaian di bidang pedagogi, kemampuan analisis, motivasi, dan kompetensi lainnya untuk menggunakan data yang dikumpulkan dari peserta pelatihan untuk pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang lebih objektif yang tidak tergantung pada penunjukan UKG dan hasil. Program Guru Penggerak harus fokus baik di dalam kelas maupun di tempat kerja untuk menjamin bahwa teori-teori pembelajaran yang diperoleh di dalam kelas dapat digunakan di dalam kelas dan berpengaruh pada kualitas hasil belajar.

Selain itu, Guru Penggerak yang Memotivasi membentuk Komunitas Praktik sebagai lingkungan belajar bersama dan ruang kolaboratif bagi para guru, sehingga para guru dapat saling membantu ketika mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan ide-ide yang baru diperoleh. Komunitas praktik ini memungkinkan ekosistem sekolah lain untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan menentukan kebijakan dan program berdasarkan data dan hasil refleksi.

Tujuan Program Guru Penggerak adalah untuk memungkinkan siswa mengalami Kebebasan Belajar dengan mencapai Profil Siswa Pancasila. Peserta didik Pancasila

adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia; 2) kreativitas; 3) kerjasama; 4) keragaman global; 5) berpikir kritis; dan 6) kemandirian. Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendorong pengembangan Guru yang Memotivasi, atau pemimpin pembelajaran yang mendorong pertumbuhan siswa yang holistik, secara aktif dan proaktif mendorong pendidik lain untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan berfungsi sebagai panutan dan agen transformasi ekosistem pendidikan dalam rangka pembuatan profil siswa Pancasila.

Hal ini karena saat ini, fungsi guru lebih banyak didefinisikan dengan mendorong siswa untuk meningkatkan keberhasilan akademiknya, mendidik secara kreatif, dan secara aktif mengembangkan diri. Tentu saja poin-poin tersebut masih bisa dioptimalkan. Dengan demikian, tugas utama Guru Penggerak adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa yang holistik sesuai dengan profil Siswa Pancasila, mendidik guru lain dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan menjadi panutan dan katalisator perubahan dalam ekosistem pendidikan. Harap diingat bahwa Guru Penggerak adalah seseorang yang akan selalu mengutamakan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru yang penggerak bertanggung jawab untuk memobilisasi komunitas belajar di sekolah dan di masyarakat pada umumnya sehingga guru lain dapat menggunakan strategi pembelajaran aktif yang sesuai dengan perkembangan siswa mereka.

Ambisi dan tugas yang luhur ini, tanpa peran serta dan bantuan berbagai komponen pendidikan, khususnya pengawas dan pengelola sekolah, tidak dapat tercapai. Mereka adalah mitra penting Guru yang penggerak dalam upaya mereka untuk mereformasi sistem pendidikan di sekolah dan masyarakat. Informasi tambahan dapat ditemukan pada gambar berikut:



Sumber: Kemendikbud 2020

Seperti terlihat di atas, peran Guru Penggerak terjepit di antara supervisor dan kepala sekolah. Untuk mencapai tujuan program, kerjasama dan timbal balik antara ketiga komponen sangat penting. Misalnya, kepala sekolah bertugas memfasilitasi dan mendukung proses pembelajaran Calon Guru Penggerak dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Pembelajaran Mandiri di sekolah, sedangkan pengawas sekolah bertugas menginisiasi program pengembangan kompetensi guru daerah.

1. Strategi Pendidikan Guru Penggerak

Teknik untuk memotivasi pendidikan guru adalah andragogi. Andragogi adalah proses mengintegrasikan pelajar dewasa ke dalam kerangka pengalaman belajar. Langkah-langkah persiapan pendidik bagi Guru Penggerak dimulai dengan rekrutmen Calon Guru Penggerak. Kemudian mereka akan menjalani sembilan bulan masa sekolah sebagai Calon Guru Penggerak. Hanya dengan demikian mereka dapat berkembang menjadi generasi baru pemimpin pendidikan yang mampu memajukan pendidikan berkualitas melalui kerja sama dengan tenaga kependidikan sekolah, pengawas, dan guru pelatihan guru.

Mempertimbangkan aliran dan besarnya tanggung jawab Guru Penggerak, tentu saja diperlukan rencana pendidikan guru yang ideal. Metode pemilihan calon guru merupakan upaya bersama antara pendidik dan sumber daya manusia profesional, dan implementasinya tersedia untuk semua guru. Selain itu, para guru, tenaga kependidikan, dosen, dan praktisi pendidikan berkolaborasi untuk mengembangkan Kurikulum Pendidikan Program Guru Penggerak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan program staf pendukung yang terdiri dari fasilitator dan mentor bagi Calon Guru Penggerak dipilih dan dididik secara transparan secara berkala untuk memastikan bahwa peserta diberdayakan secara efektif. Kemudian, untuk memfasilitasi pembelajaran reflektif, kurikulum Program Guru Penggerak disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat memperoleh informasi dan kemampuan baru, merefleksikan pengalaman mereka, dan segera menggunakannya di kelas atau sekolah mereka.

2. Luaran Pendidikan Guru Penggerak

Salah satu tujuan utama hadirnya Guru Penggerak adalah untuk mengembangkan pemimpin pembelajaran yang mampu melaksanakan Pembelajaran Mandiri. Guru penggerak adalah yang 1) mandiri, yaitu mampu mengembangkan dirinya dan guru lain melalui refleksi, *sharing*, dan kolaborasi, dan 2) mampu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada siswa dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat. 3) menguasai manajemen pembelajaran, yang meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, merenungkan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan keterlibatan orang tua, 4) mampu berinovasi dalam upaya pengembangan sekolah melalui kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk membina siswa kemandirian dan kepemimpinan, dan 5)

mematuhi kode etik, yang meliputi memiliki kedewasaan moral, emosional, dan spiritual untuk bertindak secara etis.

3. Kerangka Desain Pendidikan Guru Penggerak (9 bulan)

Pendidikan untuk Guru Penggerak yang berlangsung selama sembilan bulan dilakukan secara matang dan terukur menggunakan pendekatan andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan rincian sebagai berikut:

Kerangka Desain Pendidikan Guru Penggerak (9 bulan)



Sumber: Kemendikbud 2020

Dengan proporsi 70%, alokasi *Learning in the Workplace* dan *Community of Practice* terdiri dari pemberian umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan siswa/mahasiswa. Dua puluh persen waktu dihabiskan untuk belajar dari rekan kerja dan guru lainnya, dan sepuluh persen dihabiskan untuk pelatihan dengan fasilitator dan pembantu. Selain itu, gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan utama Guru Penggerak adalah pencapaian profil Siswa Pancasila. Alhasil, modul pembelajaran yang dibuat mencerminkan hal tersebut.

Modul pertama membahas tentang paradigma dan visi guru yang memotivasi. Jika guru memahami dasarnya, modul kedua akan mengeksplorasi praktik Pembelajaran Pro-Siswa. Sesi ketiga membahas topik Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Setelah mempelajari tiga kursus, guru akan merefleksikan dan menciptakan efek yang bertahan lama. Sedangkan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penugasan

dan praktik pelatihan, mentor, dan *feedback* siswa, serta tujuan peningkatan hasil belajar siswa.

4. Kriteria Daerah Sasaran Program Guru Penggerak

Inisiatif Guru Penggerak belum dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan hanyalah beberapa lokasi yang menjadi target inisiatif ini. Banyak faktor yang berkontribusi pada pemilihan program untuk topik-topik tertentu.



Sumber: Kemendikbud 2020

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan keenam wilayah tersebut, antara lain: 1) wilayah tersebut mewakili enam pulau utama Indonesia; 2) bukan merupakan daerah calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020) bukan wilayah 3T (Depan, Terluar, Tertinggal), karena pelatihan dilakukan secara online; dan 4) merupakan daerah calon kepala sekolah sampai tahun 2024.

Peran Guru Penggerak

Karena pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan, maka pendidikan menjadi titik berat bagian pembangunan. Pembangunan berusaha untuk dan diarahkan pada pengembangan sumber daya berkualitas tinggi dan kompetitif pada skala nasional dan dunia. Menurut Hamalik dalam Rahmawati et al., (2021), proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan manusia yang berkualitas adalah hasil dari prestasi pendidikan; Hal ini juga didukung oleh Supardi et al., (2015) yang menambahkan bahwa pendidikan yang

berkualitas harus dilaksanakan. Keberhasilan suatu pendidikan yang hebat diatur oleh berbagai unsur, salah satunya adalah kualitas pengajaran dari para pengajarnya.

Isu buruknya kualitas pendidikan di Indonesia membutuhkan solusi yang bijaksana yang tidak bergantung pada satu pendekatan saja, seperti mengubah kurikulum, meningkatkan anggaran pendidikan, atau mereformasi sistem pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dimulai dengan fokus pada kualitas guru. Dalam Utami (2019). Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa kedudukan profesional guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat 1) berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat guru, sedangkan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat guru, memajukan kualitas pendidikan. Menyadari peran penting guru dalam meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan program penggerak guru.

Guru penggerak ini merupakan rangkaian keenam dari rangkaian kebijakan Pembelajaran Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Direktorat Jenderal GTK. Tujuan Program Guru Penggerak adalah untuk mempersiapkan pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong pertumbuhan siswa secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengundang guru di sekitar mereka untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau *Student Center Learning* (SCL), dan menjadi contoh dan katalisator transformasi ekosistem pendidikan untuk mencapai profil Siswa Pancasila. Mirip dengan Widyastuti (2020), kami percaya bahwa pembelajaran mandiri dan guru yang memotivasi akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan daya saing global. Transformasi sekolah menuju penyelenggaraan pendidikan komprehensif berkualitas tinggi, Kemudian, Nababan et al., (2021) menyimpulkan bahwa rencana dan program Pendidikan sebagai penggerak untuk meningkatkan pendidikan secara progresif dan pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas.

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tinggi, Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) dibangun di atas landasan pengembangan kompetensi kepemimpinan, yang meliputi pengabdian kepada masyarakat, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi dengan pengembangan siswa, serta pengembangan diri dan sekolah serta kompetensi pengembangan. Sundari et al. (2020) juga mengacu pada pemikiran tentang pengertian guru mengemudi, yaitu sebagai konsekuensi dari penilaian fundamental perubahan, prinsip berpikir mandiri, dan sikap terbuka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru mengemudi adalah pemimpin dan tepat waktu untuk guru lainnya. Menurut penelitian Farhan et al. (2021) fungsi guru mengemudi dalam perkuliahan Termodinamika berubah mulai dari 78, keterlibatan mahasiswa 3,15, setting

menyenangkan 3,43, dan pengetahuan mahasiswa tentang mata kuliah 3,49. Hasil ini menunjukkan bahwa guru mengarahkan gagasan sebagai pemimpin efektif.

Perlu diketahui dengan jelas bahwa fungsi guru penggerak tidak terbatas pada guru yang membuat RPP dan menyajikan isinya; sebaliknya, guru penggerak harus memiliki kemauan dan keterampilan untuk memimpin, memantau, dan melakukan penyesuaian (Sirait et al., 2021). Disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Guru yang memajukan pengertian belajar mandiri harus mampu mengajar dan mengelola pembelajaran secara efektif melalui pemanfaatan teknologi dan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris guna meningkatkan kualitas pendidikan serta merefleksikan dan memperbaiki sistem secara keseluruhan (Lestiyani, 2020). Menurut Sibagariang et al., (2021) berbagai kendala muncul selama proses pengajaran sebagai akibat dari faktor. Misalnya, menurut penelitian Jannah & Junaidi (2020), faktor yang menghambat guru dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin disebabkan oleh faktor sekolah, faktor guru, dan faktor siswa. Faktor dari sekolah sebagai akibat kurang dimanfaatkannya fasilitas. Faktor-faktor seperti pengajar yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP, guru yang kurang ahli dalam literasi media, dan siswa yang kurang memiliki minat belajar dan semangat belajar.

Setiap guru dan pendidik harus memahami fungsi guru penggerak. Sutikno (2007) bahwa tugas guru penggerak adalah sebagai berikut:

- a) Dalam konteks masyarakat belajar, guru penggerak berfungsi sebagai pelatih bagi pengajar lain dan meningkatkan kualitas belajar dan mengajar dengan menjadi pendidik yang ideal dan mampu mengembangkan diri.
- b) Guru penggerak berkontribusi pada pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setiap guru yang mengikuti perintah guru penggerak diharapkan mampu membangun dan mengelola pengalaman belajar yang menarik serta menginspirasi siswa untuk belajar dan menggunakan keterampilan dan kemampuannya secara kreatif.
- c) Guru penggerak sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan siswa secara menyeluruh di sekolah.
- d) Tanggung jawab guru penggerak adalah menyediakan lingkungan belajar yang berfungsi sebagai wadah diskusi dan kerjasama dengan rekan sejawat lainnya, baik di dalam maupun di luar sekolah.
- e) Guru mengemudi berfungsi sebagai pemandu proses belajar, memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan.
- f) Kapasitas pengembangan diri, yaitu kemampuan guru penggerak untuk mengikuti kemajuan teknis dan informasi baru.
- g) Sebagai motivator di lingkungan sekolah bagi guru lainnya sebagai pengingat bahwa guru harus senantiasa belajar dan bersama-sama menciptakan perubahan yang baik guna melahirkan negara yang berkualitas untuk kemajuan suatu bangsa.

Melaksanakan tugas sebagai guru penggerak memerlukan berbagai metode seleksi, kemudian setiap pendidik harus dianggap kompeten di bidangnya. Kompetensi merupakan modal utama seseorang yang bercita-cita menjadi guru yang membawa masyarakat pendidikan atau sekolah ke depan; Istilah ini merujuk pada kompetensi sebagai kumpulan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajar secara profesional untuk mencapai tujuan pendidikan (Creemers, 2002). Berbagai kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru, sebagaimana dituangkan dalam Halimah et al. (2019):

- a. Kompetensi pedagogik mengacu pada kapasitas guru untuk memahami sifat atau kapasitas siswa melalui pengetahuan tentang perkembangan kognitif siswa, desain pembelajaran, dan pelaksanaan, serta penilaian hasil belajar.
- b. Kompetensi pribadi guru profesional dengan meneladani kepribadian positif, cerdas dan bijaksana, dewasa dan berwibawa, serta mampu menjadi panutan.
- c. Kompetensi profesional melalui penguasaan materi pembelajaran yang mendalam dalam penguasaan kapasitas akademik untuk memahami ilmu pengetahuan, gelar, dan gaya pendidikan
- d. d. Kompetensi sosial melalui komunikasi yang efektif dengan siswa, pendidik, orang tua, dan masyarakat luas Temuan presentasi mendukung gagasan bahwa memanfaatkan peran guru sebagai katalis sangat penting untuk memberlakukan perubahan yang memotivasi semua guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, dengan tujuan akhir tujuan untuk mencapai kumpulan pendidik berkualitas yang merata di setiap wilayah.

C. Sekolah Penggerak

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia adalah akibat dari pendidikan yang tidak memadai. Sifat zaman modern yang serba cepat menuntut standar pendidikan yang lebih tinggi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang luar biasa. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui pembentukan Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Melalui Profil Siswa Pancasila, program Sekolah Penggerak berupaya mewujudkan cita-cita reformasi pendidikan Indonesia. Pendekatan paling sederhana untuk menyampaikan tujuan reformasi pendidikan di Indonesia adalah melalui profil Pelajar Pancasila, yang merupakan perwujudan aspirasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Dengan kata lain, perubahan pendidikan Indonesia menghasilkan pencapaian enam profil siswa Pancasila.

Enam ciri Siswa Pancasila adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kemampuan bekerja sama, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mandiri.



Sumber: Kemendikbud 2020

Program Sekolah Penggerak berfungsi sebagai katalis untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang mengutamakan peningkatan hasil belajar siswa secara holistik. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum menerapkan paradigma tersebut dan justru hanya berkonsentrasi pada penyelenggaraan pendidikan atau jenis prosedur pendidikan lainnya tanpa memperhatikan hasil pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengamati bahwa beberapa sekolah di dunia sedang bertransformasi menjadi hasil belajar yang lebih mendasar dan vital. Proses transformasi dimulai dengan sumber daya manusia yang unggul di sekolah. Kemampuan guru dan kepala sekolah sangat penting dalam keadaan ini karena pada akhirnya semua reformasi pendidikan dimulai dengan kompetensi pendidik dan kepemimpinan kepala sekolah.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya



Program **kolaborasi** antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama



Intervensi dilakukan secara **holistik**, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah



Memiliki ruang lingkup yang mencakup **seluruh kondisi** sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta



Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri



Program dilakukan **terintegrasi dengan ekosistem** hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak

Sumber: Kemendikbudristek 2020

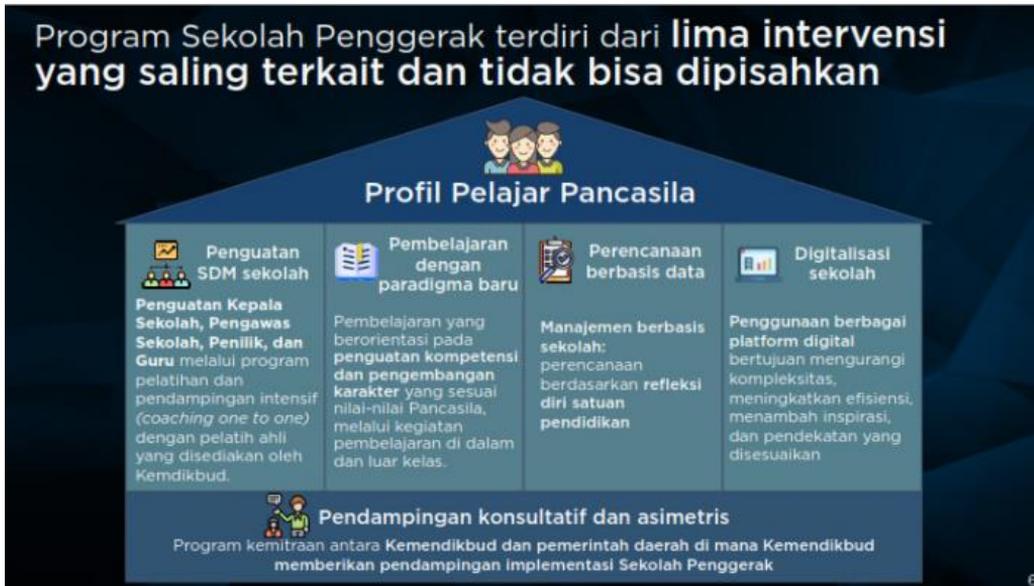
Program Sekolah Penggerak adalah evolusi dari inisiatif reformasi sekolah sebelumnya. Ada banyak perbedaan antara program transformasi ini dan yang sebelumnya. Awalnya, Sekolah Penggerak merupakan inisiatif bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah. Perbedaan berikut adalah adanya intervensi komprehensif yang dimulai dengan sumber daya sekolah, proses pembelajaran, dan ketiga, perencanaan dan pembinaan pemerintah daerah untuk menciptakan perubahan budaya sekolah. Di sisi lain, program ini berlaku untuk semua jenis sekolah di Indonesia, terlepas dari persyaratannya, termasuk sekolah negeri dan swasta.

Menyadari bahwa perubahan merupakan proses yang panjang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada sekolah selama tiga tahun akademik guna mengembangkan institusi yang mampu melakukan transformasi sendiri di masa depan. Konsep tersebut diimplementasikan dan dimasukkan ke dalam ekosistem sedemikian rupa sehingga semua sekolah di Indonesia pada akhirnya menjadi Sekolah Penggerak.

Program Sekolah Penggerak akan mempercepat sekolah negeri dan swasta di semua tahap selama periode tiga tahun, memungkinkan mereka untuk maju dua tahap lebih banyak daripada sebelumnya. Kemendikbud ingin melihat semua sekolah di Indonesia akhirnya mencapai tahap keempat, tingkat yang paling diinginkan. Siswa di tahap keempat memiliki kemampuan membaca dan berhitung di atas rata-rata, menghasilkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, menyenangkan, dan belajar yang berpusat pada siswa. Selain refleksi dan pembelajaran guru, sekolah pada tahap empat memasukkan perencanaan dan penganggaran program berbasis refleksi. Selain

itu, guru dan tenaga kependidikan sekolah memberikan masukan sesekali selama tahap keempat.

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan: membangun sumber daya manusia sekolah, mengubah paradigma pembelajaran, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan bantuan konsultatif dan asimetris.



Sumber: Kemendikbud 2020

1. Membantu secara konsultatif dan asimetris

Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan Sekolah Penggerak dengan mempertimbangkan keunikan situasi di setiap lokasi, memastikan tidak ada sekolah yang menerima bantuan yang sama. Di sisi lain, Kemendikbudristek merasa struktur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diubah, dengan Kemendikbudristek membantu pemerintah daerah mengubah pendidikan.

2. Meningkatkan sumber keuangan sekolah

Kepala sekolah, tenaga kependidikan sekolah, pemilik sekolah, dan guru akan mendapatkan pelatihan dan dukungan komprehensif dari pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelatihan akan menekankan pelatihan klinis atau pelatihan yang terjadi selama proses pembelajaran atau dalam situasi dunia nyata untuk menilai keberhasilannya.

3. Beradaptasi dengan paradigma baru pembelajaran

Tidak hanya pembelajaran berbasis informasi, tetapi juga pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sejalan dengan cita-cita Pancasila, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Kemendikbudristek, hal ini akan berdampak baik pada pertumbuhan kognitif siswa. Jika siswa memiliki rasa diri dan guru mereka menunjukkan integritas dan moralitas, mereka akan menemukan belajar lebih nyaman dan menyenangkan di lingkungan sekolah mereka. Belajar di bawah paradigma baru memungkinkan fleksibilitas dan kesederhanaan kurikuler, memungkinkan guru untuk membagi kelas untuk memfasilitasi pekerjaan mereka.

4. Perencanaan berdasarkan data

Seperti halnya seorang ilmuwan yang menggunakan strategi, guru juga seorang ilmuwan, dan dengan demikian, ia harus menentukan apakah taktik pembelajaran yang digunakan efektif. Pemanfaatan data yang dibutuhkan sebagai bahan penilaian. Ketersediaan data juga penting untuk menentukan tingkat keberhasilan guru di kelas dan perubahan yang terlihat pada siswa.

5. Digitalisasi institusi pendidikan

Pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud tidak hanya akan menyediakan komputer dan proyektor, tetapi juga akan membangun platform dan aplikasi yang berpusat pada siswa dan pembelajaran untuk membantu dan mendukung guru dan sekolah. Program Sekolah Penggerak akan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggarisbawahi bahwa tujuan Program Sekolah Penggerak bukanlah untuk menciptakan sekolah-sekolah yang unggul, tetapi untuk meratakan lapangan permainan untuk keunggulan pendidikan di seluruh daerah. Kolaborasi dan kreativitas sangat penting untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk mencapai tujuan ini. Program ini bertujuan untuk merekrut 2.500 siswa di tahun pertama (2021), 10.000 di tahun kedua, 20.000 di tahun ketiga, dan 40.000 di tahun keempat. Pada tahun-tahun berikutnya, sekolah terbesar di Indonesia, hingga 100 persen dari seluruh sekolah, akan menjadi sekolah penggerak dengan sasaran langsung 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengantisipasi bahwa lebih banyak sekolah akan bergabung dengan inisiatif Sekolah Penggerak di tahun-tahun mendatang.

Daftar Referensi

Creemers, B. P. (2002). The comprehensive model of educational effectiveness: Background, major assumptions and description. *Retrieved January, 22, 2010.*

- Farhan, A., Herliana, F., Evendi, E., Devy, N. K., & Mauliza, F. (2021). The Implementation of “Guru Penggerak”(Organizer Teachers) Concept to Innovation of The Discussion Methods in Thermodynamics Course. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 7(1), 1–12.
- Ghiffar, M. A. N., Nurisma, E., Kurniasih, C., & Bhakti, C. P. (2018). Model pembelajaran berbasis blended learning dalam meningkatkan critical thinking skills untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional STKIP Andi Matappa Pangkep*, 1(1), 85–94.
- Grant, M. S., & Jenkins, L. S. (2014). Communication education for pre-licensure nursing students: literature review 2002–2013. *Nurse Education Today*, 34(11), 1375–1381.
- Halimah, M., Langitasari, I., & Solfarina, S. (2019). Application of PDEODE Learning Model to Increase Student’s KPS in Buffer Solution. *Jurnal Profesi Keguruan*, 5(1), 15–22.
- Jannah, M., & Junaidi, J. (2020). Faktor Penghambat Guru sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Sosiologi di SMAN 2 Batusangkar. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 191–198.
- Lestari, I. (2015). Pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2).
- Lestiyani, P. (2020). Analisis Persepsi Civitas Akademika Terhadap Konsep Merdeka Belajar Menyongsong Era Industri 5.0. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(3), 365–372.
- Nababan, E. B., Sari, R. N., Sari, I. M., Satriawan, D., Avicenna, A., Subakti, H., Tamrin, A. F., Sari, A. S. P., Kuswandi, S., & Harahap, J. M. (2021). *Bahasa Indonesia Akademik: Penulisan Laporan Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, R., Siraj, A., & Achruh, A. (2021). Hubungan Antara Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Dengan Kinerja Guru. *Idarah J. Manaj. Pendidik*, 5(1), 10.
- Risdianto, E. (2019). *Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99.
- Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. (2021). Implementation of Hots-Based Learning and Problem Based Learning during the Pandemic of COVID-19 in SMA Budi Mulia Jakarta. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 8(2), 296–305.
- Sundari, R., Karyono, T., & Soeteja, Z. (2020). Pengembangan Buku Pengayaan Bermuatan Lokal Bagi Mahasiswa PGSD. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 31–43.
- Supardi, S. U. S., Leonard, L., Suhendri, H., & Rismurdiyati, R. (2015). Pengaruh media pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar fisika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(1).
- Sutikno, R. B. (2007). *The power of empathy in leadership*. Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, R. (2019). Analisis Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Google Classroom pada Mata Kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. *Prisma, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 2, 498–502.

Widyastuti, A. (2020). *PERSEPSI GURU TENTANG KONSEP MERDEKA BELAJAR MENDIKBUD NADIEM MAKARIM DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MTS NEGERI 3 SLEMAN*.

Wulandari, A., Handayani, P., & Prasetyo, D. R. (2019). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis EMC (Education Mini Club) sebagai Solusi Menghadapi Tantangan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *THABIEA: JOURNAL OF NATURAL SCIENCE TEACHING*, 2(1), 51–56.

Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).

Bab V

Manajemen Kurikulum di Era Merdeka Belajar

Era revolusi industri 4.0 menghadirkan lembaga pendidikan dengan kesulitan dan peluangnya tersendiri. Kondisi yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan lembaga pendidikan harus inovatif dan kolaboratif. Tanpa kemampuan untuk berkembang dan bekerja sama, Anda akan tertinggal dalam persaingan. Di sisi lain, lembaga pendidikan akan mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sesederhana memutar telapak tangan untuk menciptakan manusia pembelajar. Lembaga pendidikan harus mampu memelihara sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Di era Revolusi Industri 4.0, pendidik dituntut untuk memastikan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovasi, serta keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Selain itu, diperlukan kemampuan untuk mencari, mengatur, dan menyajikan informasi, serta kemampuan memanfaatkan informasi dan teknologi secara efektif (Risdianto, 2019).

Tumbuhnya pendidikan belajar mandiri dalam kajian teknik pembelajaran, yaitu sistem dan pengajaran, harus sejalan dengan tren pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0, tuntutan utama yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan, atau lebih tepatnya dalam cara pengajaran, adalah penguasaan literasi baru oleh siswa atau siswa. Secara khusus, literasi baru. Untuk memulai, literasi data. Kategori kedua adalah literasi teknis. Akhirnya, ada literasi manusia. Dan sistem dan/atau pendekatan pendidikan yang digunakan dalam pendidikan belajar mandiri ditujukan untuk tujuan yang sama. Jika siswa mempelajari literasi baru ini, mereka akan berkembang menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan luar biasa yang akan berkontribusi pada pembangunan masa depan Indonesia. Seiring dengan pengembangan keterampilan membaca baru, sistem pendidikan otonom belajar untuk terus mengembangkan karakter siswa seperti kejujuran, religiusitas, kerja keras/tekun, tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan toleransi.

Tentu saja, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, yang meliputi mengembangkan siswa yang dapat berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang kreatif dan inovatif, yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, dan yang berkarakter. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan kegiatan pendidikan harus mampu mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang pendidikan sepanjang Revolusi Industri. 4.0. Dan karena guru sangat penting untuk keberhasilan sistem sekolah belajar mandiri, mereka harus dapat beradaptasi dengan sistem baru untuk memperoleh kompetensi dan kemampuan yang diperlukan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai sarana untuk melakukan perubahan, termasuk peremajaan kurikulum berbasis literasi dan peningkatan peran guru yang kompeten secara digital. Dengan demikian,

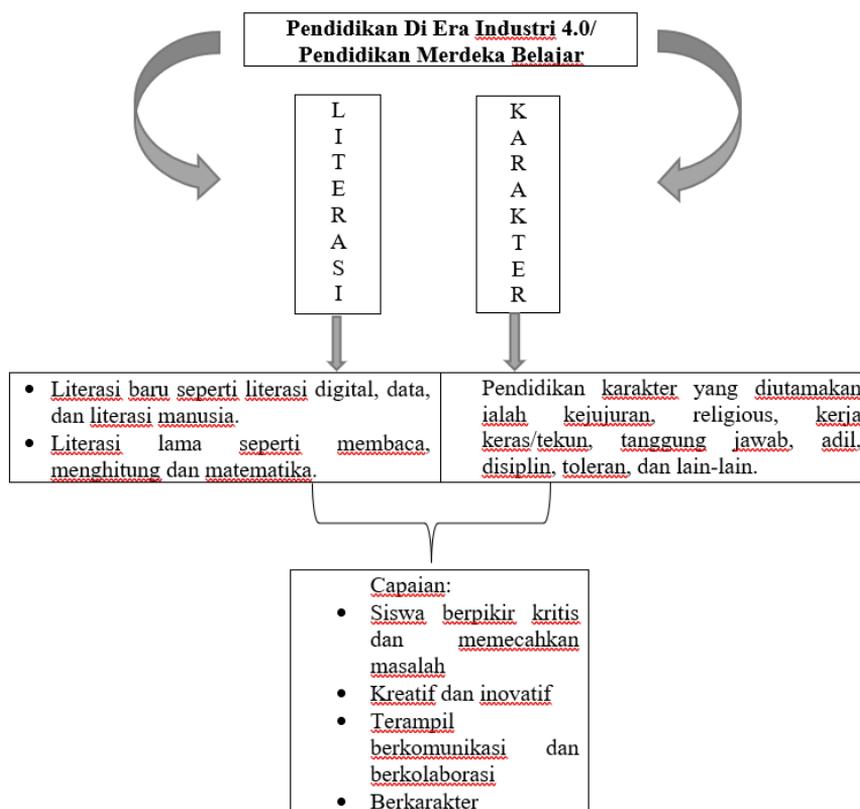
pembelajaran campuran adalah cara pengajaran yang sangat baik di dalam sistem sekolah pembelajaran mandiri. Teknik pengajaran menggabungkan manfaat pengajaran tatap muka dan virtual. Hal ini pula yang kemudian dipecahkan melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Diharapkan dengan kehadiran MKBM, sistem kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi lebih adaptif dan maju.

A. Manajemen Metode Pembelajaran di Era Kampus Merdeka

Bagian saat ini membahas bagaimana beradaptasi dengan era Revolusi Industri 4.0 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran. Sebagai reaksi terhadap periode baru ini, penting untuk mengkaji data terkini dan dialog ilmiah tentang pendekatan pembelajaran. Penulis terutama akan memaparkan wacana akademisi yang melakukan penelitian di Indonesia. Namun, salah satu kepastian dalam masa Revolusi Industri 4.0 adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan, atau lebih tepatnya dalam teknik pengajaran, yaitu murid atau siswa, adalah penguasaan literasi baru.

Secara khusus, literatur baru yakni, Pertama, literasi data. Literasi ini mengacu pada kapasitas untuk membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam jumlah besar (*big data*) dalam lingkungan digital. Kategori kedua adalah literasi teknis. Literasi ini memahami bagaimana mesin berfungsi dan penggunaan teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*). Akhirnya, ada literasi manusia. Literasi ditunjukkan dengan peningkatan humaniora, komunikasi, dan desain. Siswa dan guru dapat terlibat dalam berbagai inisiatif literasi. Dan sistem dan/atau pendekatan pendidikan yang digunakan dalam pendidikan belajar mandiri ditujukan untuk tujuan yang sama. Jika siswa mempelajari literasi baru ini, mereka akan berkembang menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan luar biasa yang akan berkontribusi pada pembangunan masa depan Indonesia (Muslimat, 2021).

Namun, selain mengembangkan literasi baru, sistem pendidikan era Revolusi Industri 4.0 terus mengembangkan karakter seperti kejujuran, iman, kerja keras/tekun, tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan toleransi.



Sumber: Diolah dari beberapa sumber penelitian

B. Sistem Belajar *Blended Learning*

Berdasarkan sembilan tren atau kecenderungan terkait pendidikan di era MBKM, antara lain. *Pertama*, belajar di waktu dan tempat yang berbeda. *Kedua*, pembelajaran individu. *Ketiga*, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. *Keempat*, pembelajaran berbasis proyek. *Kelima*, pengalaman lapangan. *Keenam*, interpretasi data. *Ketujuh*, penilaiannya beragam. *Kedelapan*, keterlibatan siswa. *Terakhir*, pendampingan. *Blended Learning* merupakan metode pembelajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan belajar mandiri. *Blended learning* juga disimpulkan dari berbagai penelitian dan perdebatan ilmiah dalam merespon sistem dan metode pembelajaran di era MBKM. Secara khusus penelitian yang dilakukan oleh Ghiffar et al. (2018) telah menerapkan konsep cara belajar aktif, inovatif, dan nyaman yang harus mampu mewujudkan peserta didik sesuai kebutuhan di era industri 4.0.

Demi mencapainya, tujuan pendidikan harus menciptakan peserta didik yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil

berkomunikasi dan berkolaborasi, serta berkarakter (Cahyo, 2017). Oleh karena itu, rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya guru merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan, oleh karena itu guru harus mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Sehingga metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran dalam sistem pendidikan pembelajaran mandiri. Karena antara penguasaan kompetensi literasi baru, sistem pengajaran harus tetap membangun karakter dengan memadukan metode pengajaran konvensional, seperti tatap muka atau yang ditawarkan oleh Wulandari et al. (2019) yaitu Education Mini Klub (EMC) metode sebagai respon dari proses pembelajaran yang monoton.

Blended Learning pada dasarnya merupakan gabungan dari keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual (Yamin & Syahrir, 2020). *Blended learning* merupakan kemudahan belajar yang memadukan berbagai mode penyampaian, model pengajaran, dan gaya belajar, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara guru dan siswa atau siswa. *Blended learning* juga merupakan perpaduan antara pengajaran tatap muka dan pengajaran online, tetapi lebih dari itu sebagai unsur interaksi sosial. *Blended learning* adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari berbagai mode penyampaian, gaya belajar dan mengajar dan ditemukan dalam komunikasi terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adapun keuntungan menggunakan *blended learning* sebagai perpaduan antara pengajaran langsung (tatap muka) dan pengajaran online, dan sebagai unsur interaksi sosial, yaitu: (1) terdapat interaksi antara guru dan siswa/siswa; (2) pengajaran dapat dilakukan secara online atau tatap muka; (3) *blended learning* = menggabungkan modalitas instruksional (atau media penyampaian); (4) *blended learning* = menggabungkan metode pembelajaran (Yamin & Syahrir, 2020).

Keuntungan dari *e-learning* dan *blended learning* di dunia pendidikan saat ini adalah bahwa *e-learning* memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal kapan dan kapan kursus dapat diakses. Guru dan siswa tidak perlu pergi ke sekolah untuk menerapkan pelajaran setelahnya; *e-learning* dapat dilakukan dari mana saja, terlepas dari apakah mereka memiliki akses ke Internet (Waizah & Herwani, 2021). *E-learning* memungkinkan guru dan siswa untuk mengerahkan pengaruh otonom atas pencapaian tujuan pendidikan. Siswa/peserta didik bebas memilih kapan akan memulai, kapan harus menyelesaikan, dan modul mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Jika, setelah beberapa upaya, siswa terus memiliki pertanyaan, dia dapat menghubungi guru melalui email, obrolan, atau dengan bergabung dalam percakapan interaktif pada periode yang ditentukan. Selain itu, Anda dapat melihat hasil pelajaran di papan pesan yang akan dibentuk di LMS (*Learning Management System*) sistem e-learning.

Akibatnya, teknik *Blended Learning* harus beradaptasi dengan perubahan iklim sosial dan budaya sistem pendidikan. Karena jenis pengajaran ini akan sesuai dengan tuntutan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Akan ada reformasi pendidikan sebagai hasil dari teknik *Blended Learning*, di mana metode baru dalam melakukan sesuatu atau perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi tuntutan pendidikan akan diterima. Guru, misalnya, dapat berkontribusi pada pengembangan generasi kompetensi, karakter, keterampilan literasi baru, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Secara santai dengan murid, dan mungkin lebih nyaman dalam sikap hidup, perilaku, pilihan, dan pendekatan untuk semua jenis pengetahuan yang dimotivasi oleh kesenangan.

Ini termasuk menjadi mandiri dan mandiri dalam penggunaan semua media pendidikan. menggabungkan media cetak dan elektronik yaitu buku, modul, dan lembar kerja. Selain media elektronik, seperti presentasi video, audio, dan multimedia, materi cetak tebal atau online dapat digunakan. Media pembelajaran memenuhi tren pendidikan yang diidentifikasi oleh Peter Fisk sebagai periode Revolusi Industri 4.0 dan MBKM. Kemudian, kompetensi utama dalam pembelajaran, khususnya literasi baru, dapat diselesaikan lebih cepat. Selain itu, teknik *Blended Learning* dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan karakter. Selain itu, mengembangkan anak-anak yang pemikir kritis dan pemecah masalah, yang kreatif dan imajinatif, yang dapat berkomunikasi dan bekerja sama, dan yang memiliki karakter. Namun juga dapat mewujudkan anak didik yang antara lain jujur, taqwa, rajin/kerja keras, bertanggung jawab, adil, disiplin, dan toleran. Eksplorasi strategi ini dapat menghasilkan pembentukan sistem pendidikan pembelajaran yang otonom, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

C. Pengembangan Rencana Pelajaran Tunggal Untuk Belajar Gratis

Berdasarkan surat edaran No 14 Tahun 2019 yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mesir Nadiem Makarim, proses penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah disederhanakan. Kebijakan baru tersebut mempertimbangkan konsep efisiensi, efektivitas, dan orientasi mahasiswa dalam pelaksanaannya. Agar dianggap efisien, penulisan RPP harus diselesaikan secara akurat dan dengan waktu dan tenaga yang minimal. Tujuan pembelajaran harus dipenuhi agar pelajaran dianggap efektif. Sebaliknya, fokus pada kebutuhan siswa di kelas disebut sebagai pendekatan "berorientasi siswa". Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah jadwal satu atau lebih pertemuan tatap muka untuk tujuan penerapan strategi pembelajaran. Dari kurikulum tersebut, RPP dibuat dalam rangka membimbing siswa dalam upaya memperoleh kompetensi dasar (KD). Kompetensi Inti (KI) ditetapkan dalam RPP dan dijelaskan dalam silabus. RPP menetapkan teknik dan struktur pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP merupakan instrumen pengajaran yang harus dimiliki oleh pengajar. RPP berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dan ahli materi pelajaran dalam melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Guru biasanya diharapkan untuk mengembangkan rencana pelajaran dengan sangat rinci, yang membutuhkan waktu jauh dari persiapan yang mungkin mereka habiskan untuk tugas-tugas lain. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, terdapat 13 (tiga belas) komponen RPP yang harus dicantumkan dalam pembuatan RPP untuk siswa SD dan SMP. Karena kesederhanaan rencana pelajaran ini, instruktur dapat merancang rencana pelajaran yang efisien, efektif, dan berpusat pada siswa sesuai dengan kriteria ini. Tujuan pembelajar, fase pembelajaran (kegiatan), dan evaluasi adalah semua komponen penting dari rencana pembelajaran yang disederhanakan, sedangkan komponen lainnya hanya mendukung.

- a. Persyaratan belajar siswa dan kurikulum 2013 dipertimbangkan saat menulis Tujuan Pembelajaran. Siswa diminta untuk belajar sesuai dengan keterampilan dasar mereka melalui penggunaan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti, keterampilan dasar, dan indikator yang telah ditetapkan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan pembelajaran.
- b. Kompetensi Dasar dapat dicapai dengan menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang jelas disiapkan untuk membantu siswa mempelajari materi yang mereka butuhkan untuk berhasil. Meskipun demikian, anak-anak didorong untuk berpartisipasi dalam pendidikan mereka dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan merangsang. Siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan kemampuan fisik dan psikologis mereka.
- c. Penilaian Pembelajaran (Assessment) mempertimbangkan indikasi pencapaian kompetensi dan kriteria penilaian, namun dilakukan secara lugas.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya bisa satu halaman di bawah pedoman penyederhanaan RPP ini karena RPP tidak perlu disederhanakan dalam hal jumlah halaman. Format RPP juga dapat dimodifikasi oleh guru sesuai dengan cita-cita efisiensi dan berpusat pada siswa.

D. Inovasi Pembelajaran Daring dalam Merdeka Belajar

Di Indonesia, pembelajaran daring/jarak jauh dikendalikan oleh Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Selama Masa Darurat Penyakit Virus Corona (Covid-19). Pemerintah memberikan kebijakan tentang pendidikan online dalam surat edaran ini.

- a. Pembelajaran online/jarak jauh memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang bermakna tanpa dibatasi oleh kebutuhan untuk memenuhi semua persyaratan kurikuler untuk kenaikan kelas dan kelulusan.
- b. Penekanan pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya di tengah wabah Covid-19. Aktivitas dan tugas belajar siswa dapat bervariasi sesuai dengan minat dan keadaan unik mereka, termasuk kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Penyelenggaraan pembelajaran yang diamanatkan pemerintah sangat bergantung pada kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyiapan sarana dan prasarana pendukung, serta kecerdikan mahasiswa dan dosen. Pemerintah berperan dalam mengembangkan regulasi yang mendorong pendidikan online, termasuk *gadget* digital, koneksi internet yang stabil, dan kuota terjangkau yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan.

Pendidikan online memang membutuhkan infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi yang tersedia baik bagi dosen maupun mahasiswa. *Gadget* sistem pembelajaran digital yang disediakan pemerintah akan sangat bermanfaat dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Kampus yang sudah lama memiliki sistem pembelajaran digital sangat adaptif dalam menerapkan sistem pembelajaran online (Sihombing et al., 2021). Daya cipta dosen sangat dihargai agar memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap informasi yang diajarkan. Dengan menyajikan konten yang menarik, beberapa alat online (zoom, google meet, webex, dll) dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan *gadget* dan internet diyakini disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi siswa dengan memberikan kuota dan keterjangkauan sinyal. Menjamin bahwa pembelajaran itu menyenangkan, bermakna, menumbuhkan kreativitas dan pemikiran kritis, dan memungkinkan siswa menjadi mandiri bukanlah tugas yang mudah. Pemikiran dosen dalam mengembangkan ide dan prosedur yang mendorong mahasiswa untuk tetap semangat belajar patut diperhatikan. Selain itu, inovasi siswa diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti kuota dan sinyal yang terbatas.

E. *Project Based Learning*, Inovasi Model Pembelajaran Merdeka Belajar

Pendekatan pembelajaran kolaboratif, kreatif, dan eksperimental diperlukan untuk memerangi epidemi saat ini. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mandiri. Grant & Jenkins, (2014) menjelaskan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan penelitian mendalam tentang suatu subjek. Siswa terlibat dalam pembelajaran konstruktif dengan menerapkan pendekatan berbasis penelitian untuk masalah dan keprihatinan yang serius, asli, dan relevan. Sedangkan Made Wena (dalam Lestari, 2015) menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah jenis pembelajaran yang memungkinkan pendidik untuk mengontrol pembelajaran di kelas melalui penggunaan pekerjaan proyek. Pekerjaan proyek adalah jenis pekerjaan yang memerlukan tugas rumit berdasarkan masalah dan kesulitan yang sangat sulit. Ini mengajarkan siswa bagaimana membuat, memecahkan masalah, membuat penilaian, melakukan kegiatan investigasi, dan bekerja secara mandiri.

Menurut Rais dalam Lestari (2015), paradigma pembelajaran berbasis proyek terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

Mulailah pembelajaran dengan topik yang menggugah pikiran (*the driving question*), yang dapat digunakan untuk menugaskan siswa untuk melakukan suatu kegiatan. Tema yang dipilih harus sesuai dengan realitas dunia nyata dan harus dimulai dengan pemeriksaan mendalam.

1. Perencanaan proyek (*design a plan for the project*). Dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam perencanaan. Akibatnya, siswa diharapkan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Aturan permainan, pemilihan kegiatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan pertanyaan kritis dengan mengintegrasikan berbagai tema pendukung, dan menginformasikan peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek semuanya termasuk dalam perencanaan.
2. Buat jadwal kegiatan (*create a schedule*). Pendidik dan peserta didik berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menyelesaikan tugas. Batas waktu untuk menyelesaikan tugas harus ditentukan, dan siswa harus diajari bagaimana mengatur waktu mereka secara efektif. Biarkan siswa bereksperimen dengan konsep baru, tetapi guru harus terus mengingatkan siswa jika tindakan mereka menyimpang dari tujuan proyek. Karena proyek yang dipimpin siswa membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, pendidik mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok di luar jam sekolah.
3. Mengelola proyek (memantau siswa dan kemajuan proyek). Guru bertanggung jawab untuk memantau tindakan siswa saat mereka menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan mengikutsertakan siswa dalam semua proses. Pendidik, dengan kata lain, berfungsi sebagai pembimbing bagi kegiatan siswa. Pendidik mengajar murid bagaimana berkolaborasi secara efektif. Setiap siswa bebas memilih perannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan kelompoknya.
4. Evaluasi produk akhir (menilai hasil). Penilaian digunakan untuk membantu pendidik dalam menentukan apakah siswa telah memenuhi persyaratan, untuk membantu pendidik dalam menilai perkembangan setiap siswa, untuk menawarkan umpan balik pada tingkat pengetahuan yang dicapai oleh siswa, dan untuk mendukung pendidik dalam mengembangkan rencana pembelajaran berikutnya.
5. Evaluasi produk terjadi ketika setiap kelompok menyerahkan barang-barang mereka secara bergiliran ke kelompok lain.
6. Asesment (mengevaluasi pengalaman). Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa merefleksikan kegiatan dan hasil proyek. Individu atau kelompok berpartisipasi dalam proses refleksi. Siswa diundang untuk mengomunikasikan pemikiran dan pengalaman mereka saat mereka mengerjakan proyek pada tahap ini.

Pengalaman dan kompetensi belajar siswa dapat digambarkan dengan menghubungkan jalur pembelajaran (*learning path*) dari model pembelajaran pembelajaran berbasis proyek, khususnya empat C: kreatif (*thinking creative*),

kolaboratif (collaborating), komunikatif (communicating), dan kritis (critical thinking), dan IQ adalah taqwa yang berwawasan ilmiah, yaitu 5M: Mengamati, Mengasosiasi, Mencoba, Mendiskusikan, dan Mengkomunikasikan (Nehru, 2019).

Pengalaman belajar siswa antara lain diminta untuk peduli terhadap masalah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kepekaan lingkungan, belajar mencari pertanyaan-pertanyaan vital, dan siswa berlatih berpikir logis, kritis, dan kreatif (Tohir, 2020). detail, yang memerlukan pemikiran tentang spesifik pekerjaan yang akan dilakukan, pemikiran asosiatif, yang memerlukan menghubungkan satu bagian dari pekerjaan ke yang lain, berpikir tentang urutan waktu, dan mengembangkan kemampuan untuk membagi tugas.

Penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek era Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem manajemen waktu. Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas akan ditentukan oleh keterampilan manajemen waktu mereka. Tugas yang ditawarkan kepada siswa harus bersifat kuantitatif, dan ada batasan waktu untuk prosedur tugas dan penyelesaian tugas. Fleksibilitas waktu belajar mandiri dapat diciptakan dan disepakati bersama antara mahasiswa dan dosen/siswa dan guru untuk memungkinkan mahasiswa mengatur waktu belajar mereka secara konsisten. Siswa yang tidak terbiasa belajar sendiri terkadang menyelesaikan tugas pada menit terakhir untuk memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Akibatnya, siswa yang terdaftar di pendidikan jarak jauh harus mengembangkan kebiasaan belajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
2. Mengumpulkan teknologi yang diperlukan. Siswa harus memahami peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena tidak semua institusi menyediakan layanan pembelajaran online yang sesuai, banyak platform pembelajaran online dapat digunakan sebagai pengganti. Demikian pula, peralatan teknologi seperti PC, perangkat pintar, atau laptop sangat penting, seperti koneksi internet yang stabil.
3. Ambil studi yang serius. Ketika datang ke pembelajaran jarak jauh, siswa sering membuat kesalahan dengan kehilangan konsentrasi. Ada beberapa gangguan yang mengganggu proses pembelajaran saat menggunakan internet (Ilmi et al., 2021). Dorongan untuk melihat video secara impulsif, mengakses media sosial, dan membaca artikel berita sering terjadi tanpa pemikiran sebelumnya. Akibatnya, sangat penting bagi siswa untuk menjaga perhatian dan konsistensi selama waktu belajar yang diberikan. Hindari segala jenis gangguan yang dapat mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, jauhkan area belajar Anda dari gangguan anggota keluarga lainnya.
4. Berkomunikasi dengan baik dengan dosen dan rekan sejawat. Mereka yang tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh harus menyesuaikan diri untuk menjaga

visibilitas dan berinteraksi secara efektif dengan guru atau siswa lain (Winata, 2021). Jika perlu, kelompok terpisah harus dibentuk untuk membahas tugas yang ditentukan guru. Meskipun komunikasi tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun komunikasi tersebut harus dilakukan jauh-jauh hari untuk mencegah kesalahpahaman. Manfaatkan peluang ini untuk mengembangkan kemampuan komunikasi online (Kholili & Rokhman, 2021). Jika siswa tidak yakin dengan hasil pekerjaannya, mereka segera mendekati guru. Lakukan segera untuk menunjukkan dedikasi kita dalam belajar. Meskipun banyak siswa menemukan pembelajaran jarak jauh menantang pada awalnya, setelah mereka terbiasa, mereka menemukan bahwa itu benar-benar memberi mereka lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas daripada kegiatan belajar mengajar di kelas tradisional. Di tengah meluasnya wabah Covid-19, pembelajaran online semacam ini sebenarnya bisa menjadi pengganti yang layak untuk sesi kelas atau pengajaran tatap muka.

Daftar Referensi

- Cahyo, E. D. (2017). Pendidikan karakter guna menanggulangi dekadensi moral yang terjadi pada siswa sekolah dasar. *EduHumaniora/ Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9(1), 16–26.
- Ghiffar, M. A. N., Nurisma, E., Kurniasih, C., & Bhakti, C. P. (2018). Model pembelajaran berbasis blended learning dalam meningkatkan critical thinking skills untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional STKIP Andi Matappa Pangkep*, 1(1), 85–94.
- Grant, M. S., & Jenkins, L. S. (2014). Communication education for pre-licensure nursing students: literature review 2002–2013. *Nurse Education Today*, 34(11), 1375–1381.
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., & Hanafie, A. A. (2021). The Basic Concepts of Evaluation and Its Implementation in IRE Lessons in The Pandemic Era. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 175–190.
- Kholili, A., & Rokhman, M. (2021). Pengaruh Manajemen Pembelajaran Online Terhadap Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah. *Review of Islamic Education*, 1(1), 25–34.
- Lestari, I. (2015). Pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2).
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen*. Bintang Visitama Publisher.
- Nehru, N. A. (2019). Asesmen Kompetensi Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional Pendidikan Indonesia: Analisis Dampak dan Problem Solving Menurut Kebijakan Merdeka Belajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Risdianto, E. (2019). *Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Sihombing, A. A., Anugrahsari, S., Parlina, N., & Kusumastuti, Y. S. (2021). Merdeka Belajar in an Online Learning during The Covid-19 Outbreak: Concept and

- Implementation. *Asian Journal of University Education*, 17(4), 35–48.
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Waizah, N., & Herwani, H. (2021). Penilaian Pengetahuan Tertulis Dalam Kurikulum 2013. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 207–228.
- Winata, I. K. (2021). Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 13.
- Wulandari, A., Handayani, P., & Prasetyo, D. R. (2019). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis EMC (Education Mini Club) sebagai Solusi Menghadapi Tantangan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *THABIEA: JOURNAL OF NATURAL SCIENCE TEACHING*, 2(1), 51–56.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1).

Bab VI

Manajemen Pembiayaan di Era Merdeka Belajar

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Keuangan dalam pendidikan erat kaitannya dengan konsep ekonomi pendidikan, yang pada dasarnya adalah tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter, terutama melalui pendidikan formal di bidang pendidikan pada periode waktu tertentu dalam masyarakat (Ferdin, 2013). Pembiayaan memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dalam proses pendidikan. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa anggaran negara dan daerah mengalokasikan 20% dari pendapatan dan belanjanya untuk pendidikan guna menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan misinya, yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan. Adanya mekanisme ini memastikan bahwa uang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan (Sumarsono et al., 2016).

Sebagai sarana untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan bangsa terpenuhi, adalah penting untuk memiliki anggaran yang dikelola dengan baik (Morgan & Prowle, 2004). Mengelola pengeluaran, atau "manajemen keuangan", membutuhkan sedikit strategi, pelaksanaan, dan pemantauan. Ada dua jenis biaya dalam pendidikan: langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi pembelian bahan-bahan pendidikan, biaya fasilitas, biaya transportasi, gaji guru yang dibayarkan oleh pemerintah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Biaya tidak langsung merupakan akibat dari hilangnya keuntungan dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa.

Anggaran pendapatan dan anggaran belanja saling terkait dalam anggaran pendidikan dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan (Nafisah & Widiyanto, 2017). Anggaran penerimaan adalah jumlah uang yang diterima sekolah setiap tahun dari sumber resmi yang berbeda dan secara teratur, seperti hibah dan beasiswa. Anggaran belanja dasar adalah jumlah uang yang dikeluarkan setiap tahun untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Komponen memiliki peran besar dalam menentukan berapa banyak yang dibelanjakan sekolah, dan jumlah serta persentase masing-masing bervariasi dari sekolah ke sekolah dan dari waktu ke waktu. Kesejahteraan pegawai, administrasi, bimbingan teknis pendidikan, dan pendataan semuanya termasuk dalam daftar kategori biaya sekolah pendekatan elemen biaya. Termasuk di dalamnya biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelajaran dan administrasi pelajaran-pelajaran tersebut serta biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan prasarana sekolah.

Seluruh biaya pendidikan (biaya total) dan biaya satuan per siswa merupakan pertimbangan kritis dalam gagasan pembiayaan pendidikan dasar (biaya satuan). Jumlah semua pengeluaran pendidikan tingkat sekolah, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang dikeluarkan selama satu tahun ajaran disebut sebagai "biaya satuan". Ukuran berapa banyak uang yang dicurahkan sekolah untuk siswa dalam mengejar pendidikan mereka dihitung dengan menggunakan biaya

per unit siswa. Pengertian penganggaran dan dampaknya terhadap pembiayaan pendidikan merupakan konsep dasar pembiayaan pendidikan.

Ini mencakup penganggaran, pembukuan, dan audit, yang semuanya berada di bawah payung penganggaran (*auditing*). Rencana operasional dinyatakan secara kuantitatif sebagai satuan uang dalam operasi penganggaran dan berfungsi sebagai petunjuk untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, anggaran menjabarkan tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi tertentu. Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, penganggaran adalah langkah yang bermanfaat. Setiap kepala unit wajib mengikuti kegiatan ini.

Secara umum, penganggaran adalah diskusi atau negosiasi/kesepakatan antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah dalam menetapkan besaran anggaran yang dialokasikan. Pada akhirnya, setiap sumber pendanaan diharuskan memberikan ringkasan perkiraan biaya dan pendapatan. Ada dua aspek dalam operasi akuntansi, yang *pertama* adalah kekuatan untuk memutuskan kebijakan penerimaan atau pengeluaran uang. *Kedua*, penerimaan, penyimpanan, dan pencairan dana adalah semua aspek manajemen tingkat kedua. Administrasi bendahara tidak termasuk kekuasaan pengambilan keputusan; melainkan berfokus pada implementasi. *Ketika*, negara mempercayakan seseorang atau sesuatu untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga yang termasuk dalam pasal 55 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*), orang atau badan tersebut mempunyai kewajiban atau tanggung jawab atas apa yang menjadi usahanya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama operasi inspeksi, bendahara bertanggung jawab atas semua uang yang dia terima, simpan, dan transfer ke pihak yang berwenang. BPK harus diberitahu tentang pelanggaran kebijakan ini oleh unit di dalam departemen.

Ada empat penerima manfaat utama dari audit: bendahara yang bersangkutan, lembaga, pengawasnya, dan organisasi audit keuangan itu sendiri. Bendahara mendapat manfaat dari memiliki pemahaman yang jelas tentang arah dan batasan waktu, serta mampu menilai tingkat keterampilan mereka sendiri dan memahami ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Bagi institusi yang terlibat, keuntungannya antara lain memiliki struktur kepemimpinan yang terbuka, memperjelas batas-batas kekuasaan dan akuntabilitas antar pejabat, mencegah saling tidak percaya, dan memiliki perintah yang jelas untuk penggunaan uang yang diterima. Sebagai manfaat bagi manajemen, audit dapat memberikan informasi seberapa baik anggaran saat ini telah dilaksanakan, sejauh mana kemajuannya dan hambatan apa yang masih ada untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Mereka juga dapat memberikan informasi tentang seberapa baik anggaran saat ini telah dikumpulkan, disimpan, dan dibelanjakan, seberapa akurat akuntansinya, dan berapa banyak biaya aktivitas tahunan yang lalu dapat dihitung sebagai umpan balik. Lembaga audit keuangan, di sisi lain, menuai keuntungan dari audit berupa tolok ukur yang jelas dan landasan yang kuat untuk mengambil tindakan jika terjadi kecurangan (R. N. Anwar, 2021).

Pengertian mendasar kedua dari pembiayaan pendidikan adalah pengaruh variabel eksternal dan internal terhadap pembiayaan pendidikan. Variabel di luar sistem pendidikan, seperti pertumbuhan demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, ekspektasi pendidikan, dan inflasi merupakan contoh faktor eksternal. Sejumlah negara

yang pada awalnya dijajah oleh negara lain untuk mendorong keinginan warganya akan pendidikan telah dibebaskan dari kendali penjajah, memungkinkan mereka untuk mengejar tujuan pendidikan mereka sendiri.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (10) dan (11), secara tegas mendefinisikan Demonstrasi Pendidikan (2). Karena demokrasi itu ada, pemerintah dituntut untuk membiayainya secara memadai. Adalah demi kepentingan terbaik negara secara keseluruhan untuk memungkinkan penduduknya melanjutkan pendidikan, karena ini akan memungkinkan bangsa untuk tumbuh dan makmur di masa depan. Padahal tujuan ini dapat dicapai dengan menyediakan fasilitas seperti pembiayaan besar-besaran untuk membangun dan peralatannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan biaya kuliah serta sistem pengumpulan dan pembayaran beasiswa, peningkatan gaji pengajar, dll semakin banyak orang yang mencari pendidikan, begitu pula keinginan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terlihat dari semakin banyak orang yang mencari gelar sarjana.

Peningkatan permintaan tersebut meningkatkan kualitas hidup suatu negara secara keseluruhan dan meningkatkan taraf hidup warganya (C. Anwar et al., 2018). Akan selalu ada kebutuhan akan pendidikan internasional di negara-negara dengan sistem pendidikan yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, mungkin saja terjadi perpindahan orang dari negara terbelakang ke negara industri. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik yang menarik minat mereka, banyak individu dari negara-negara industri belajar di luar negeri (Destiana et al., 2016). Sedangkan depresiasi mata uang suatu negara merupakan tanda terjadinya inflasi. Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya pendidikan karena menaikkan harga satuan barang dan jasa.

Tujuan, metode, dan materi merupakan contoh elemen internal yang mempengaruhi pendidikan (Abidin, 2017). Biaya pendidikan dapat dipengaruhi oleh tujuan pendidikan, seperti tujuan pendidikan lembaga, sebagai salah satu contohnya (Rahmanto, 2019). Menyesuaikan tujuan pendidikan untuk fokus pada penguasaan 10 keterampilan daripada mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan siswa untuk mendapatkan pendidikan. Untuk melaksanakan taktik pengajaran dan pembelajaran yang efektif, lokakarya dan praktik laboratorium harus dilaksanakan, yang memerlukan investasi waktu dan uang yang lebih besar daripada metode dan pendekatan lain. Praktik lokakarya atau materi pelajaran yang membutuhkan penyajian konten membutuhkan biaya yang lebih besar daripada materi yang baru saja disampaikan. Dari segi jumlah siswa, lama waktu belajar, keragaman materi pelajaran, metode dan materi pengajaran, jumlah guru, kualitas dan harapan terhadap kompetensi lulusan serta kondisi keuangan pribadi mereka, biaya sekolah dasar jauh lebih murah daripada biaya kuliah (Arnanda & Murniati, 2019).

B. Manajemen Pembiayaan Merdeka Belajar

Pembelajaran yang merdeka baru-baru ini diumumkan sebagai strategi signifikan untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan di Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Mastuti et al., 2020). Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa siswa harus diizinkan untuk mengeksplorasi dan menemukan keterampilan dan

kemampuan laten mereka, daripada dibatasi oleh batasan kaku yang membatasi kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan kritis. Sistem pendidikan Indonesia diharapkan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa depan dengan menjadi lebih canggih dan berkualitas tinggi sebagai hasil dari kebebasan dan kemerdekaan yang baru ditemukan.

Peraturan Penerimaan Siswa Baru dan Asesmen Nasional adalah dua dari empat komponen filosofi belajar mandiri Nadiem Makarim. Untuk itu, pihaknya juga telah menjadwalkan AN tahun 2020 yang akan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Portofolio dan tugas siswa, serta tes, semuanya diperhitungkan dalam evaluasi validitas ujian. Selain itu, dana AN akan digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah dan pengembangan kapasitas guru.

Kampus Merdeka merupakan langkah selanjutnya dalam penerapan kebijakan belajar mandiri, yang memungkinkan mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di jurusan lain, bahkan di institusi lain, selama tiga semester. Satu semester dapat dihabiskan di jurusan lain, dan dua semester dapat dihabiskan di universitas lain. Telah terbukti bahwa strategi ini dapat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep di luar lingkup program gelar individu mereka. Mahasiswa yang menyelesaikan program ini dinilai lebih siap menghadapi masalah kompetensi kerja. Karena metode UKT begitu banyak digunakan, banyak akademisi dan pengelola pendidikan tinggi yang khawatir tentang apakah kurikulum 3 semester cukup untuk mempersiapkan siswa atau bagaimana program akan dilaksanakan dan didanai. Tampaknya mayoritas kampus siap mendukung inisiatif Kampus Merdeka (Aeni, 2021). Namun, harapannya pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan program tersebut (Tohir, 2020).

Kampus Merdeka memiliki empat program. Pertama dan terpenting, PT dengan tingkat akreditasi A atau B akan memiliki keuntungan untuk dapat segera meluncurkan program studi baru. Sebagai hasil dari tantangan ini, mereka harus mampu menghadapi perusahaan paling bergengsi di dunia, organisasi nirlaba, dan 100 PT teratas lainnya, menurut Quacquarelli Symonds (QS). Akreditasi juga tersedia untuk PT, yang merupakan bantuan besar. Mereka harus, bagaimanapun, juga memenuhi tantangan untuk mengikuti praktik terbaik di seluruh dunia agar dapat diakui secara luas sebagai layak. Produksi sumber daya manusia kelas dunia oleh PT didukung dan dijamin oleh PT itu sendiri. Memang benar perguruan tinggi negeri diberikan pilihan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), namun juga harus cepat masuk 500 besar pemeringkatan edisi QS. Selain itu, perguruan tinggi dihimbau untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswanya untuk mengambil kuliah tiga semester di luar kurikulum regulernya. Rencana aksi program meminta perguruan tinggi lebih terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain dan dunia usaha, atau yang disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai "nikah massal".

Dengan kata lain, strategi Kampus Merdeka merupakan upaya untuk meningkatkan standar akademik agar lebih mampu bersaing di pasar global. Ketika lingkungan World Class University (WCU) terbentuk, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Satuan kerja (satker), BLU, dan BH adalah semua status yang dapat diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam jaringan PTN. PTNBH di Indonesia saat ini hanya ada 11,

memungkinkan untuk membangun ekosistem WCU di sana. Hubungan yang fleksibel dengan industri, otonomi pengelolaan dana, kebebasan mempekerjakan sivitas akademika dan tenaga kependidikan non-PNS serta kepemilikan aset yang utuh merupakan beberapa keunggulan PTNBH dibandingkan PTN BLU dan satker PTN dalam hal fleksibilitas dalam mengembangkan fasilitas akademik dan nonakademik (Jannah & Junaidi, 2020). Namun, PTNBH masih terkendala oleh sumber daya keuangannya. Untuk menjadi kampus kelas dunia, kita membutuhkan banyak uang. PTNBH sangat menjunjung tinggi gagasan penggunaan aset wakaf untuk membiayai operasional lembaga pendidikan tinggi. Pendapatan yang diperoleh dari dana abadi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan tetap menjaga nilai pokok aset untuk ketahanan finansial jangka panjang PT.

Semua ingin agar perguruan tinggi berstatus PTNBH dapat berhubungan langsung dengan institusi kelas dunia seperti MIT, Stanford University, Harvard University, dan institusi kelas dunia lainnya. Dalam hal peringkat global, MIT adalah yang pertama, menurut QS World University Ranking 2020, dengan skor sempurna 100%. Dengan skor 98,4, Universitas Stanford adalah sekolah terbaik kedua, diikuti oleh Universitas Harvard dengan skor 97,4. Sementara itu, tiga PTNBH Indonesia masuk dalam 500 besar, yakni UI, UGM, dan ITB. Agar PTNBH masuk dalam daftar 500 besar universitas terbaik dunia, syarat ini harus dipenuhi. Tentu saja, individu yang telah masuk harus terus berupaya untuk naik peringkat. Tidak mungkin bagi institusi mana pun untuk mencapai status WCU tanpa dukungan keuangan yang diberikan oleh dana abadi.

Untuk mencapai tujuan menjadi WCU, kita akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk melakukan banyak penelitian dan pengembangan yang inovatif. Penyediaan fasilitas tingkat dunia termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama dan fasilitas pendukung lainnya juga penting. Kendaraan dan kapal otonom, misalnya, kini sedang diteliti dan dikembangkan ITS. PTNBH sekarang mempromosikan penggalangan dana abadi secara menyeluruh. Jumlah pembelian, di sisi lain, tetap jauh di bawah lembaga-lembaga terkenal ini. Karena itu, kita harus membuat rencana untuk memaksimalkan hasil investasi wakaf sehingga dapat menutupi sepertiga dari biaya operasional PTNBH. Hibah yang unik untuk PTNBH, bukan hanya bantuan operasional, harus dipertimbangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berharap kemandirian finansial kampus PTNBH akan didorong oleh rencana ini.

Belakangan ini Kemendikbud RI berupaya meningkatkan keleluasaan dan otonomi kepala sekolah dalam pemanfaatan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Konferensi pers resmi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani digunakan untuk mengumumkan paket kebijakan baru yang bertujuan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan daya saing daerah di Indonesia. Menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2020, paket kebijakan terdiri dari empat aspek dasar. Distribusi BOS langsung ke rekening sekolah menjadi prioritas utama, diikuti dengan penggunaan BOS yang lebih dapat disesuaikan untuk sekolah, peningkatan nilai unit BOS, dan pengetatan pelaporan BOS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Sekolah mendapatkan dukungan biaya operasional melalui dana alokasi

khusus non fisik yang dikenal dengan dana BOS (DAK). Dengan memindahkan uang tunai langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah, proses penyaluran dana BOS dipercepat. Pembayarannya sebelumnya ditangani oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dari tahap distribusi empat kali setahun, sekarang dilakukan tiga kali setahun. Banyaknya keluhan mengenai keterlambatan pencairan dana BOS, yang mengakibatkan banyak kepala sekolah harus membayar biaya operasional sekolah sambil menunggu dana BOS dicairkan, menurut Mendikbud. Uang BOS adalah fitur kedua dari pendekatan ini. Kondisi di masing-masing institusi berbeda-beda. Sekolah di Jakarta dan Nusa Tenggara dan Papua, sebaliknya, akan memiliki tuntutan yang cukup berbeda, menurut Mendikbud RI. Dengan kebijakan ini, uang BOS sekarang dapat digunakan secara lebih fleksibel, termasuk mendukung guru honorer dan tenaga kependidikan lainnya maksimal 50%.

Jumlah pembelian maksimum BOS Buku juga tidak lagi dibatasi. Harga BOS per siswa naik, yang membawa kita pada argumen ketiga kita. Naik menjadi 900.000 per siswa di SD (meningkat 13 persen), 1.100.000 per siswa di SMP (meningkat 10 persen), dan 1.500.000 per siswa di SMA (meningkat 7 persen). Namun, nilai untuk SMK dan pendidikan luar biasa tetap tidak berubah karena hanya meningkat pada tahun 2019. Peningkatan tanggung jawab penggunaan BOS oleh sekolah adalah elemen terakhir dalam daftar ini di papan informasi sekolah atau area lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat diharapkan bisa memposkan penerimaan dan penggunaan uang BOS mulai tahun 2020, dimana semua sekolah wajib mengungkapkan penggunaan dana BOS melalui bos.kemdikbud.go. Untuk menyempurnakan regulasi pembiayaan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki opsi untuk mengaudit penggunaan BOS (Mustapa et al., 2021).

Daftar Referensi

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Aeni, N. (2021). *MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA*. OSF Preprints.
- Anwar, C., Saregar, A., Hasanah, U., & Widayanti, W. (2018). The effectiveness of islamic religious education in the universities: The effects on the students' characters in the era of industry 4.0. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 3(1), 77–87.
- Anwar, R. N. (2021). Pelaksanaan kampus mengajar angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 210–219.
- Arnanda, S., & Murniati, N. U. (2019). *Jurnal Pendidikan Progresif*. *Pendidikan Progresif*, 8(2), 53–67.
- Destiana, A., Suryatman, D., & Setiowati, N. E. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul dalam Menunjang Pendidikan Formal di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. *Jurnal Edueksos*, 1, 55–63.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.

- Jannah, M., & Junaidi, J. (2020). Faktor Penghambat Guru sebagai Fasilitator dalam Pembelajaran Sosiologi di SMAN 2 Batusangkar. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 191–198.
- Mastuti, R., Maulana, S., Iqbal, M., Faried, A. I., Arpan, A., Hasibuan, A. F. H., Wirapraja, A., Saputra, D. H., Sugianto, S., & Jamaludin, J. (2020). *Teaching from home: Dari belajar merdeka menuju merdeka belajar*. Yayasan Kita Menulis.
- Morgan, E., & Prowle, M. (2004). *Financial management and control in higher education*. Routledge.
- Mustapa, M., Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal, S. (2021). ANALYSIS OF BOS FUND MANAGEMENT BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT SMA NEGERI 2 SUNGAI LIMAU. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 1(2), 121–131.
- Nafisah, D., & Widiyanto, W. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 788–797.
- Rahmanto, S. (2019). *MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH*. Pascasarjana Doctor.
- Sumarsono, R. B., Imron, A., Wiyono, B. B., & Arifin, I. (2016). Parents' Participation in Improving the Quality of Elementary School in the City of Malang, East Java, Indonesia. *International Education Studies*, 9(10), 256–262.
- Tohir, M. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.

Bab VII

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Merdeka Belajar

A. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen adalah tindakan mengatur, mengarahkan, dan mengatur kerja organisasi di semua bidangnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seperti yang dijelaskan oleh (Fatah, 2014). Salah satu domain dari manajemen umum, sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi dan pengaturan. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah kumpulan sistematis pengalaman dan temuan penelitian di bidang sumber daya manusia (SDM) karena mereka lebih penting dalam mencapai tujuan. Pengetahuan manajerial mengacu pada kemampuan untuk menangani (mengelola) sumber daya manusia secara sistematis (Almasri, 2016).

Menurut Mangkunegara, untuk memenuhi tujuan organisasi, manajemen sumber daya manusia melibatkan penyusunan strategi tentang bagaimana menemukan, mempekerjakan, melatih, mempertahankan, dan memecat karyawan (Ansharuddin et al., 2021). Soekidjo Notoatmadjo berpendapat bahwa dengan kata lain, manajemen SDM atau Manajemen Personalia adalah pemahaman bahwa institusi perlu mempekerjakan sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk memenuhi tujuan organisasi (Notoatmodjo, 1992). Mathi dan Jackson mengatakan demikian, Proses formal di dalam suatu organisasi dirancang untuk menjamin bahwa potensi manusia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Ansharuddin et al., 2021).

Berdasarkan analisis dan pasokan warga sekolah, perencanaan sumber daya manusia di sekolah merupakan metode untuk memperkirakan kebutuhan staf di masa depan (Cahyo, 2017). Peningkatan kualitas sekolah dapat dicapai melalui penggunaan teknik manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan staf, pemilihan staf untuk peran tertentu, instruksi, evaluasi hasil kerja, kesejahteraan karyawan (kompensasi), dan pemecatan. *Human Resource Manager* di sekolah sangat penting untuk memaksimalkan personel sekolah dan, sebagai hasilnya, untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang seefisien mungkin (Daryono et al., 2021).

B. Aspek-aspek dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia, menurut Wijoyo et al. (2020), meliputi hal-hal sebagai berikut:

2. Persiapan. Perencanaan SDM adalah proses memastikan bahwa persyaratan institusi terpenuhi sekaligus membantu pencapaian tujuannya. Menetapkan rencana personalia merupakan bagian penting dari perencanaan strategis.
3. Penyusunan sistem. Pengorganisasian adalah proses penetapan pembagian kerja, hubungan antar pribadi, pengalihan wewenang, dan faktor-faktor lain dalam struktur organisasi, semuanya dalam rangka mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua insan perusahaan dengan lebih baik. Sementara organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, itu akan membantu keberhasilan pemenuhannya jika dipelihara dengan baik.

4. Bertanggung jawab. Semua pekerja harus diarahkan untuk bekerja dengan sukses dan efisien untuk memenuhi tujuan perusahaan, karyawan itu sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan (Farhan et al., 2021). Arahan seorang pemimpin dilakukan melalui pendelegasian tugas kepada bawahan dan memastikan bahwa tugas tersebut diselesaikan dengan benar.
5. Pengendalian adalah proses pemantauan dan penegakan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan oleh semua personel. Tindakan korektif dan penyempurnaan rencana diambil jika ada penyimpangan atau kekurangan dalam rencana. Kehadiran, disiplin, perilaku, kerjasama, pelaksanaan tugas, dan status lingkungan kerja adalah semua aspek pengendalian karyawan.
6. Langkah kelima adalah pengadaan. Ketika sebuah institusi mencari untuk merekrut personel baru, pengadaan adalah proses yang mencakup langkah-langkah berikut: seleksi, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi (Awanda et al., 2018). Tujuan tersebut dapat tercapai jika pengadaan dilakukan dengan benar.
7. Inisiasi Pengembangan. Pengembangan Personil melibatkan pemberian kesempatan kepada mereka untuk belajar dan tumbuh di semua bidang kehidupan kerja mereka. Untuk memenuhi tuntutan lapangan kerja saat ini dan yang akan datang, pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
8. Sebagai akibatnya, pembayaran langsung dan tidak langsung diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang atau komoditas sebagai imbalan atas pekerjaan mereka untuk perusahaan. Pembalasan yang adil sesuai dengan hukum (Darmastuti, 2014). Berdasarkan upah minimum pemerintah dan konsistensi internal dan eksternal, keadilan didefinisikan sebagai kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan kelayakan didefinisikan sebagai kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Pemahaman dan Penggabungan. Untuk menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling produktif, perusahaan dan pekerjanya harus memadukan kepentingan dan kebutuhannya. Perusahaan menghasilkan uang, dan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka berkat pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam HRM, integrasi sangat penting karena menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan.
10. Menjaga Bisnis Kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan harus dipertahankan atau ditingkatkan agar dapat terus bekerja sama sampai pensiun. Untuk menjaga agar semuanya berjalan lancar, diperlukan program kesejahteraan yang didasarkan pada kebutuhan mayoritas pekerja dan diarahkan oleh konsistensi internal dan eksternal untuk pemeliharaan yang efektif.
11. Hukuman dan Disiplin. Untuk mencapai tujuan yang maksimal, diperlukan disiplin yang tinggi, yang merupakan fungsi SDM yang paling krusial. Ini adalah tindakan dan kesadaran untuk mengikuti aturan perusahaan dan standar masyarakat, yang disebut disiplin.

Jika berbicara tentang sumber daya manusia (SDM), istilah “manajemen umum” lebih tepat menurut (Rivai & Jauvani, 2009). Berikut ini adalah contoh tanggung jawab

SDM dan manajemen umum: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian adalah contoh dari fungsi manajemen.

Kemudian, rekrutmen dan seleksi Sumber Daya Manusia suatu organisasi adalah suatu teknik atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan menarik calon personel. Upaya rekrutmen suatu perusahaan bertujuan untuk mempengaruhi tiga variabel: jumlah pelamar, jenis pelamar, dan kemungkinan mereka yang melamar akan menerima tawaran pekerjaan jika ada. Program rekrutmen organisasi dirancang untuk menjamin bahwa organisasi memiliki kandidat yang cukup kompeten (yang mampu memperoleh posisi yang sesuai) untuk dipilih ketika ada kebutuhan akan lebih banyak anggota staf (Noe et al., 2017).

Sekolah, seperti halnya bisnis, membutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk membantu menjalankan perusahaan sebagai sumber daya manusia. Pendidik atau guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan utama dari proses perekrutan adalah untuk menemukan pendidik yang mampu, profesional, dan berdedikasi untuk memberikan tingkat pengajaran tertinggi untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan (Destiana et al., 2016).

Akibatnya, sekolah didesak untuk memperhatikan kualitas guru baru yang mereka bawa dalam proses perekrutan. Guru yang direkrut harus memiliki kompas moral yang baik dan etos kerja yang kuat. Ada beberapa cara untuk menentukannya, seperti dengan melihat tingkat pendidikan pelamar, IQ, pengalaman, dan lainnya. Untuk memaksimalkan potensi dan bakat orang-orang yang terpilih, hasil dari proses seleksi ini selanjutnya dimanfaatkan dengan cara lain. Klasifikasi SDM secara umum pada lembaga pendidikan antara lain (Rahmawati et al., 2021): Ada berbagai orang yang bekerja di fasilitas pendidikan, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan anggota staf pendukung lainnya. Kemudian, personil yang menangani masalah administrasi atau manajemen di tempat kerja atau di kelas (Ambarwati et al., 2015).

C. Manajemen SDM dalam Era Merdeka Belajar

Meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan suatu bangsa merupakan tujuan utama pendidikan di setiap peradaban. Kemampuan masyarakat untuk bersaing dalam lingkungan yang kompetitif dapat ditingkatkan melalui pendidikan (Bayu & Habibah, 2017). Untuk meningkatkan kehidupan orang lain, seseorang harus berusaha untuk mendidik dirinya sendiri. Pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai cara, baik secara formal maupun tidak resmi. Sebagai aturan umum, pendidikan formal harus berlangsung di sekolah. Pendidikan Indonesia merupakan isu utama, bahkan telah dituangkan dalam undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah bahwa mengajar negara adalah kewajiban negara.

Humanisasi siswa merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari esensi pendidikan itu sendiri. Budaya merekalah yang mewujudkan pribadi manusia yang kreatif. Manusia dibesarkan dan dibina dalam batas-batas budaya mereka sendiri, di mana mereka secara aktif berpartisipasi dalam penciptaan dan rekonstruksi (Tilaar, 2004).

Mengubah cara pandang kita tentang pendidikan dari sudut pandang progresivis sangat penting jika kita ingin mencapai "Merdeka Belajar" seperti yang dideklarasikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Alasan untuk ini adalah karena progresivisme adalah aliran teori pendidikan yang menganggap orang memiliki keterampilan yang unik dan luar biasa dan dapat mengatasi berbagai kesulitan yang mengancam manusia itu sendiri. Kritik utama pendidikan otoriter adalah bahwa hal itu merusak pengembangan potensi manusia dalam proses pendidikan. Akibatnya, dalam pendidikan, setiap komponen dipandang sebagai kekuatan pendorong untuk kemajuan masa depan. Harus ada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sudah ada untuk membuat kemajuan dalam pandangan dunia yang progresif, karena hanya mengakui konsep, teori, dan cita-cita sebagai objek (makhluk) nyata tidak cukup (Ansari & Saleh, 2019).

Penting untuk dicatat bahwa ada empat aspek utama dalam kebijakan pembelajaran mandiri: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2) Ujian Nasional (UN), dan 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Maula, 2021). Pengorganisasian rangkaian kegiatan pembelajaran dalam konteks pembelajaran mandiri adalah masalah yang paling signifikan untuk dibahas di sini. Pilihan yang digunakan adalah penyediaan model kegiatan dari setiap tahap pembelajaran. Pembelajaran mandiri hanya dapat didukung oleh RPP yang menganut pengertian belajar mandiri. Siswa dan proses pembelajaran bukan satu-satunya yang diuntungkan dari RPP pada pembelajaran mandiri.

Untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa di kelas, penulisan RPP dilakukan dengan cara yang tidak membutuhkan banyak waktu atau tenaga, sesuai dengan penulisan RPP. Sehubungan dengan aturan ini. RPP yang sudah dibuat dapat digunakan oleh guru kedepannya. Pendidik juga dapat mengubah struktur RPP sesuai dengan cita-cita efektivitas, efisiensi, dan fokus pada siswa (Maula, 2021).

Ketika merumuskan kebijakan RPP tentang pembelajaran mandiri, guru dan personel sekolah lainnya adalah salah satu variabel yang paling penting untuk diperhitungkan. Guru biasanya diharapkan untuk mengembangkan rencana pelajaran yang terperinci, yang membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan dan menganalisis proses pembelajaran yang sebenarnya.

Daftar Referensi

- Almasri, M. N. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam*. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19 (2), 133–151.
- Ambarwati, R., Dwijanto, D., & Hendikawati, P. (2015). Keefektifan model Project-Based Learning berbasis GQM terhadap kemampuan komunikasi matematis dan percaya diri siswa kelas VII. *Unnes Journal of Mathematics Education*, 4(2).
- Ansari, B. I., & Saleh, M. (2019). Pengaruh collaborative teaching dan pengetahuan awal terhadap kecemasan matematis siswa. *JIPMat*, 4(2).
- Ansharuddin, M., Fahroni, A., & Subekhi, A. F. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter di Ponpes Haji Ya'qub PPHY Lirboyo. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 139–160.
- Awanda, I., Rochmiyati, R., & Sugiyanto, S. (2018). Pengaruh Model Contextual Teaching And Learning Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar. *Pedagogi:*

- Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(6).
- Bayu, K., & Habibah, S. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan citra sekolah terhadap kepuasan siswa pada SMK swasta Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1).
- Cahyo, E. D. (2017). Pendidikan karakter guna menanggulangi dekadensi moral yang terjadi pada siswa sekolah dasar. *EduHumaniora/ Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 9(1), 16–26.
- Darmastuti, H. (2014). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3), 2014.
- Daryono, D., Firmansyah, M. B., Mariyanti, M., Budiman, M. F., Muhajir, A., Muthoharoh, D., Sari, A. M., Nufus, N. K., Ismalia, E. R., & Rohmah, S. (2021). *Kontribusi Landasan Pendidikan dalam Aspek Humas Pendidikan*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Destiana, A., Suryatman, D., & Setiowati, N. E. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul dalam Menunjang Pendidikan Formal di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. *Jurnal Edueksos*, 1, 55–63.
- Farhan, A., Herliana, F., Evendi, E., Devy, N. K., & Mauliza, F. (2021). The Implementation of “Guru Penggerak”(Organizer Teachers) Concept to Innovation of The Discussion Methods in Thermodynamics Course. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, 7(1), 1–12.
- Fatah, A. (2014). Dimensi keberhasilan pendidikan Islam program tahfidz al-Qur’an. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(2).
- Maula, R. (2021). *Merdeka Belajar Episode 1-10*. Kemedikbudristek.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). *Human resource management: Gaining a competitive advantage*. McGraw-Hill Education New York, NY.
- Notoatmodjo, S. (1992). *Pengembangan sumber daya manusia*. PT. Rineka Cipta.
- Rahmawati, R., Siraj, A., & Achruh, A. (2021). Hubungan Antara Kompetensi Guru Dan Budaya Sekolah Dengan Kinerja Guru. *Idarah J. Manaj. Pendidik*, 5(1), 10.
- Rivai, V., & Jauvani, S. E. (2009). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- Wijoyo, H., Handoko, A. L., Santamoko, R., & Sunarsi, D. (2020). Strategy model for character education through digital media for courses and training participants. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 1–8.

Bab VIII

Manajemen Sarana Prasarana di Era Merdeka Belajar

Agar kemajuan suatu negara menjadi berkualitas tinggi, pendidikan harus memainkan peran penting. Tingkat pendidikan suatu bangsa merupakan indikator yang baik dari perkembangannya. Kualitas pembangunan suatu bangsa dapat ditentukan oleh tingkat pendidikannya, dan suatu negara yang tertinggal dalam pendidikan akan mengalami kesulitan dalam proses pertumbuhannya (Munir, 2014).

Banyak elemen yang berperan dalam keberhasilan program pendidikan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai, serta efisiensi penggunaan dan administrasinya dll. Salah satu sumber daya yang paling penting dan utama yang mendukung proses pendidikan di sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan, sehingga perlu dioptimalkan penggunaan dan penatausahannya agar diperoleh hasil yang diharapkan.

Kualitas fasilitas fisik sekolah merupakan penentu utama hasil akademiknya. Keberhasilan dan kelancaran pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah. Sederhananya, "manajemen perlengkapan sekolah adalah upaya terkoordinasi untuk menggunakan semua peralatan instruksional secara efektif dan efisien" (Darmastuti, 2014). Tenaga kependidikan sekolah bertanggung jawab untuk memaksimalkan penggunaan semua gedung dan infrastruktur milik sekolah, menurut definisi dasar ini. dan secara efektif menggunakan semua sarana dan prasarana sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa pengajaran di kelas berjalan dengan baik dan bahwa misi sekolah dapat tercapai setiap organisasi, terutama sekolah, bergantung pada pengelolaan sarana dan prasarana untuk memastikan kelancaran operasinya seluruh kegiatan pendidikan (Darmastuti, 2014).

Salah satu sumber daya yang paling signifikan di sekolah adalah infrastruktur fisik yang memfasilitasi proses belajar mengajar. Jika program pendidikan ingin berhasil, gedung dan infrastruktur sekolah harus dalam kondisi yang baik dan dikelola dengan baik untuk memaksimalkan potensi mereka (Fuad, 2016). Kualitas sarana dan prasarana sekolah mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas program pendidikannya. Alat dan media sangat penting untuk pengalaman belajar yang sukses. Sebagai contoh, jika ruang kelas tempat siswa belajar rusak, maka proses pendidikan akan terhambat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana lembaga pendidikan harus dikelola dengan baik dan proporsional. Standar nasional pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan kriteria minimal ruang belajar, tempat kegiatan fisik dan tempat ibadah perpustakaan laboratorium bengkel dan taman bermain diatur dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia tahun 2005 tentang standar infrastruktur sebagai berikut:

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dicirikan sebagai upaya terkoordinasi untuk menggunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara maksimal. Sarana dan prasarana perguruan tinggi saat ini perlu dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan pendidikan mahasiswa, menurut definisi ini. Tujuan

manajemen adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat memanfaatkan gedung dan infrastruktur mereka secara maksimal. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan vital dalam pendidikan tinggi karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan proses pendidikan (Solichin, 2011). Prinsipnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, namun manajer juga dapat membantu. Sistem sekolah yang lengkap (Prahani et al., 2020).

A. Sarana dan Prasarana Dalam Merdeka Belajar

Membiarkan siswa mengejar minat dan keterampilannya sendiri sesuai dengan tujuan utama kebijakan merdeka belajar. Kemerdekaan, menurut Hamka (dalam Setiawan & Saputri, 2020), meliputi tiga aspek: kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, dan kebebasan dari tirani. Merdeka belajar didefinisikan sebagai proses di mana siswa bebas untuk mengejar minat dan aspirasi mereka sendiri tanpa dibatasi oleh praduga tentang apa yang harus mereka ketahui atau bagaimana mereka harus melakukan tugas-tugas tertentu.

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan belajar mandiri. Sarana dan prasarana harus aman dan menyenangkan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang kondusif setiap saat. Mahasiswa, profesor, dan anggota komunitas pendidikan lainnya memanfaatkan secara ekstensif infrastruktur dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Untuk tujuan pendidikan dan pengajaran, mereka berhak untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas sekolah yang dapat diakses oleh mereka (Ambarwati et al., 2015). Termasuk untuk memudahkan penyampaian materi pendidikan, tenaga kependidikan mengandalkan sarana dan prasarana. Di luar kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan menggunakan sarana dan prasarana untuk membantu pendidikan.

Fasilitas sekolah mencakup apa saja mulai dari perabot kelas dan media pembelajaran hingga buku dan bahan ajar lainnya, serta perlengkapan dan bahan habis pakai. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang tata usaha, lapangan olahraga, rumah ibadah, dan sebagainya merupakan contoh prasarana pendidikan yang secara tidak langsung membantu proses pendidikan di sekolah (Maula, 2021). Tanpa sarana dan prasarana yang memadai dan diperlukan, mustahil untuk mencapai tingkat pencapaian pendidikan yang setinggi-tingginya.

Siswa memerlukan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan tahap perkembangan mereka, sehingga lembaga pendidikan, formal dan informal, dapat mendukung proses pengarahan diri siswa dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan mengatur hal tersebut. Standar Nasional Pendidikan (SNP) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah direvisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, menyebutkan bahwa sarana dan prasarana harus dibenahi dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mutu sekolah dapat dinilai dari ketersediaan dan

kepraktisan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Untuk memberikan pengaruh yang paling besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana yang mendukung kebebasan berpikir peserta didik harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Upaya ini terus berlanjut hingga pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, yang disebut Madrasah Aliyah (SMA/MA). Menurut aturan, setiap fasilitas pendidikan harus memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Sekolah

- Untuk sebagian besar, ruang kelas digunakan untuk kegiatan berbasis teori, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk lebih banyak kegiatan langsung yang tidak memerlukan penggunaan peralatan khusus.
- Jumlah rombongan belajar sesuai dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan.
- Jumlah siswa di dalam kelas maksimal 28 orang.
- Ruang kelas minimal 2 m² per siswa.
- Agar siswa dapat membaca buku pelajaran dengan nyaman, ruang kelas dilengkapi dengan jendela yang terbuka ke luar.
- Pintu-pintu di ruang kelas cukup besar untuk anak-anak dan guru untuk pergi dengan cepat jika perlu, dan pintu-pintu itu dapat ditutup dengan benar ketika ruang kelas tidak digunakan.

2. Perpustakaan

- Selain menyediakan tempat bagi siswa/mahasiswa dan pengajar untuk mengumpulkan ilmu dari berbagai sumber perpustakaan, ruang perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang kerja bagi pegawai perpustakaan.
- Ruang perpustakaan minimum setara dengan ukuran satu ruang kelas.
- Perpustakaan harus memiliki luas minimal lima meter untuk menampung pengunjung.
- Ada jendela di ruang perpustakaan, yang membantu menerangi literatur yang sedang dibaca.
- Perpustakaan sekolah terletak dengan nyaman untuk digunakan oleh siswa dan fakultas.

3. Laboratorium

- Ruang kelas dapat digunakan sebagai laboratorium sains.
- Peralatan laboratorium IPA berfungsi sebagai penunjang eksperimen. Peralatan laboratorium IPA disertakan di setiap SD/MI.

4. Ruang pimpinan

- Sekelompok kecil guru, orang tua anak, anggota komite sekolah, pejabat pendidikan, atau pengunjung lainnya dapat berkumpul di ruang pimpinan untuk kegiatan pengelolaan sekolah.
- Hanya dibutuhkan 12 meter persegi dan 3 meter untuk ukuran ruang pimpinan.
- Ruang ini mudah diakses oleh guru dan pengunjung, serta diamankan dengan baik.

5. Ruang guru
 - Siswa dan pengunjung sama-sama dipersilakan di ruang guru, yang berfungsi sebagai ruang bagi guru untuk bekerja, bersantai, dan menghibur.
 - Untuk ruangan guru, perbandingannya adalah 4 m² per pendidik dan ukuran ruangan minimal 32 m².
 - Dengan kedekatannya dengan area kepemimpinan sekolah, ini adalah lokasi yang nyaman untuk dikunjungi para guru.
6. Tempat ibadah
7. Ruang toilet
 - Selain buang air besar dan kecil, WC juga digunakan untuk keperluan lain.
 - Guru dan siswa masing-masing memiliki satu unit jamban, dan harus ada satu unit untuk setiap 60 murid laki-laki.
 - Setiap sekolah minimal harus memiliki tiga jamban.
 - Satuan jamban harus berukuran minimal 2 meter persegi.
 - Jamban yang dapat dikunci dan mudah dibersihkan sangat penting.
 - Setiap unit toilet memiliki wastafel dengan air mengalir.
 - Harus ada ventilasi dan pencahayaan yang sesuai di setiap ruangan struktur.
 - Air bersih, air limbah, sampah, dan curah hujan harus disediakan di dalam dan di sekitar bangunan.
 - Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan manusia dan tidak merusak lingkungan harus digunakan dalam konstruksi.

B. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Indonesia

Menurut data Badan Pusat Statistik (2019), sebagian besar ruang kelas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan. Tabel 1 memberikan informasi lebih lanjut.

Tabel 1. Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2017/2018 dan 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas TA 2017/2018			Kondisi Ruang Kelas TA 2018/2019		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Total	Baik	Rusak Ringan	Rusak Total
SD	26,41	63,59	10,00	27,40	63,91	8,69
SMP	29,70	61,46	8,84	31,28	61,32	7,40
SMA	44,79	50,84	4,36	44,53	51,36	4,12
SMK	46,67	50,44	2,89	47,35	50,78	1,87

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Badan Pusat Statistik, 2019)

Kerusakan pada ruang kelas SD dan SMP lebih parah daripada kerusakan SMA dan SMK. Kurang lebih dari 70% ruang kelas di SD dan SMP hancur akibat gempa. Meski jumlah ruang kelas yang rusak di SMA dan SMK tidak setinggi SD dan SMP, kondisi kelas SMA dan SMK yang sebelumnya dalam kategori baik justru menurun dari 44,79 persen menjadi 44,53 persen. Menurut penelitian, kerusakan ruang kelas SMA dan SMK dapat ditelusuri kembali ke administrasi yang buruk oleh tenaga kependidikan sekolah. Banyak individu yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, namun beberapa di antaranya berpotensi menjadi komponen yang merugikan (Fuad, 2016) Sarana dan prasarana tidak dapat memberikan manfaat pembelajaran yang maksimal karena manajemen tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sistem dan proses. Masalah ini diperparah, menurut (Fuad, 2016), karena sumber daya manusia tidak mau atau tidak mampu mengelola infrastruktur saat ini. Akibatnya, masih ada sejumlah sarana dan prasarana yang harus digunakan tetapi tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

C. Manajemen Sarana dan Prasarana

Mengingat pentingnya gedung dan infrastruktur sekolah dalam mendorong otonomi siswa, sumber daya ini harus dikelola dengan hati-hati dan teliti sesuai dengan sistem dan aturan dan peraturan yang diperlukan. Untuk menunjang tujuan pendidikan, maka pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada seperangkat operasi yang sistematis dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan (Syamsul Rifa I, 2013). Siswa belajar lebih baik ketika ruang kelas mereka dilengkapi dan dirawat dengan baik. Sebagai hasil dari administrasi yang efektif, sumber belajar dan fasilitas dapat tersedia untuk siswa pada waktu yang tepat (Gunawan, 1996). Agar pembelajaran

dapat berlangsung secara efisien, pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting (Bafadal et al., 2019). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas tujuh kegiatan pokok, yaitu: (1) perencanaan, (2) pengadaan, (3) pendistribusian, (4) inventarisasi, (5) pemeliharaan, dan (6) penyimpanan. sarana dan prasarana pendidikan. Bagian berikut merinci berbagai fase manajemen.

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam sebuah proses manajemen. Perencanaan adalah metode berpikir tentang masa depan dan memutuskan tindakan apa yang akan diambil (Ellong, 2018). Perencanaan efektivitas sarana dan prasarana sekolah dapat dinilai atau dilihat dari sejauh mana pengadaan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam jangka waktu tertentu (N. Novita et al., 2021). Oleh karena itu, perencanaan yang tepat untuk bangunan dan infrastruktur diperlukan untuk mengurangi kesalahan pengadaan.

Perencanaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan besarnya prioritas dan ketersediaan sumber daya. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membeli peralatan: kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna karena barang yang salah akan menjadi sumber pemborosan, kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, kualitas terjamin, selalu baik sehingga dapat digunakan secara efektif, dan ketepatan jenis. barang sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengguna. Menurut (Fuad, 2016), untuk mempersiapkan dengan baik kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di masa depan, perlu melihat kebutuhan sarana dan prasarana saat ini serta kebutuhan sarana dan prasarana masa depan.

Selain tugas pokok tersebut, pembangunan sarana dan prasarana yang baik melibatkan berbagai kegiatan lagi yakni sebagai berikut (Bafadal et al., 2019):

- a. Memperbolehkan semua ide peralatan sekolah yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja untuk dipertimbangkan dan/atau membuat daftar kekurangan peralatan sekolah.
- b. Siapkan anggaran untuk perlengkapan sekolah untuk jangka waktu tertentu.
- c. Integrasikan rencana kebutuhan dengan peralatan yang sudah ada.
- d. Gunakan keuangan sekolah atau anggaran yang ada untuk memasukkan rencana kebutuhan.
- e. Memasukkan persyaratan jangka pendek ke dalam strategi keuangan jangka panjang
- f. Menyelesaikan strategi pembelian.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setelah kebutuhan sarana dan prasarana ditentukan dan didokumentasikan, tahap selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Segala upaya yang dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan disebut

sebagai pengadaan sarana dan prasarana (Syahril, 2012). Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara Kurniawati & Sayuti (2013). Diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana dengan bantuan dana dari pemerintah. Sebagai bagian dari proses droping, pemerintah menganalisis dan mengkategorikan fasilitas, mengajukan proposal pengadaan kepada pemerintah, dan jika disetujui, ditinjau dan dinilai kelayakannya sebelum dikirim ke sekolah yang bersangkutan (Nurbaiti, 2015). Dalam kebanyakan kasus, sekolah terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif.

Infrastruktur sekolah dapat dibeli secara langsung atau melalui pre-order, tergantung pada metode pembelian. Untuk menemukan produk dengan biaya lebih rendah dengan kualitas yang sama atau lebih baik, sekolah sering kali berkeliling dan mengevaluasi harga dari banyak vendor sebelum melakukan pembelian. Kemudian, meminta kontribusi orang tua atau memberikan rekomendasi kepada entitas sosial yang tidak mengikat untuk bantuan dalam akuisisi gedung dan infrastruktur sekolah. Karena sekolah adalah lembaga sosial yang terus-menerus dipengaruhi dan bergantung pada masyarakat, strategi ini lazim dilakukan. Pencapaian pendidikan di sekolah tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Menurut Kurniawati & Sayuti (2013), menyewa atau meminjam dari lokasi lain dan memperdagangkan komoditas dengan agen lain adalah dua opsi lagi yang bisa dijadikan alternatif. Produksi bahan pembelajaran interaktif adalah contoh lain bagaimana sekolah dapat menggunakan teknologi saat ini jika mereka bisa.

3. Penyaluran Sarana dan Prasarana Pendidikan

Distribusi infrastruktur pendidikan adalah proses di mana produk ditransfer dari satu organisasi ke organisasi lain untuk memenuhi tuntutan pendidik atau siswa selama pengajaran di kelas (Megasari, 2020). Sumber dan penerima didefinisikan dengan baik dalam skenario ini. Sarana dan prasarana berasal dari pihak sumber, sedangkan pihak penerima adalah penerima sarana dan prasarana yang dimaksud (M. Novita & Pendahuluan, 2017). Mendistribusikan sumber daya seperti buku teks sebelum awal semester memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif oleh pihak sekolah yang mendistribusikannya dan siswa yang menerimanya.

Personil administrasi sering bertanggung jawab atas distribusi komoditas. Kemanjuran dan kemampuan beradaptasi harus ditekankan dalam kebijakan distribusi. Untuk memastikan bahwa itu tersedia kapan pun dibutuhkan. Pelaksanaan distribusi komoditas didasarkan pada beberapa konsep. Konsep presisi, kecepatan, keamanan, dan ekonomi semuanya termasuk dalam rangkaian prinsip ini. Jika barang tiba di tempat tujuan dalam keadaan tidak rusak, sesuai jadwal, dan dengan harga yang wajar pada saat didistribusikan, tindakan pendistribusian barang dari sumbernya dapat dianggap berhasil (Nurbaiti, 2015).

4. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut standar, inventarisasi adalah pernyataan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur (Megasari, 2020). Inventarisasi sarana

dan prasarana mengacu pada pelacakan semua sarana dan prasarana sekolah saat ini. Sarana dan prasarana sekolah dapat dinilai dengan membaca buku-buku (Bafadal et al., 2019):

- a. Ini termasuk buku penerimaan barang, buku asal barang (mencatat bagaimana barang diperoleh), dan buku kelas persediaan (mencatat barang persediaan menurut kategori barang tertentu) sebagai pelengkap buku utama.
- b. Untuk mencatat semua inventaris negara dan yayasan yang diterima sekolah secara kronologis, diperlukan buku induk inventarisasi.
- c. Semua bahan habis pakai seperti kapur, pensil, dan penghapus papan tulis dicatat dalam buku yang bukan inventaris. Buku juga digunakan untuk melacak barang-barang yang telah diterima dan yang telah digunakan, serta barang-barang lain yang mungkin tersedia.

Inventarisasi sekolah, menurut Gunawan (1996) terdiri dari tiga kegiatan utama: mendokumentasikan semua objek di sekolah, membuat kode item untuk mengidentifikasi item dengan lebih baik, dan menginformasikan kepala sekolah tentang semua item. Diperkirakan bahwa inventarisasi gedung dan infrastruktur pendidikan akan mengarah pada penggunaan yang lebih baik, penghematan biaya, kemudahan pemeliharaan, dan pengawasan.

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Segala tindakan yang mengarah pada upaya pemeliharaan atau perbaikan fasilitas sekolah agar selalu siap digunakan seideal mungkin termasuk dalam pemeliharaan sarana dan prasarana (Nurbaiti, 2015). Peningkatan kinerja, masa pakai yang lebih lama, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan mengidentifikasi fasilitas sekolah yang hemat biaya dan pemeliharaan infrastruktur adalah semua tujuan, seperti menjaga kebersihan dan estetika, mendeteksi kerusakan sejak dini, dan menghindari atau meminimalkan kerugian (Aeni, 2021). Tentu saja hal ini memerlukan pengeluaran uang, yang biasanya telah dialokasikan secara eksplisit untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas, peralatan, dan perabotan sekolah (Gunawan, 1996).

Sekolah seringkali memilih petugas khusus atau paling tidak penanggung jawab memelihara dan menjamin keberlangsungan sarana dan prasarana guna menjamin kelancaran dan ketertiban penggunaan. Menurut Nurbaiti (2015), prasarana sekolah, seperti gedung dan pagar, memerlukan perawatan berkala, tetapi fasilitas sekolah, seperti alat bantu pembelajaran, komputer, peralatan laboratorium, dan sebagainya, dapat dipelihara lebih efisien setiap hari. Agar tetap bersih dan aman, petugas yang bertanggung jawab harus memastikan kembali ke tempat yang semestinya setelah digunakan, melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya, melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang rusak kemudian memperbaikinya, dan menyimpan infrastruktur yang tidak dapat diperbaiki.

6. Penyimpanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyimpanan sarana dan prasarana dapat disimpan dengan cara yang sama sehingga dapat dipelihara. Keduanya merupakan upaya jangka panjang. Disimpan jauh dari kondisi berbahaya termasuk panas, kelembaban, dan serangga. Menurut Daryono et al., (2021) ada sejumlah aturan untuk menjaga gedung dan prasarana sekolah.

- a. Dikelola sesuai dengan ketentuan bahwa persediaan lama harus dimanfaatkan terlebih dahulu.
- b. Mudah diakses
- c. Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat, di mana setiap simpanan harus dinyatakan secara mendalam dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d. Inventarisasi berkala.

7. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengelolaan sarana dan prasarana diakhiri dengan eliminasi (Megasari, 2020). Menghapus gedung dan infrastruktur milik sekolah dari daftar inventaris adalah proses yang didasarkan pada proses dan kerangka hukum dan peraturan yang sesuai (Andari et al., 2021). Pemindehan sarana dan prasarana diharapkan dapat mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari pengeluaran uang untuk memelihara atau memperbaiki peralatan yang rusak, serta pemborosan yang terkait dengan mengamankan peralatan yang tidak lagi diperlukan, serta membebaskan institusi dari tanggung jawab untuk pemeliharaan dan keamanan.

Untuk dipertimbangkan untuk dipindahkan, suatu sarana atau prasarana baru harus memenuhi atau telah memenuhi salah satu standar yang digariskan oleh Syahril (2012) di bawah ini.

- Tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali karena kerusakan parah
- Dengan kata lain: biaya perawatan yang tinggi lebih besar daripada kegunaan produk baik dari segi teknis maupun ekonomis.
- Kedaluwarsa atau ketinggalan zaman;
- Hilang atau musnah karena keadaan di luar kendali petugas;
- Kelebihan persediaan produk, yang jika disimpan untuk waktu yang lama, dapat mengakibatkan kerugian akibat kerusakan.

Penyelenggaraan pendidikan akan mempertimbangkan penggunaan dan konsumsi sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan saat memindahkan sarana dan prasarana. Biasanya ada dua metode di mana tindakan ini dilakukan, yaitu melelang dan menghancurkan objek. Ada beberapa teknik dan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi ini. Menjual barang di lelang adalah salah satu cara untuk menyingkirkan fasilitas dan peralatan yang tidak perlu. Nurbaiti et al., (2020) menyatakan bahwa untuk melakukan pelelangan, terlebih dahulu harus dibentuk panitia penjualan, baru kemudian pelelangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti uang, perusakan sarana dan prasarana dapat dilakukan. Akibatnya, penghapusan dilakukan dengan sangat hati-hati, dan surat yang memberi tahu atasan tentang materi yang akan dihapus dikirim. Untuk informasi lebih lanjut, Nurbaiti (2015), menyebut: Panitia Penghapusan dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang menyeleksi barang-barang yang akan dihapus, dan Panitia Pemusnahan Barang dengan Cara Dibakar, Dikubur dan sebagainya melakukan penelitian terhadap barang-barang yang akan dihapus. Laporan resmi tersebut disampaikan kepada pejabat pendidikan sehingga dikeluarkan surat penghapusan.

Daftar Referensi

- Aeni, N. (2021). *MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA*. OSF Preprints.
- Ambarwati, R., Dwijanto, D., & Hendikawati, P. (2015). Keefektifan model Project-Based Learning berbasis GQM terhadap kemampuan komunikasi matematis dan percaya diri siswa kelas VII. *Unnes Journal of Mathematics Education*, 4(2).
- Andari, S., Windasari, A. C. S., Setiawan, A. C., & Rifqi, A. (2021). Student Exchange Program of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic. *JPP J. Pendidik. Dan Pembelajaran*, 28(1), 30–37.
- Bafadal, I., Nurabadi, A., Sobri, A. Y., & Gunawan, I. (2019). The Competence of Beginner Principals as Instructional Leaders in Primary Schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(4), 625–639.
- Darmastuti, H. (2014). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 3(3), 2014.
- Daryono, D., Firmansyah, M. B., Mariyanti, M., Budiman, M. F., Muhajir, A., Muthoharoh, D., Sari, A. M., Nufus, N. K., Ismalia, E. R., & Rohmah, S. (2021). *Kontribusi Landasan Pendidikan dalam Aspek Humas Pendidikan*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Ellong, T. D. A. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(1).
- Fuad, M. N. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, A. H. (1996). *Administrasi sekolah:(administrasi pendidikan mikro)*. Penerbit Rineka Cipta.
- Kurniawati, P. I., & Sayuti, S. A. (2013). Manajemen Sarana dan Prasarana di SMK N 1 Kasihan Bantul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(1), 98–108.
- Maula, R. (2021). *Merdeka Belajar Episode 1-10*. Kemedikbudristek.
- Megasari, R. (2020). Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 636–648.
- Munir, M. (2014). MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANADALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 12 SURABAYA. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4).
- Novita, M., & Pendahuluan, A. (2017). Sarana dan prasarana yang baik menjadi bagian ujung tombak keberhasilan lembaga pendidikan islam. *Nur El-Islam*, 4(2), 97–129.

- Novita, N., Kejora, M. T. B., & Akil, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2961–2969.
- Nurbaiti, N. (2015). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. *Manajer Pendidikan*, 9(4).
- Nurbaiti, N., Kosim, K., & Taufik, M. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) Berbantuan Simulasi Virtual Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi*, 6(1), 146–152.
- Prahani, B. K., Deta, U. A., Yasir, M., Astutik, S., Pandiangan, P., Mahtari, S., & Mubarok, H. (2020). The Concept of "Kampus Merdeka" in Accordance with Freire's Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 21–37.
- Setiawan, A. R., & Saputri, W. E. (2020). Pembelajaran Literasi Sainifik untuk Pendidikan Dasar. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran*, 14(2), 144–152.
- Solichin, M. M. (2011). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di STAIN Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 8(2).
- Syahril, S. (2012). Pengelolaan Konflik di Sekolah. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(2), 99–106.
- Syamsul Rifa I, A. (2013). *Sistemi informasi simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Koperasi Inspeksi Pendidikan Agama Islam Sumedang*. Universitas Komputer Indonesia.

Bab IX

Manajemen Hubungan Masyarakat di Era Merdeka Belajar

A. Pengertian Public Relations (PR) dan Human Relation (HR)

Thomas Jefferson menciptakan kata "hubungan masyarakat" pada tahun 1807, ketika dia adalah Presiden Amerika Serikat (Utari et al., 2020). Saat itu terdapat pengenalan periode agen pers menyebabkan perkembangan hubungan masyarakat di industri hiburan. Selama klien mereka menjadi populer, agen pers akan menggunakan semua taktik, termasuk mengubah fakta. Pada periode ini, metode kehumasan diterapkan dengan cara yang buruk, menjadikannya masa yang manipulatif. Komunikasi satu arah masih menjadi norma (*one-way communication*). Namun, humas kini berkembang ke arah saling pengertian (*mutual understanding*). Di zaman sekarang ini, tujuan humas adalah menciptakan dialog dua arah antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. karena pendekatan etis diperlukan untuk mencapai dukungan dan status sosial yang tinggi (Mustari & Rahman, 2011). Hubungan masyarakat (PR) adalah usaha yang disengaja dan berkelanjutan untuk membangun saling pengertian antara perusahaan atau organisasi dan masyarakat. Humas adalah sejenis pemasaran (Sari, 2017).

Sebagai bagian dari ilmu sosial, humas juga merupakan seni dalam menilai tren, memproyeksikan dampaknya, mengarahkan pemimpin institusi/lembaga dan melaksanakan rencana yang sesuai dengan tujuan institusi dan masyarakat yang bersangkutan (A. Rahmat & Bakti, 2016). Untuk mencapai tujuan tertentu, humas merupakan peran manajemen yang sebelumnya membutuhkan program kerja yang jelas dan tepat untuk mengumpulkan informasi dan merencanakan ke depan, mengkomunikasikan, dan menganalisis hasil dari upaya tersebut (Robbins & Coulter, 2012).

Hubungan masyarakat merupakan ungkapan yang sering digunakan dalam hubungannya dengan orang selain *Public Relations*. Manusia memahami bahwa mereka tidak dapat eksis dalam isolasi dari bagian dunia lainnya, dan bahwa dengan terlibat dalam interaksi sosial, mereka dapat belajar dan tumbuh. Seorang manajer atau tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mencapai tujuan organisasi harus mampu bergaul dengan orang lain dan memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk memelihara bawahan mereka dalam rangka memelihara hubungan sosial yang harmonis dan produktif.

Hubungan masyarakat atau hanya "hubungan manusia", dengan cepat menjadi fokus bagi para eksekutif bisnis di semua tingkatan di negara-negara industri. Akibatnya, pentingnya hubungan manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mempengaruhi orang tumbuh. Selain itu, manajer percaya bahwa hubungan interpersonal yang baik sangat penting untuk mengurangi efek negatif dari miskomunikasi dan kesalahpahaman di dalam perusahaan serta dengan masyarakat umum.

Hubungan masyarakat mencakup berbagai kegiatan, seperti bisnis, pemerintahan, pertemuan sosial, sekolah, rumah, bioskop, dan jalan, di mana orang terlibat satu sama lain (Effendy, 2000). Dalam penelitian ini, hubungan masyarakat dilihat dalam arti yang

lebih sempit, khususnya dalam organisasi kerja formal, dimana terdapat struktur hierarkis formal antara atasan dan bawahan, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang eksplisit untuk tujuan bersama yang ingin dicapai, dan sebagainya.

Hubungan masyarakat, seperti yang didefinisikan oleh Keith Davis dalam bukunya *Perilaku Organisasi-Perilaku Manusia di Tempat Kerja*, adalah "memotivasi orang-orang organisasi untuk menjalin kerjasama, yang berhasil memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan organisasi." Sederhananya, "memotivasi individu untuk menghasilkan kerja sama yang efektif dan memuaskan" adalah deskripsi singkat tentang hubungan manusia (Keith, 2010). Memotivasi individu untuk bekerja sama dengan cara yang saling menguntungkan dan memuaskan secara pribadi adalah cara yang baik untuk menyimpulkannya. Perspektif berbeda dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam *Filsafat Administrasi*: "Rantai penuh interaksi, baik resmi maupun informal, antara atasan...dan bawahan lainnya yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa." Mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang menciptakan kerjasama dan iklim kerja yang akrab dan menyenangkan (Siagian et al., 2014).

Interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam lingkungan kerja dapat didefinisikan sebagai Hubungan Masyarakat. Akibatnya, terbukti bahwa hubungan manusia dan hubungan masyarakat memiliki definisi yang berbeda secara mendasar. Evaluasi tambahan lebih terfokus pada kata "humas" karena variasi interpretasi dan karena tujuan tulisan ini (Humas).

B. Hubungan Masyarakat: Apa Itu dan Apa Fungsinya

Reputasi organisasi atau bisnis dibangun, dilindungi, dan ditingkatkan melalui penggunaan PR, yang bertujuan untuk mempromosikan citra organisasi atau bisnis yang menguntungkan. Orang lebih cenderung membeli atau membeli sesuatu karena bagaimana perusahaan tampak bagi mereka (M. Rahmat, 2018). Agar hubungan masyarakat menjadi efektif, ia harus dapat menyampaikan maksud baik organisasi dan bekerja dengan cara yang dapat dipahami oleh "audiens/masyarakat", sebagaimana mereka sering disebut. Bagi E. Mulyasa, pengembangan kegiatan kehumasan terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran sekolah, meningkatkan pemahaman sekolah tentang situasi dan aspirasi sekolah, meningkatkan upaya orang tua, guru dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan meningkatkan kuantitas dan kualitas dukungan orang tua yang tinggi terhadap pendidikan sekolah (Mulyasa, 2008).

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Humas dapat diringkas sebagai berikut: Wawasan tentang pandangan dan nilai publik. Mengembangkan dan menerapkan proses dan kebijakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum atas nama organisasi atau perusahaan. Merencanakan dan menerapkan strategi komunikasi. Menggunakan proses komunikasi dua arah, membangun kepercayaan dan 'niat baik' antara pihak-pihak yang terlibat. Memastikan bahwa organisasi dan publik memiliki hubungan kerja yang menyenangkan.

C. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan

Hubungan masyarakat di lembaga pendidikan, seperti hal lainnya, membutuhkan manajemen. Ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui upaya orang lain adalah

definisi umum dari manajemen. Ketika beberapa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, manajemen adalah mungkin. Bagi Siagian dalam Nasution (2010) manajemen adalah suatu metode menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil tertentu guna memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Melalui tindakan organisasi, manajer dapat mencapai hasil dengan menggunakan kemampuan atau keterampilan proses mereka. Dengan kata lain: untuk membangun dan memelihara garis yang sama antara organisasi dan publiknya mengenai komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerjasama yang melibatkan informasi dan umpan balik dalam opini publik, manajemen hubungan masyarakat berfungsi sebagai fungsi manajemen yang berbeda yang membantu mendukung pembentukan dan pemeliharaan garis bersama antara organisasi dan publiknya mengenai komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama.

Pendidikan telah menjadi kebutuhan bersama di era globalisasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, lembaga pendidikan saat ini harus menawarkan layanan informasi, kemampuan manajemen informasi, dan kerjasama dengan organisasi lain. Sebuah lembaga pendidikan harus dikelola dengan cara yang menggabungkan tujuan sosial dan komersial untuk mencapai hal ini. Pendidikan akan mengambil kualitas yang unik sebagai hasil dari perpaduan dua perspektif yang kontras ini. Untuk itu diperlukan penggunaan strategi dan metode pengelolaan informasi yang profesional, efisien, dan efektif. Harus ada divisi yang membidangi kerja strategis dan serius program tersebut agar dapat mengelola informasi secara efektif baik bagi publik internal (mahasiswa, dosen, dan staf) maupun publik luar (orang tua mahasiswa, masyarakat, instansi pemerintah, dan sektor korporasi), humas, lebih spesifiknya (Nasution, 2010). Humas di lembaga pendidikan berbeda dari tugas dan tanggung jawab humas di lembaga atau organisasi lain karena fitur ini unik untuk lembaga pendidikan. Departemen Humas lembaga pendidikan ini menggabungkan fokus sosial dengan fokus pada pengamanan uang untuk pembangunan dan perlengkapan fasilitas pendidikan. Kedua faktor ini terkait erat di semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

D. Manajemen Humas Merdeka Belajar

1. Pemberdayaan Sekolah dan Partisipasi Masyarakat

Dengan bergesernya paradigma pembangunan ke arah demokratisasi dan desentralisasi, tumbuh kesadaran bahwa seluruh proses pembangunan, termasuk pendidikan, harus terbuka bagi keterlibatan masyarakat. Saat membicarakan kemajuan pendidikan, sering kali muncul istilah "pemberdayaan" dan "partisipasi". Masih kurangnya pemahaman dan implementasi tentang perlunya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat oleh mitra pembangunan baik dari sektor publik maupun komersial serta masyarakat. Masih banyak kebingungan di antara masyarakat sendiri mengenai praktik keterlibatan dalam pendidikan di setiap tingkat proses. Sebagian besar proyek dan program pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, yang menempatkan masyarakat sebagai pusat keberhasilan atau kegagalan program. Ini terutama benar ketika menyangkut inisiatif pendidikan K-12. Sebaliknya, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat seringkali disalahgunakan, baik disengaja maupun tidak disengaja (Hadi, 2015).

Dari Abad Pertengahan hingga hari ini, kata "pemberdayaan" telah digunakan sebagai sinonim untuk "pemberdayaan" di Amerika Serikat. "Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan kelompok dan orang yang kurang beruntung bersaing lebih sukses dengan kepentingan lain, dengan mengajari mereka untuk belajar dan memanfaatkan lobi, media, aksi politik, belajar bagaimana 'sistem kerja' dll" (Ife, 2016). Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai memberikan kebebasan, wewenang, dan kepercayaan kepada karyawan sehingga mereka dapat berinovasi dan melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa dalam pekerjaan mereka. Lingkungan eksternal, artinya masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sekolah sebagai organisasi formal di bidang pendidikan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pendidikan dengan membina hubungan yang erat dan jalur komunikasi yang terbuka, untuk memastikan bahwa siswa mencapai potensi penuh mereka (Yusuf, 2022).

2. Manajemen Humas Merdeka Belajar

Setiap bidang keberadaan manusia telah berubah dan berkembang sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi digital yang terintegrasi secara masif dengan teknologi manufaktur seperti sekarang ini (Kemendikbud, 2020). Hal inilah yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim membuat terobosan baru dalam pendidikan Indonesia dengan programnya yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah meningkatkan berbagai inisiatif pembelajaran mandiri ini. Jika dicermati, banyak aturan yang telah diberlakukan sebagian besar telah mengakomodir administrasi Humas Merdeka Belajar. Sebagai hasil dari Manajemen Humas Merdeka Belajar, aturan berikut diterapkan untuk:

1. Aspek terpenting dari kebijakan Merdeka Belajar diantara komponen yang paling kritis dari rencana tersebut adalah USBN, RPP, dan Peraturan Zonasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB).

Menurut pemerintah, USBN dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) diperkirakan akan diganti dengan tes (penilaian) (Asesmen Nasional) berbasis sekolah pada tahun 2020. Kompetensi siswa dapat dinilai dengan menggunakan ujian tertulis dan/atau jenis penilaian yang lebih menyeluruh, seperti portofolio dan tugas (tugas kelompok, karya tulis, dll). Undang-undang ini memungkinkan guru dan sekolah untuk lebih mandiri dalam mengukur hasil belajar siswa, yang merupakan hal yang baik. Akibatnya, anggaran USBN yang cukup besar dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan pengajaran yang berkualitas lebih tinggi kepada siswa. Akibat kebijakan UN akan diganti dengan Asesmen Nasional (AN) pada siswa dan orang tua yang terbebani dengan adanya UN tentunya akan diuntungkan dengan adanya program ini. Namun, strategi ini membutuhkan keterlibatan lebih dari orang tua dalam memantau kemajuan anak-anak mereka di sekolah. Mengingat UN tidak lagi dilaksanakan, kebijakan ini dapat berdampak pada kurangnya motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, diharapkan pihak sekolah dan masyarakat dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik dan mendampingi anak-anak.

Merdeka Belajar menekankan manajemen pembelajaran gratis, dan ini adalah implementasi rencana pelajaran satu halaman. Guru dihadapkan pada kenyataan bahwa membuat RPP memakan banyak waktu, yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan dan menganalisis proses pembelajaran bagi siswa. Kebijakan baru memungkinkan guru kebebasan untuk merancang dan menerapkan struktur rencana pelajaran yang lebih disederhanakan. RPP yang ditulis dengan baik dapat memberikan guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih memenuhi persyaratan murid mereka. Selain itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkaitan dengan sistem zonasi merupakan peraturan yang penting untuk diketahui. Sebagai bagian dari tujuan utama untuk memberikan akses pendidikan yang unggul dan mewujudkan Tricenter Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat), melalui kebijakan zonasi PPDB mendorong siswa untuk bersekolah di lingkungan mereka sendiri.

Kebijakan ini memungkinkan PPDB dilaksanakan secara lebih fleksibel untuk memenuhi disparitas regional dalam akses dan kualitas. Bagi sekolah yang tidak dianggap favorit atau bagi anak-anak yang lemah secara akademis atau kurang berprestasi, strategi pengurangan jumlah jalur zonasi menjadi 50% dan peningkatan persentase jalur pencapaian menjadi 30% jelas bermanfaat. Untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, persentase akhir dan wilayah zonasi diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing wilayah. Untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas, pemerintah daerah juga harus menerapkan langkah-langkah tambahan, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan staf.

2. Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya mengimbau kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia untuk segera mempersiapkan kebijakan: Penetapan Wisuda Mahasiswa dan Zonasi Penerimaan Mahasiswa Baru pendaftaran PPDB, seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa harus mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB Daerah di TKK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta Zonasi Penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah. Seorang pemimpin harus melakukan himbuan ini kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat melakukan manajemen Humas.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian integral dari mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi. Bahwa keterampilan dan informasi yang diperoleh mahasiswa di perguruan tinggi harus digunakan di dunia nyata. Konsekuensinya, setiap perguruan tinggi harus menetapkan tingkat minimal prestasi akademik untuk memastikan bahwa karya mahasiswa yang dibuat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57, standar keluaran mengacu pada persyaratan minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembudayaan masyarakat

secara keseluruhan. Hasil penelitian yang dapat diterapkan secara langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna termasuk dalam pasal 58 ayat 3; seperti halnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberdayakan masyarakat; serta teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan juga masalah-masalah yang dapat diatasi sebagai akibat dari perkembangan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat 1, pengelolaan interaksi yang tepat antara perguruan tinggi dan masyarakat diperlukan untuk mencapai semua tujuan tersebut di atas. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian yang efektif.

4. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum, dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020. Penyelenggaraan organisasi PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari pendidikan manajemen hubungan masyarakat independen di perguruan tinggi. Hal ini penting untuk menarik konsumen dari luar (masyarakat) ke PT. Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa pengelolaan PTN dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif, dan efisien; PTN bersifat nirlaba; PTN mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan laporan PTN disusun dan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal berkala dan tidak berkala. Tanggung jawab sosial PTN juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan penerimaan, termasuk apakah akan menerima siswa dengan potensi akademik tinggi tetapi status ekonomi rendah, serta menerima siswa dari daerah terdepan, terluar, atau paling tertinggal, yang menyebabkan minimal 20 persen dari total pendaftaran.
5. Peraturan Ke-5 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (PT) merupakan bagian penting dari pengelolaan peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi (PT). Sebagai hasil dari undang-undang ini, pemerintah bertujuan untuk mengembangkan hubungan masyarakat dengan mendirikan Lembaga Akreditasi Independen (LAM). Sebagaimana digariskan dalam Pasal 46 ayat 1-3, pemerintah dapat menyelenggarakan kehumasan untuk pembelajaran mandiri dengan mengizinkan perseorangan menyelenggarakan LAM yang berbadan hukum nirlaba yang mengikuti proses akreditasi lembaga dan program pendidikan. LAM masyarakat diawasi oleh BAN-PT saat menyelesaikan proses akreditasi ini.

Daftar Referensi

- Effendy, O. (2000). *Ilmu teori dan filsafat komunikasi*.
- Hadi, R. P. (2015). *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL*.
- Ife, J. (2016). Human rights and social work: beyond conservative law. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1(1), 3–8.
- Keith, L. C. (2010). Human rights instruments. *The Oxford Handbook of Empirical*

- Legal Research*, 2010, 353–375.
- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 1–33*.
- Mulyasa, E. (2008). *Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan: kemandirian guru dan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2011). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter*. Laksbang Pressindo.
- Nasution, I. (2010). Manajemen Konflik di Sekolah. *Visipena*, 1(1), 45–55.
- Rahmat, A., & Bakti, I. (2016). Kinerja hubungan masyarakat pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(2), 133–141.
- Rahmat, M. (2018). Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Yang Damai, Moderat, dan Toleran. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 39–64.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management. England*. Pearson Education Limited.
- Sari, D. P. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. *Islamic Counseling*, 1(1), 1–24.
- Siagian, T. H., Purnadi, P., Suhartono, S., & Ritonga, H. (2014). Social vulnerability to natural hazards in Indonesia: driving factors and policy implications. *Natural Hazards*, 70(2), 1603–1617.
- Utari, L., Kurniawan, K., & Fathurrochman, I. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis. *JOEAI: Journal of Education and Instruction*, 3(1), 75–89.
- Yusuf, M. (2022). *IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA MERDEKA BELAJAR*.

Bab X

Perluasan Dana Bantuan Pendidikan dan Beasiswa

Kurikulum Merdeka Belajar soal dana bantuan pendidikan ini merupakan perpanjangan tangan dari program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pendirian LPDP sebagai pengelola dana telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan dan pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Kabar baiknya, LPDP akan memperpanjang program untuk mengakomodasi lebih banyak siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta seniman yang ingin mengembangkan bakat mereka melalui pendidikan pasca-sekolah menengah (Kemendikbud, 2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan berbagai inisiatif di bawah strategi Merdeka Belajar untuk meningkatkan akses masyarakat dan penyelesaian pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan akademik dan praktis (Labuem et al., 2021).

Terselenggaranya pendidikan di Indonesia dibantu oleh anggaran pendidikan yang menyumbang 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang pendidikan dialokasikan tidak hanya untuk pendidikan tinggi, tetapi juga untuk penelitian dan budaya. Oleh karena itu, Majelis Wali Amanat menetapkan kebijakan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sejak awal tahun 2009, pendanaan pendidikan telah tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2021, belanja pendidikan negara secara keseluruhan akan melebihi 1,550 triliun (Kemendikbud, 2020).

Kondisi pandemi memiliki dampak besar pada kenaikan lima kali lipat dalam biaya sekolah secara keseluruhan. Di antara alokasi dana tersebut adalah bantuan kuota data internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pada satuan pendidikan berbasis agama di bawah Kementerian Agama. Dana abadi pendidikan digunakan untuk mendukung berbagai program beasiswa, antara lain reguler, afirmasi, Pra Sejahtera, ASN, dan TNI-Polri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama diharapkan mempertimbangkan dengan matang peruntukan dana abadi tersebut (Wijayanto, 2021a).

LPDP sejauh ini telah mengucurkan dana sebesar Rp 70,1 triliun untuk dana abadi. Hal ini sesuai dengan program Merdeka Learning episode kesepuluh yang fokus pada perpanjangan program beasiswa LPDP. Kemendikbudristek terus memperluas program beasiswa bagi guru besar dan guru, khususnya guru SMK. LPDP akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan siswa sambil memastikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang transparan. Tumbuhnya program LPDP diproyeksikan akan berdampak positif bagi perbaikan dan perkembangan lingkungan pendidikan Indonesia (Muhammad Yusuf, 2022).

Pada masa disrupsi ini, masyarakat global dihadapkan pada beberapa masalah, antara lain arus informasi dan teknologi yang cepat, yang mengakibatkan perubahan di berbagai bidang (Wijayanto, 2021b). Dari segi sosial budaya, perubahan budaya dan praktik ketenagakerjaan berdampak pada sumber daya manusia Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan LPDP bereaksi cepat terhadap transformasi yang cepat ini. Program Merdeka Belajar Kemendikbud mencita-citakan tercapainya Profil Pelajar

Pancasila sebagai tujuan reformasi pendidikan. Selain itu, program LPDP berkembang sejalan dengan upaya pengembangan Profil Mahasiswa Pancasila, yang meliputi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, keragaman global, gotong royong, kreativitas, berpikir kritis, dan kemandirian.

Inklusivitas dan kemampuan beradaptasi sangat penting dalam lingkungan pendidikan saat ini. Indonesia terus mengalami kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di seluruh negeri, itulah sebabnya inisiatif Merdeka Belajar bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi kaum muda di daerah pedesaan untuk melanjutkan pendidikan tinggi (M Yusuf & Arfiansyah, 2021). Dana abadi yang ditangani LPDP juga digunakan untuk membangun kapasitas dan pengetahuan para pendidik dan pelaku budaya yang beragam. Selain itu, pengajar terlibat dalam internalisasi cita-cita dari profil pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar, sehingga perlu upaya bersama dan tindakan cepat untuk mempersiapkan bangsa ini bersaing di pentas global.

Sebelum wabah COVID-19, LPDP biasanya menawarkan pendaftaran dua kali setahun sebagai lembaga yang memberikan uang bantuan pendidikan. Rata-rata jumlah pelamar beasiswa di Indonesia mencapai puluhan ribu dari semua daerah. Pada tahun 2020, LPDP hanya menawarkan beasiswa dalam jumlah terbatas jika terjadi pandemi. Kemudian, mulai tahun 2021, LPDP akan bekerjasama secara formal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperpanjang program beasiswa pendidikan. Ini tidak diragukan lagi sebagai kabar baik. Salah satu inovasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan perubahan sistem pendidikan adalah perubahan jenis program beasiswa yang ditawarkan kepada siswa maupun pengajar (Nurtjahyati & Sukisno, 2021).

LPDP menawarkan berbagai program beasiswa, antara lain beasiswa afirmasi sebelumnya untuk keluarga kurang mampu dan mahasiswa dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), beasiswa kelompok sasaran untuk beberapa sektor utama, antara lain dokter spesialis, TNI, Polri, dan PNS, serta magister umum dan beasiswa doktor. Enam program beasiswa baru telah dirancang dalam kemitraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPDP dan Kemendikbudristek memberikan kemungkinan bagi masyarakat luas untuk mengembangkan kesadaran diri melalui pendidikan tinggi. Program LPDP dirancang untuk membantu upaya pencapaian tujuan Merdeka Belajar dengan meningkatkan inklusi dan akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut ringkasan program beasiswa yang sudah ada dan yang baru diperkenalkan (Kemendikbud, 2020).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

lpdp

Untuk membentuk SDM unggul, Kemendikbud dan LPDP berkolaborasi untuk memperluas ruang lingkup Dana Abadi Pendidikan

A PROGRAM YANG SUDAH TERSEDIA SELAMA INI	B PROGRAM-PROGRAM BARU, MULAI TAHUN 2021
<p>Beasiswa Pendidikan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa Afirmasi <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa kebutuhan khusus & difabel Beasiswa prasejahtera Afirmasi 3T Beasiswa Targeted <ul style="list-style-type: none"> PNS, TNI, POLRI Dokter Spesialis Kewirausahaan Pendidik Kerjasama Khusus Beasiswa Umum <ul style="list-style-type: none"> Reguler (S2/S3) Perguruan Tinggi Utama Dunia (S2/S3) <p>dan program-program di bawah Kementerian Agama</p>	<p>B1 Kampus Merdeka</p> <ul style="list-style-type: none"> Kampus Mengajar Magang & Studi Independen Bersertifikat (<i>microcredentials</i>) Mobilitas Internasional Pertukaran Mahasiswa Merdeka <p>B2 Program Dosen & Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa Dosen S2 & S3 Riset Keilmuan Magang di Industri Magang di Perguruan Tinggi Kelas Dunia <p>B3 Program Guru & Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa S2 Guru (DN / LN) Sertifikasi Guru (<i>Microcredentials</i>) Beasiswa S3 Guru (DN) <p>B4 Program Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Magang di Industri Guru SMK Beasiswa S1 Guru SMK Beasiswa Kegiatan Dosen Vokasi di Luar Kampus Sertifikasi, Magang, dan Pelatihan Dosen & Tendik Vokasi Beasiswa Dosen Vokasi S2 & S3 (DN / LN) Riset Keilmuan Terapan di Dalam Negeri <p>B5 Program Prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa S1 Siswa Berprestasi Beasiswa S2 Mahasiswa Berprestasi <p>B6 Beasiswa Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Beasiswa S1 (DN), S2 (DN / LN) & S3 (DN / LN) Kebudayaan

A + B = termasuk be

Sumber: Kemendikbudristek 2020

Berdasarkan statistik di atas, enam program baru yang ditawarkan LPDP dan Kemendikbudristek berpotensi menarik tambahan anggota masyarakat, termasuk guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Selain itu, pengelompokan program beasiswa B1 hingga B6 memudahkan calon kandidat untuk memilih program mana yang paling sesuai. Selain itu, kebijakan baru pertumbuhan program beasiswa LPDP dimaksudkan untuk mengefektifkan prosedur seleksi berjenjang. Terkait dengan hal tersebut, LPDP berupaya menerapkan kebijakan baru yang akan menyederhanakan proses yang ada, seperti penerima beasiswa dapat menyelesaikan program sarjana, magister, doktor, dan non-gelar berkualitas tinggi berdasarkan kriteria yang ketat, seperti pengelompokan universitas secara sistematis, memudahkan pendaftar yang sudah memiliki LoA dan membantu pendaftar yang belum memiliki LoA (Kemendikbud, 2020).

Selain itu, LPDP mendukung konsep Merdeka Belajar. Secara umum, LPDP akan mendanai empat program unggulan di Kampus Merdeka pada tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Tinggi
2. *Microcredentials*, khususnya program magang dan studi mandiri yang terakreditasi.
3. Pertukaran Pelajar Internasional
4. Pertukaran Mahasiswa Mandiri

LPDP akan memberikan beasiswa non gelar kepada peserta program Kampus Merdeka melalui program Merdeka Belajar. Tentu hal ini harus disambut baik. Dengan transfer kredit sebesar 20 sks, mahasiswa dapat bekerja sebagai asisten pengajar di area 3T, magang, atau bertukar tempat dengan mahasiswa lain di dalam dan luar negeri. Melalui inisiatif Kampus Merdeka, mahasiswa dapat berkontribusi dalam pendampingan anak-anak muda di wilayah 3T. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyikapi dan menyelesaikan persoalan ketimpangan di

Indonesia yang dicontohkan oleh daerah-daerah dengan tingkat literasi yang rendah. Antusiasme mahasiswa juga terlihat sangat besar, terlihat dari jumlah relawan yang berpartisipasi berkisar antara 15.000 hingga 35.000 (Syafii, 2018).

Selain itu, Program Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan lulusan baru untuk menyelesaikan magang di sektor kelas dunia dengan mentor ahli. Selain itu, siswa dapat mengikuti pelatihan ekstensif online dan offline melalui LPDP dan mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di universitas-universitas terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu tidak berakhir di sana; program beasiswa budaya juga tersedia bagi seniman dan pelaku budaya baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan tujuan budaya untuk mendidik masyarakat tentang tradisi dan kreativitas budaya yang kaya di negara ini (Muslimat, 2021). Tahun ini, LPDP akan berkonsentrasi pada pendanaan akademisi dan guru. Di antara program yang tersedia untuk dosen adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Magister dan Doktor secara berkala.
2. Magang selama satu semester di industri dengan perusahaan kelas dunia.
3. Subvensi untuk penelitian ilmiah.
4. Magang selama satu hingga enam bulan di lembaga kelas dunia lainnya dengan bantuan keuangan.

Selain itu, program beasiswa guru mendukung studi master dan doktor di Amerika Serikat dan luar negeri, serta sertifikasi. Beasiswa untuk guru kejuruan membantu guru sekolah kejuruan dalam menyelesaikan magang di industri dan melanjutkan studi beasiswa sarjana, serta berpartisipasi dalam kegiatan sistem kejuruan di luar kampus. Selain itu, mereka dapat memberikan sertifikat, magang, pelatihan dosen dan pelatihan kejuruan, serta beasiswa pascasarjana untuk dosen di kampus dalam dan luar negeri, serta melakukan penelitian ilmiah terapan di dalam negeri. Selain itu, LPDP memungkinkan lulusan SMA dan sederajat yang berhasil mengajukan beasiswa perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, beasiswa master umumnya tersedia untuk individu yang telah menunjukkan keunggulan dalam profesi mereka. Berikut ini adalah deskripsi lengkap dari setiap program, dimulai dengan B2 (Kemendikbud, 2020).

B2. Program Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Beasiswa Dosen Reguler Magister dan Doktoral
3. Magang Industri
4. Penyelidikan ilmiah
5. Magang Perguruan Tinggi

B3. Program untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

6. Beasiswa Magister (Domestik dan Luar Negeri)
7. Kredensial Guru
8. Beasiswa Doktor untuk Guru (Dalam Negeri)

B4. Pelatihan Kejuruan

1. Praktek Kerja Industri bagi guru SMK
2. Beasiswa untuk kegiatan Dosen Vokasi Luar Kampus
3. Beasiswa Guru SMK Tingkat Sarjana

4. Sertifikasi, Magang, dan Pelatihan Vokasi Dosen dan Pendidik
 5. Beasiswa Magister dan Doktor untuk Dosen Vokasi (Dalam dan Luar Negeri)
 6. Penelitian Ilmiah Terapan di Amerika Serikat
- B5. Program untuk Siswa SMA dan Siswa Berprestasi
1. Beasiswa Sarjana untuk Siswa SMA Berprestasi (Domestik & Luar Negeri)
 2. Beasiswa Magister Mahasiswa Berprestasi (Domestik & Luar Negeri)
- B6. Program Beasiswa Budaya
1. Beasiswa Sarjana Kebudayaan (Dalam Negeri)
 2. Beasiswa Magister Budaya (Domestik & Luar Negeri)
 3. Beasiswa Doktor Ilmu Budaya (Domestik & Luar Negeri)

Perkembangan program beasiswa telah meningkatkan kesempatan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program LPDP dan Merdeka Belajar saling melengkapi dalam hal kebijakan dan hasil. Strategi ini diharapkan dapat membantu upaya menuju tujuan pendidikan universal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Referensi

- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 1–33.*
- Labuem, W. N.-M. Y.-S., Al Mansur, D. W. A.-M., Masgumelar, H. A.-N. K., Wijayanto, A., Or, S., Kom, S., Anggaira, A. D. A. S., Bayu, W. I., Amiq, F., & Or, S. (2021). *IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA MERDEKA BELAJAR.*
- Muslimat, A. (2021). *Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen.* Bintang Visitama Publisher.
- Nurtjahyati, S. D., & Sukisno, S. (2021). Challenges and Expectations in the "Freedom of Learning-Independent Campus" Program for Higher Education Managers. *Praniti Wiranegara (Journal on Research Innovation and Development in Higher Education), 1(1), 40–46.*
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 4(2), 153–171.*
- Wijayanto, A. (2021a). *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar.*
- Wijayanto, A. (2021b). *WAKTUNYA MERDEKA BELAJAR.*
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 7(2), 120–133.*
- Yusuf, Muhammad. (2022). *IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA MERDEKA BELAJAR.*

Bab XI

Pendidikan Vokasi di Era Merdeka Belajar

A. SMK Pusat Keunggulan

Melalui Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan terobosan-terobosan sebagai sarana pembangunan berkelanjutan guna mengubah sistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek memperluas terobosan dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan (Kemendikbud, 2020). Tujuannya adalah untuk mendirikan sekolah kejuruan yang unggul yang akan menjadi katalis bagi sekolah lain untuk meningkatkan standar hasil belajar siswa guna memenuhi kebutuhan industri.

SMK Pusat Keunggulan mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk peremajaan SMK secara menyeluruh guna menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan nasional dan global. SMK Pusat Keunggulan adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menghasilkan lulusan yang kompeten yang mampu diintegrasikan ke dalam dunia usaha, industri, dan dunia kerja, serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempersiapkan mereka menjadi wirausahawan muda. SMK Pusat Keunggulan berfungsi sebagai sumber daya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan menjadi model bagi SMK lainnya (Sherly et al., 2021).

SMK Pusat Keunggulan merupakan program yang dipelopori oleh Ditjen SMK yang menganut prinsip yang tertuang dalam lirik lagu Indonesia Raya, khususnya “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Setelah jiwanya dibangun, tubuhnya juga dibangun. Sumber daya manusia yang memiliki sikap dan karakter pertumbuhan yang bersedia berkontribusi dalam pembangunan sarana dan prasarana yang kontekstual. Kemendikbudristek mengumumkan tahun lalu bahwa inisiatif ini dijuluki sebagai Sekolah Vokasi Pusat Keunggulan dan akan mencakup 491 sekolah kejuruan pada tahun 2020, naik dari 2.043 sekolah kejuruan swasta dan negeri tahun lalu. Kementerian Pendidikan dan Teknologi akan lebih memperluas Sekolah Vokasi Pusat Keunggulan menjadi SMK Pusat Keunggulan bagi mereka yang mendaftar tahun ini. Istilah "unggulan" dalam konteks ini tidak menunjukkan superior saja, eksklusif saja, atau favorit saja; melainkan mengacu pada penciptaan sekolah kejuruan yang unggul yang mampu mengakselerasi atau melatih sekolah kejuruan lain untuk menjadi luar biasa juga (Kemendikbud, 2020). Dengan demikian, SMK Pusat Keunggulan berperan sebagai katalisator bagi SMK yang lebih baik di Indonesia, bukan sebagai lembaga eksklusif, tetapi sebagai SMK yang membina SMK lainnya (Suharti & Faidin, 2021).

Pada 2020, Kemendikbudristek akan membuka fasilitas SMK Pusat Keunggulan. Angkatan pertama SMK Pusat Keunggulan yang terdiri dari 461 sekolah mulai bereksperimen dengan kombinasi pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur, yang menghasilkan keberhasilan yang lebih cepat. Program ini mencakup 4.500 guru dan kepala sekolah, yang merupakan peningkatan pelatihan untuk kepala sekolah dan lainnya, meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga

melaksanakan pendaftaran di tahun 2019. Ini merupakan evolusi ketiga, sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan inkubasi pada tahun 2020 untuk menentukan mana yang berhasil dan yang tidak, kemudian disempurnakan kembali. Sekolah Vokasi Pusat Keunggulan harus memiliki fasilitas infrastruktur pendukung, dan sumber daya personel yang harus ditingkatkan (Tallar, n.d.).

Sementara Kemendikbudristek telah memperkuat sumber daya manusia di bidang-bidang tertentu, ada dua perkembangan signifikan sebagai akibat dari pembentukan Sekolah Vokasi Pusat Keunggulan. Dimana Kemendikbudristek akan melengkapi saran dengan bimbingan dari perguruan tinggi, khususnya dari produk verifikasi dan Politeknik yang paling kuat sebagai kakaknya dalam linierisasi pendidikan. Atau sebagai kakak dari fasilitas unggulan SMK. Kedua, jika SMK Senterisasi adalah program satu tahun, maka SMK Pusat Keunggulan menawarkan program tiga tahun (Richendi & Soesanto, 2021).

Kemendikbudristek memiliki beberapa tujuan, dan ada banyak ketidakpastian mengenai peran SMK. Apa yang seharusnya menjadi hasil atau matriks keberhasilan SMK? Kemendikbudristek ingin menegaskan di sini bahwa tujuan SMK Pusat Keunggulan, atau Kemendikbudristek yang menentukan kinerjanya, erat kaitannya dengan output, yaitu lulusan. Ada tiga kriteria sukses jika lulusan segera terserap ke dunia kerja, yaitu pertama sukses langsung diserap industri, dan kedua, bisa melanjutkan pendidikan di politeknik atau universitas, serta ketiga, ia menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja untuk dirinya sendiri yaitu menjadi seorang wirausahawan (Syahyadi, 2020).

Ketiga kemungkinan hasil ini akan diklasifikasikan sebagai berhasil atau gagal. Jika lulusan SMK ini menganggur, Kemendikbud pasti akan melacak berapa penghasilannya saat mulai bekerja dan berapa kenaikannya selama beberapa tahun pertama. Karena jika Kemendikbudristek sudah membentuk SMK, seharusnya ada bobotnya. Jika seluruh lulusan Kemendikbudristek hanya memperoleh Upah Minimum Regional (UMR) selama lima tahun bekerja, itu juga menjadi indikasi bahwa Kemendikbudristek harus meningkatkan kualitas program ini melalui monitorisasi tingkat kesejahteraan dan gaji yang diterima alumninya.

Tujuannya adalah bahwa ketika sekolah menengah kejuruan pusat ini meningkat dan ditingkatkan, misinya yang paling mulia adalah membantu sekolah kejuruan lain di bidang penyedia dalam mencapai tingkat yang sama. Alhasil, dia akan menjadi kekuatan besar bagi SMK lainnya, karena jika gagal, dia akan meningkatkan kualitas 14.000 SMK di Indonesia. Perlu diingat bahwa ini bukan SMK terhebat agar dia menjadi siswa terbaik, tetapi memperkenalkan lulusan terbaik. Karena itu, Kemendikbudristek menetapkan program sekolah menengah kejuruan terpusat untuk memodernisasinya. Mereka pada akhirnya akan menjadi SMK yang melatih SMK lainnya, menciptakan *multiplier effect*.

Bentuk keselarasan ini bukan sekedar program MOU. Hal ini sangat penting karena Kemendikbudristek banyak mengamati bahwa program Kemendikbudristek mulai

menggunakan MOU, memiliki tanda tangan dengan industri dan kemudian habis. Tidak ada kegiatan lain, pengalihan SMK Pusat Keunggulan bukan lagi yang dimaksud Kemendikbudristek dengan menggandeng dunia kerja. Ada delapan komitmen minimal yang diperhatikan Kemendikbudristek. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tidak mudah untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Jika tidak bisa memenuhi potensi untuk mencapai delapan ini, lebih baik tidak mengikuti program unggulan SMK (Kurniawan & Anwar, 2020).

Termasuk yang dibutuhkan Kemendikbudristek adalah kurikulum Kemendikbudristek yang ada *link and match* dengan dunia industri dan harus dirancang oleh industri atau praktisi industri. Bukan hanya MOU tapi kurikulum juga harus sesuai dengan industri. Makanya, pembelajaran tersebut harus berbasis proyek, benar-benar kerja praktis, yang harus softskill dan hardskill yang kuat. Kemudian peran jumlah guru atau guru dari industri harus signifikan. Ini harus signifikan karena jika guru tidak berasal dari industri, bagaimana mereka akan mengajar? Selanjutnya, industri tempat praktek kerja sekarang minimal satu semester untuk mahasiswa. Satu semester magang di industri sebagai suatu keharusan. Kemudian harus memiliki standar yang ditetapkan dan sertifikasi kompetensi yang memadai. Selanjutnya, adalah pemutakhiran teknologi dan pelatihan bagi guru secara berkala dari dunia kerja. Hal ini terus menerus, guru yang bisa mengajar dengan baik adalah guru yang selalu belajar. Artinya, guru yang bisa menjadi guru yang baik adalah guru yang selalu mengupgrade ilmunya. Tidak ada yang namanya guru mengajar dengan baik jika guru tidak terus belajar. Terakhir adalah penelitian terapan untuk mendukung tindakan *teaching factory* yang dimulai dari industri dan lahir industri hilir. Itu harus dilakukan, apalagi mereka yang membuat jasa jasa atau produk manufaktur, hasilnya memang dipasarkan. Jika bisa menciptakan produk atau jasa nyata yang benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun hal ini memerlukan komitmen penyerapan, jika ada kerjasama dengan industri harus ada komitmen penyerapan. Karena jika tidak ada komitmen penyerapan, perusahaan hanya tanggung-tanggung bekerjasama dengan pihak SMK. Namun jika ada komitmen penyerapan oleh perusahaan, maka akan dipastikan apa yang dilakukan siswa SMK benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Kemendikbud, 2020).

B. Sinergi Dunia Pendidikan Vokasi, Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar

Untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0, pemerintah harus memperkuat pendidikan tinggi di tanah air, khususnya pendidikan tinggi kejuruan, dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Salah satunya cara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Manusia yang berkompeten akan dipersiapkan untuk bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan kewajiban dan pekerjaan bersama. Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban dan perannya sendiri untuk mengembangkan manusia yang berkualitas; pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas (Aryanti, 2021).

Perguruan Tinggi Vokasi, sebagai institusi induk pendidikan vokasi negara, mengeluarkan lulusan tahunan dalam rangka mendidik siswa untuk perubahan lingkungan sosial, budaya, dan profesional, serta kemajuan teknologi yang cepat. Terhubung dan selaras tidak hanya dengan dunia bisnis dan pekerjaan, tetapi juga dengan masa depan yang selalu berubah. Perguruan tinggi kejuruan harus mampu menciptakan dan melaksanakan prosedur pembelajaran inovatif yang memungkinkan mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal dan selalu relevan dalam bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Richendi & Soesanto, 2021).

Namun terdapat kesulitan dalam pendidikan tinggi kejuruan datang ketika, untuk memenuhi kebutuhan dunia komersial dan industri akan lulusan yang siap bekerja, tidak hanya untuk pelatihan, diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja yang melampaui pengetahuan teoritis atau ilmu pengetahuan (Mustari & Rahman, 2014). Ini menjadi perhatian karena mencapainya pasti akan sulit. Pertama, siswa harus memiliki lebih banyak waktu di kelas untuk latihan dan fleksibilitas dalam belajar daripada hanya belajar teori. Ini menyiratkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki kebutuhan yang signifikan untuk infrastruktur praktis. Kebijakan pembelajaran gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya mengatasi masalah ini. Sementara, Merdeka Belajar adalah jenis pembelajaran di perguruan tinggi yang mandiri dan adaptif dalam rangka menumbuhkan budaya belajar yang inventif, tanpa hambatan, dan berpusat pada siswa. Program utama tersebut antara lain kemudahan pembukaan program studi baru, perbaikan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan PTN menjadi PTN berbadan hukum, dan kesempatan belajar selama tiga semester di luar program studi (Suharti & Faidin, 2021).

Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh kredit di luar program studinya selama tiga semester, satu semester untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya dan dua semester untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar institusi. Kampus Merdeka adalah jenis kegiatan belajar yang terjadi di luar perguruan tinggi. Diantaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan wirausaha, melakukan studi/proyek mandiri, dan berpartisipasi dalam program kemanusiaan. Semua tugas tersebut harus dilaksanakan di bawah pengawasan dosen (Syahyadi, 2020). Kampus Merdeka juga diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara keseluruhan, siap bekerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran Merdeka Belajar adalah salah satu contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa yang paling terlihat. Kampus Merdeka menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa, serta bagi pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam menghadapi realitas dan dinamika lapangan seperti kebutuhan kemampuan, masalah, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta tujuan dan pencapaian (Aryanti, 2021).

Daftar Referensi

- Aryanti, N. (2021). MERDEKA BELAJAR PADA PENDIDIKAN VOKASI (POLITEKNIK) DI MASA PANDEMI. *INTEGRASI KEILMUAN DALAM MENYONGSONG MERDEKA BELAJAR*, 11.
- Kemendikbud, D. D. (2020). *Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 1–33*.
- Kurniawan, N. A., & Anwar, K. (2020). ANALISIS KEBUTUHAN MATERI BIMBINGAN DAN KONSELING SISWA SMK DI ERA MERDEKA BELAJAR. *PD ABKIN JATIM Open Journal System, 1(2)*, 91–98.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). *Manajemen pendidikan [Management of Education]*. RajaGrafiika Persada.
- Richendi, T., & Soesanto, S. (2021). MASA DEPAN PRODI VOKASI KEUANGAN DAN PERBANKAN DI ERA NEO BANK DAN MERDEKA BELAJAR. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN ORGANISASI, 10(01)*, 43–52.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Suharti, S., & Faidin, F. (2021). PENGARUH PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KEAHLIAN INFORMATIKA UNTUK MENGHADAPI DUNIA KERJA. *INFOTIKA: Jurnal Pendidikan Informatika, 1(01)*, 10–18.
- Syahyadi, R. (2020). Sinergitas Pendidikan Vokasi, Pemerintah dan Dunia Usaha-Dunia Industri dalam Menyongsong Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, 4(1)*, 53–56.
- Tallar, R. Y. (n.d.). QUO VADIS MERDEKA BELAJAR DI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL. *MERDEKA BELAJAR*, 11.

Bab XII

Manajemen Rencana Strategis di Era Merdeka Belajar

A. Manajemen Strategis

Upaya organisasi untuk bekerja selaras dengan lingkungannya disebut sebagai manajemen strategis. Dengan demikian, strategi dapat dilihat sebagai strategi untuk mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan rencana tindakan organisasi menjadi satu, terhubung, dan terkoordinasi (Iriantara, 2017). Manajemen strategis, menurut David (2016), adalah proses mengembangkan, mengeksekusi, dan mengevaluasi pilihan lintas fungsi untuk membantu bisnis memenuhi tujuannya. Blocher dan Lin (1999) mendefinisikan manajemen strategis sebagai penciptaan keunggulan kompetitif jangka panjang organisasi, yang menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Manajemen strategis, menurut Miller (2018), adalah seperangkat bakat manajerial yang dapat dan harus digunakan oleh semua peran organisasi. Akibatnya, manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai kumpulan teknik manajerial yang ditujukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Manajemen strategis, sebagai bakat manajerial, jelas dipecah menjadi beberapa tingkatan.

Manajemen strategis, menurut David (2016), memiliki beberapa fase yakni: pengembangan strategi meliputi tujuan jangka panjang organisasi, tujuan jangka pendek, kekuatan dan kelemahan, strategi alternatif yang harus dipertimbangkan, serta pemilihan taktik khusus yang akan diterapkan. Semuanya merupakan bagian dari proses perumusan strategi. Implementasi strategi adalah langkah selanjutnya. Manajemen strategis adalah proses yang dimulai dengan pengembangan strategi dan diakhiri dengan pelaksanaannya. Ini adalah tahap di mana rencana tersebut diwujudkan dengan memberdayakan pekerja dan supervisor untuk melaksanakannya. Langkah terakhir adalah mengevaluasi pendekatan. Inilah saatnya untuk mencari tahu taktik mana yang tidak berhasil. Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap elemen internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja, sebagai bagian dari proses evaluasi strategi untuk mengambil tindakan yang tepat. Semua fase ini harus diselesaikan agar organisasi menjadi efisien dan berhasil dalam mencapai tujuannya.

Tentu saja, sebelum perencanaan strategis harus memperhitungkan sifat manajemen strategis di samping fase strategis. Ada lima karakteristik manajemen strategis, antara lain (1) manajemen strategis dilakukan dalam perencanaan skala besar yang melibatkan kepentingan seluruh komponen organisasi; (2) manajemen strategis adalah proses jangka Panjang atau manajemen strategis difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi, rencana organisasi hierarkis, seperti rencana strategis, rencana operasional, program, dan kegiatan, adalah produk akhir dari pendekatan perencanaan ini, (3) fokus pada masa depan adalah ciri dari perencanaan strategis, (4) Visi dan tujuan organisasi menjadi pedoman dalam merumuskan strategi strategis, (5) Pemimpin terlibat dalam pengembangan strategi strategis. Sementara, fungsi manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan strategi ke dalam Tindakan (Latorre-Medina & Blanco-Encomienda, 2013).

Mengembangkan rencana strategis organisasi merupakan aspek penting dari pertumbuhannya. Manajemen strategis memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap pencapaian tujuan organisasi jika berhasil diterapkan oleh institusi. Beberapa keunggulan manajemen strategis telah dikutip oleh Lubis (2004), termasuk kemampuan untuk meramalkan potensi kesulitan, kemampuan untuk menarik perhatian manajemen, dan kemampuan untuk meningkatkan reaktivitas organisasi terhadap perubahan eksternal terjadi, dapat mengerahkan semua upaya untuk mencapai tujuan institusi, dan menghasilkan kolaborasi dalam mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang. Perusahaan non formal bukan satu-satunya yang menggunakan manajemen strategis. Manajemen strategis juga diperlukan untuk organisasi formal dan berskala besar seperti pemerintah dan terutama Lembaga Pendidikan.

B. Manajemen Rencana Strategis dan Merdeka Belajar

Untuk mencapai tujuan, kebijakan adalah alat yang Lasswell dan Kaplan (2013) gambarkan sebagai program prediksi yang melibatkan tujuan, keyakinan, dan perilaku. Kapasitas kebijakan pemerintah untuk menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan adalah keharusan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut.

Merdeka di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menghasilkan sejumlah produk kebijakan publik. Salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah pendidikan dan pengembangan budaya adalah kebijakan merdeka belajar Paradigma baru pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan berkelanjutan mencakup kebijakan merdeka belajar ini. Untuk membuktikannya, UN diganti dengan Penilaian Kompetensi dan Survei Karakter, yang memperhitungkan kemampuan dan bakat siswa dalam menentukan layak atau tidaknya untuk lulus, sejalan dengan paradigma baru yang berpandangan bahwa sekolah dan masyarakat harus bertujuan untuk mengembangkan keterampilan. Fokusnya harus pada proses daripada hasil akhir, seperti yang ditunjukkan oleh Ujian Nasional yang sangat menekankan pada hasil. Mendapatkan hasil sangat penting, tetapi begitu juga proses pencapaian pencapaian tersebut, diagnosis dan resep dibuat melalui penilaian (Bonstingl, 1995).

Kebijakan dapat dilihat dalam tujuh cara yang berbeda, menurut Duke dan Candy (1991):

- a. Peran kebijakan dalam menegaskan tujuan dan sasaran organisasi
- b. Keputusan oleh entitas yang berbeda yang mengatur, mengontrol, dan memberikan pengaruh dalam yurisdiksi mereka disebut kebijakan.
- c. Kebijakan sebagai seperangkat prinsip untuk mengambil keputusan independen
- d. Penggunaan kebijakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah
- e. Sebagai hasil dari kebijakan ini, dimungkinkan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
- f. Dalam lingkup aktivitas substantif, kebijakan adalah cara yang konsisten dan teratur.
- g. Produk akhir sistem pembuatan kebijakan: Kemampuan kebijakan untuk berdampak pada perumusan kebijakan di masa depan.

Sebuah kebijakan, menurut Hough (1984), dapat mencakup segala sesuatu mulai dari kumpulan tujuan dan rencana hingga serangkaian program dan pilihan hingga aturan dan hukum. Dengan kata lain, kebijakan Merdeka Belajar bisa dianggap sebagai kebijakan karena memiliki tujuan yang jelas, rencana pelaksanaannya dan didukung oleh pemerintah. Hal ini juga merupakan kebijakan karena keputusan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah dikeluarkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kebijakan pendidikan adalah "Merdeka Belajar". Kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global tergantung pada kebijakan pendidikannya, yang dengan demikian menjadi prioritas utama di era globalisasi sekarang ini (Toma, 2010).

Dengan kata lain, menurut Albert dan Grzeda (2015), perencanaan strategis adalah proses di mana organisasi memilih tujuan jangka panjangnya, mengembangkan strategi, dan mengimplementasikannya. Strategi, arah, dan sumber daya organisasi ditentukan melalui perencanaan strategis, yang merupakan suatu proses. Dengan kata lain, ini adalah cetak biru bagaimana pendidikan akan dikembangkan dan dilaksanakan di masa depan. Rencana strategis dikembangkan sesuai dengan tujuan program pendidikan negara. Tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang yang ingin dicapai akan didasarkan pada tujuan pendidikan negara tersebut. Pendidikan, manajemen, keuangan, dan administrasi akademik semuanya termasuk dalam proses perencanaan strategis. Budaya organisasi dan lingkungan juga merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional, rencana strategis memperhatikan pentingnya kebebasan belajar. Salah satu tujuan jangka pendek dari rencana strategis adalah untuk memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Untuk tahun ajaran 2020/2021, kebijakan ini pertama kali dirilis dan akan diberlakukan sepenuhnya.

Tentu saja, efektivitas sistem pendidikan harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan pembelajaran ini dalam rencana strategis. Terlepas dari ukuran negara, pendidikan Indonesia memiliki kualitas dan layanan yang beragam. Karena pemerataan mutu dan pelayanan pendidikan, wajar jika kinerja administrasi pendidikan juga tidak merata. Di lokasi perkotaan, pelaksanaan pembelajaran mandiri akan sangat berbeda dengan di perdesaan. Untuk menerapkan kebijakan pembelajaran gratis, pendidik seperti guru memainkan peran penting. Akibatnya, pemerintah pusat harus memasukkan ini ke dalam strategi jangka panjangnya (Coleman, 2000).

Mempertimbangkan fakta bahwa tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia memiliki manajemen pendidikan yang memadai dalam mempersiapkan kebijakan pembelajaran mandiri. Tentu saja, jika lembaga pendidikan tidak mampu mengatur dirinya sendiri secara memadai, konsekuensi dari strategi pembelajaran otonom tidak akan seperti yang seharusnya. Budaya dan suasana lembaga pendidikan harus mampu mendukung terselenggaranya pembelajaran mandiri dan merdeka.

Daftar Referensi

- Albert, S., & Grzeda, M. (2015). Reflection in strategic management education. *Journal of Management Education*, 39(5), 650–669.
- Blocher, E., Blocher, E. J., Chen, K. H., Lin, T., & Lin, W. T. (1999). *Cases and*

- Readings in Strategic Cost Management for Use with Cost Management: A Strategic Emphasis*. McGraw-Hill/Irwin.
- Bonstingl, J. J. (1995). Introduction: Creating schools of quality-an introductory workshop. *Maryland: Centre for Schools of Quality*.
- Candy, P. C., & Crebert, R. G. (1991). Lifelong learning: An enduring mandate for higher education. *Higher Education Research and Development*, 10(1), 3–17.
- Coleman, M. (2000). *Leadership and strategic management in education* (Vol. 2). SAGE.
- David, F., & David, F. R. (2016). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases*. Pearson–Prentice Hall Florence.
- Hough, M. (1984). Motivation of adults: implications of adult learning theories for distance education. *Distance Education*, 5(1), 7–23.
- Iriantara, Y. (2017). Media Literasi dan Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Review*, 5(1), 12.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2013). *Power and society: A framework for political inquiry*. Transaction Publishers.
- Latorre-Medina, M. J., & Blanco-Encomienda, F. J. (2013). Strategic management as key to improve the quality of education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 81, 270–274.
- Lubis, A. N. (2004). Strategi Pemasaran dalam persaingan bisnis. *Universitas Sumatera Utara*.
- Miller, E. W. (2018). Nonprofit strategic management revisited. *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, 9(2).
- Toma, J. D. (2010). *Building organizational capacity: Strategic management in higher education*. JHU Press.

Bab XIII

Supervisi Merdeka Belajar

A. Tujuan Supervisi Merdeka Belajar

Sebagaimana dikemukakan oleh Imron (2011), tujuan utama supervisi pendidikan adalah membantu guru menjadi lebih efektif dengan meningkatkan profesionalisme mereka. Kemudian, disebutkan oleh Asmani (2012) bahwa tujuan utama supervisi adalah meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar dan belajar lebih efektif dan produktif. Oleh karena itu, pemantauan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Peran seorang supervisor pendidikan adalah untuk membantu seorang guru atau siswa dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar mereka. Tujuan supervisi belajar mandiri sebanding dengan tujuan supervisi pendidikan pada umumnya, yaitu untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran (Mustari & Rahman, 2011). Selama siswa diperbolehkan untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri tanpa gangguan atau tekanan, pembelajaran mandiri dapat berhasil dilaksanakan.

Menurut Purnawanti et al., (2016) pengawasan memiliki banyak tujuan, antara lain:

- a. Menemukan dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang konsisten dengan pengertian otonomi siswa;
- b. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, nyaman, dan bebas tanpa menggunakan paksaan dan tekanan;
- c. Membentuk tim pendidik untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran mandiri;
- d. Membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah hambatan apa pun yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pendidikan;
- e. Membantu dalam pengembangan kekuatan kreatif tenaga kependidikan, sambil membangun lingkungan belajar yang aman dan mandiri;
- f. Membantu pengajar memahami dan menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan prinsip belajar mandiri, yaitu belajar tanpa paksaan atau tekanan dengan cara yang damai dan nyaman.
- g. Mendukung guru dalam upaya mereka untuk membantu siswa menjadi pembelajar mandiri;
- h. Membantu guru bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan materi pembelajaran sejalan dengan pengertian *self-directed learning*;
- i. Membantu pengajar memahami dan menggunakan pendekatan dan media pembelajaran untuk pembelajaran yang efektif dengan pengertian belajar mandiri;
- j. Membantu mengembangkan minat dan keterampilan siswa agar lebih memahami dan memenuhi persyaratan siswa mereka di kelas;
 1. Membantu guru dalam menilai perkembangan siswa;
- k. Membantu pendidik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan Pendidikan;
 1. Mendorong para pendidik untuk lebih menekankan pada prestasi belajar siswa.

B. Prinsip Supervisi Merdeka Belajar

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Saifullah & Sutopo (2017), dapat dibagi menjadi dua kategori: yang terkait dengan pencapaian tujuan dan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk mencapai suatu tujuan, seseorang harus mampu mengawasi pembelajarannya sendiri secara mandiri:

- a. Prinsip pengawasan yang berkaitan dengan tujuan kebijakan meliputi a. Meningkatkan tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan bakat masing-masing, yang diharapkan dapat mengarah pada masyarakat yang lebih baik; dan b. Mendorong siswa untuk menggunakan bakat mereka dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
- b. Penyempurnaan kepemimpinan dalam memastikan bahwa program pembelajaran tahun ajaran tetap konsisten dari tahun ke tahun.
- c. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, kooperatif, tanpa tekanan atau harapan apapun.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan supervisi ini terkait dengan pengertian supervisi belajar merdeka, meliputi:

- a. Administrasi terutama berkaitan dengan memastikan bahwa publik memiliki akses ke berbagai sumber daya;
- a. Supervisi pendidikan dengan menitikberatkan pada pengembangan norma-norma pembelajaran yang sejalan dengan pengertian *self-directed education*;
- b. Tanggung jawab administratif dan pengawasan tidak dapat dipisahkan;
- c. Pengawasan terbaik didasarkan pada berbagai keyakinan dan disiplin ilmu;
- d. Pemantauan berbasis musyawarah yang baik;
- e. Seorang supervisor yang efektif menggunakan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa;
- f. Sebagai hasil dari proses pemecahan masalah yang dinamis;
- g. Imajinatif, bukan direktif;
- h. Diimplementasikan secara teratur dan dirumuskan secara kolaboratif;
- i. Ditentukan oleh hasil yang telah diperoleh selama prestasi yang bersifat profesional.

C. Teknik Supervisi Merdeka Belajar

Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang berkaitan dengan mengatasi masalah pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan masalah lain yang berkaitan dengan keberhasilan upaya pendidikan (Aedi, 2008). Pendekatan supervisi belajar mandiri mencakup berbagai strategi untuk mengatasi masalah seperti kesulitan yang dialami siswa saat menerapkan pembelajaran mereka sendiri dan faktor lain yang berkontribusi pada kinerja mereka secara keseluruhan.

Berdasarkan metode supervisi umum yang dikemukakan oleh Jannah et al., (2020), teknik supervisi belajar mandiri dibedakan menjadi dua yaitu teknik supervisi individu dan teknik supervisi kelompok.

1. Teknik supervisi Individu

Supervisor menggunakan pendekatan individual untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah dengan melakukan supervisi secara one-on-one dengan guru (Sahertian, 1994). Ada kalanya kekhawatiran seorang guru tidak sama dengan yang dialami oleh pendidik lainnya, dan ada kemungkinan masalah yang dihadapi seorang

guru bersifat unik atau rahasia. Teknik yang dapat digunakan untuk mengawasi individu meliputi:

a. Metode kunjungan kelas

Seorang guru menggunakan pendekatan kunjungan kelas sebagai semacam supervisi di mana seorang supervisor baik secara aktif berpartisipasi dalam pelajaran atau secara tidak langsung mengamati guru saat dia mengajar (hanya mengamati). Tujuan metode ini adalah untuk membantu guru mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama kegiatan kelas. Tantangan dan masalah guru dapat dipahami dengan lebih baik melalui kunjungan kelas oleh supervisor, yang kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk membantu menemukan solusi.

b. Pertukaran rahasia

Guru dan tenaga kependidikan memiliki obrolan pribadi dan mengadakan pertemuan pribadi di kantor mereka sendiri. Baik setelah kegiatan observasi pengawas atau atas permintaan guru, obrolan pribadi ini mungkin bisa diadakan. Kritik guru akan ditanggapi secara pribadi untuk mencari solusi secara kelompok. Supervisor harus dapat mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan guru berdasarkan pengamatannya, kemudian mendorong/memotivasi guru agar dapat mempertahankan/lebih meningkatkan kinerjanya.

c. Analisis Diri

Untuk menilai setiap siswa secara individual, guru membandingkan kinerja siswa mereka dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian diri, siswa mungkin akan ditanyai serangkaian pertanyaan tentang pengalaman mereka dengan proses belajar mengajar selama ini. Temuan penilaian ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja karena akan jelas apa yang hilang dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan oleh karena itu masalah apa yang perlu segera ditangani. Menemukan dan mengatasi kesulitan dapat dilakukan oleh guru, dan jika guru tidak dapat berbicara secara pribadi dengan supervisor untuk meminta saran/pendapat, guru dapat melakukannya sendiri.

2. Teknik supervisi kelompok

Untuk membina guru bersama-sama, metodologi supervisi kelompok digunakan oleh guru dan sekelompok guru lain dalam satu sesi pemantauan (Sahertian, 2000). Ketika seorang guru menghadapi tantangan yang sama dengan guru lain saat belajar mengajar, metode ini diterapkan. Sulit untuk menyederhanakan RPP (peraturan baru) atau menggunakan teknik atau media untuk melaksanakan pembelajaran mandiri, misalnya. Pendekatan pengawasan kelompok yang dapat digunakan meliputi:

a. Majelis sekolah. Ini adalah praktik umum di antara tenaga kependidikan sekolah dan guru untuk mengadakan pertemuan staf reguler untuk mengatasi masalah seperti kemajuan siswa dan upaya untuk meningkatkan status profesi guru. Menurut Pidarta (2009), tujuan supervisi guru adalah untuk:

- 1) Menyatukan perspektif guru tentang tantangan yang mereka alami dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Memotivasi guru untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan mencapai potensi maksimal mereka;

- 3) Carilah teknik instruksi alternatif yang efektif untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Kegiatan belajar, seperti metodologi, pemecahan masalah, dan media, semuanya merupakan permainan yang adil untuk pertukaran pengetahuan.
- b. Orientasi untuk guru baru. Dengan berbagi pengalaman satu sama lain, guru baru dapat belajar tentang lingkungan sekolah dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan. Untuk guru baru, acara orientasi tidak hanya untuk pemula, tetapi semua guru dianggap tidak terbiasa dengan kebijakan baru pembelajaran mandiri, sehingga baik pemula dan veteran dapat berbagi pemikiran mereka tentang konsep baru dalam pendidikan. Akibatnya, kemungkinan terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran otonom diprediksi.
 - c. Agar pembicaraan tetap terfokus pada pembelajaran siswa, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah kegiatan kelompok di mana guru yang mengajar topik terkait berkolaborasi di bawah bimbingan supervisor. Sebelum pertemuan, telah ditentukan pokok-pokok bahasan, termasuk penyusunan RPP, yang meliputi materi, teknik, media, dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 1). Meningkatkan pemahaman siswa dan retensi informasi mata pelajaran; 2). Memberikan kemudahan penggunaan bagi pengajar berupa dukungan dalam menyelesaikan permasalahan kegiatan belajar siswa.
 - d. Diskusi seperti yang diadakan selama pertemuan sekolah. Diskusi dapat berlangsung kapan saja dan dengan siapa pun yang mereka pilih dalam agenda ini. Diskusi memberikan guru kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka tentang isu-isu terkini dan untuk meningkatkan kemampuan belajar dan mengajar mereka sendiri. Supervisor dapat menggunakan metode ini untuk membantu guru dalam mengenal satu sama lain, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah, dan menghasilkan solusi kreatif.
 - e. Lokakarya. Dalam lokakarya, guru mendatangkan ahli sebagai pembicara untuk membantu siswa belajar dalam kelompok. Sebagai hasil akhir dari lokakarya, guru akan memperoleh kemampuan baru untuk memfasilitasi pembelajaran dan menangani berbagai masalah yang muncul selama kegiatan tersebut.

Daftar Referensi

- Aedi, N. (2008). *Pemantauan Standar Nasional Dalam Pengajaran*. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- Albert, S., & Grzeda, M. (2015). Reflection in strategic management education. *Journal of Management Education*, 39(5), 650–669.
- Asmani, J. M. (2012). Tips efektif supervisi pendidikan sekolah. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Blocher, E., Blocher, E. J., Chen, K. H., Lin, T., & Lin, W. T. (1999). *Cases and Readings in Strategic Cost Management for Use with Cost Management: A Strategic Emphasis*. McGraw-Hill/Irwin.
- Bonstingl, J. J. (1995). Introduction: Creating schools of quality-an introductory workshop. *Maryland: Centre for Schools of Quality*.
- Candy, P. C., & Crebert, R. G. (1991). Lifelong learning: An enduring mandate for higher education. *Higher Education Research and Development*, 10(1), 3–17.

- Coleman, M. (2000). *Leadership and strategic management in education* (Vol. 2). SAGE.
- David, F., & David, F. R. (2016). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases*. Pearson–Prentice Hall Florence.
- Hough, M. (1984). Motivation of adults: implications of adult learning theories for distance education. *Distance Education*, 5(1), 7–23.
- Imron, A. (2011). Supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Iriantara, Y. (2017). Media Literasi dan Pendidikan Karakter. *Nusantara Education Review*, 5(1), 12.
- Jannah, M., Prasojo, L. D., & Jerusalem, M. A. (2020). Elementary School Teachers' Perceptions of Digital Technology Based Learning in the 21st Century: Promoting Digital Technology as the Proponent Learning Tools. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 7(1), 1–18.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2013). *Power and society: A framework for political inquiry*. Transaction Publishers.
- Latorre-Medina, M. J., & Blanco-Encomienda, F. J. (2013). Strategic management as key to improve the quality of education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 81, 270–274.
- Lubis, A. N. (2004). Strategi Pemasaran dalam persaingan bisnis. *Universitas Sumatera Utara*.
- Miller, E. W. (2018). Nonprofit strategic management revisited. *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, 9(2).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2011). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter*. Laksbang Pressindo.
- Pidarta, M. (2009). *Supervisi pendidikan kontekstual*. Rineka Cipta.
- Purnawanti, E., Mustiningsih, M., & Burhanuddin, B. (2016). Supervisi dalam Peningkatan Kompetensi Guru melalui Gugus Sekolah. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(2), 159–164.
- Sahertian, P. A. (1994). Dimensi Administrasi Pendidikan. *Surabaya: Usaha Nasional*.
- Sahertian, P. A. (2000). *Konsep dasar & teknik supervisi pendidikan: dalam rangka pengembangan sumber daya manusia*. Penerbit Rineka Cipta.
- Saifullah, A. M., & Sutopo, H. (2017). *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*.
- Toma, J. D. (2010). *Building organizational capacity: Strategic management in higher education*. JHU Press.

BIOGRAFI PENULIS



Mohamad Mustari Ph.D, lahir di Sukabumi, 11 April 1964 dari pasangan Sambas Samsudin (Alm) dengan Ny. Artasih (Almh). Isteri Nama Henny Febriayanti dan tiga orang anak; 1. Muhammad Fakriansyah (16 tahun), 2. Aditya Kusumah (7 tahun) dan 3. Muhammad Aryadinata (4 tahun).
Alamat: Villa Dago Tol Blok D8 No. 1 Sarua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
Email: m_mustary@yahoo.co.id

Pendidikan Formal: Menyelesaikan pendidikan (SDN I Gunung Leutik, tahun 1979 dan SMPN 1 tahun 1982) serta pendidikan menengah (SMA KP 1 Jurusan IPA tahun 1985) semuanya di Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pendidikan Tinggi Sarjana Administrasi Negara (UT Jakarta tahun 1997), Magister Manajemen (S2) Jurusan Sumber Daya Manusia (STIE IPWI Jakarta tahun 2000) dan meneruskan pendidikan ke United Kingdom Beasiswa luar negeri dari pemerintah Republik Indonesia untuk program (S2) Master of Arts Jurusan Manajemen Pendidikan (University of Huddersfield UK Inggris tahun 2003) pernah menjadi mahasiswa UNJ program tahun 2004 program S3 jurusan Manajemen Pendidikan tahun 2004 dan melanjutkan ke University of Malaya Malaysia program doktor (S3) jurusan Perancangan Pendidikan atas biaya Universiti Malaya dan Kementerian Pendidikan Nasional RI tahun 2010. Pendidikan Kedinasan (Diklatpim IV tahun 2008) serta pendidikan dan pelatihan keahlian lainnya.

Riwayat Pekerjaan : menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 1986 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional sampai sekarang dan diberi tanggungjawab sebagai Tim Teknis Proyek Kecakapan Hidup (*Life Skill*) tahun 2003, sebagai Nasional Trainer program *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) tahun 2007 – 2010. Sejak 1 Januari 2022 menjadi dosen di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Buku/Karya Tulis: yang pernah diterbitkan “Pesantren dan Program Pembangunan Pemerintah (*Islamadina*, IRIS Bandung tahun 2008), Pembangunan Pesantren (Jurnal *Education Leadership* (UNY tahun 2009) serta Hak Asasi Perempuan dalam Memperoleh Pendidikan (Jurnal tahun 2010), Pembangunan Karakter ala Sekolah Berbasis Pesantren (Jurnal 2010), Pendidikan Karakter di Pesantren (Jurnal 2011), kemudian dalam bentuk buku: *Peranan Pesantren dalam Pembangunan Pendidikan Masyarakat Desa* (Multi

Press, Yogyakarta, 2010), *Rahasia Sukses Kepala Sekolah* (sebagai editor, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010), *Kiat Jitu Memenangkan Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri* (Penulis Multi Pres, Yogyakarta, 2011), *Kunci Sukses Meraih Gelar Magister dan Doktor: Tuntunan Menulis Tesis dan Disertasi* (Pesagimandiri Perkasa, Jakarta, 2011), *Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan Karakter* (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011).

Riwayat pekerjaan: Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 1986 pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional sampai sekarang dan diberi tanggungjawab sebagai Tim Teknis Proyek Kecakapan Hidup (*Life Skill*) tahun 2003, sebagai Nasional Trainer program *Australia Indonesia Basic Education Program* (AIBEP) tahun 2007 – 2010.

Pengalaman Organisasi Pengurus: OSIS dan Kemahasiswaan sebagai Ketua Pelajar Indonesia di Huddersfield UK Inggris, Pembina PKBM, pendiri Yayasan Pendidikan Ibnu Sina tahun 1995 sampai sekarang. Pembina di beberapa Pesantren. Penghargaan yang pernah diterima, Satya Lencana Karya Satya XX Tahun Presiden RI tahun 2006.

Kunjungan ke luar negeri Inggris 2002 dalam rangka Beasiswa Luar Negeri, Brazil 2006 Observer IJSO dan Malaysia Beasiswa Luar Negeri, Studi Banding ke Australia 2010, serta kunjungan ke luar negeri lainnya.

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA **MERDEKA BELAJAR**

Kini di berbagai belahan dunia terus berlomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini sebagai alat pendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Indonesia pun sedang berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai kebijakan Pemerintah mulai dari pembenahan kurikulum, pemberian fasilitas pendukung operasional pendidikan, pembuatan pelatihan-pelatihan guru, penumbuhan karakter peserta didik melalui lomba, peningkatan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, terluar dan terdepan, pembangunan sarana pendidikan lainnya hingga evaluasi pendidikan terus digalakan. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan MERDEKA BELAJAR dengan visi Pendidikan Indonesia “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptaya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global, selaras dengan tujuan cita-cita besar negara: mencerdaskan kehidupan bangsa.” Untuk mewujudkan semua itu pasti membutuhkan manajemen yang baik. Cita-cita yang baik membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang baik dan terarah. Tanpa manajemen yang baik, maka mutu pendidikan bisa jadi tak terkelola dengan baik sehingga kurang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Dengan begitu, dikotomi antara mutu pendidikan dan manajemen pendidikan bukan lagi merupakan sesuatu yang penting untuk diperdebatkan, karena kedua-duanya sangat penting bagi dunia pendidikan. Mutu pendidikan membutuhkan manajemen yang baik membutuhkan kualitas sumber daya yang baik. Untuk tujuan itulah, buku ini menjadi niscaya untuk diterbitkan.



Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung
40292

ISBN 978-623-97989-5-6 (PDF)

